



Dengan Menyebut Nama Allah  
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang





**FILSAFAT ADMINISTRASI/  
PENDIDIKAN**

**Bambang Qomaruzzaman**

## Filsafat Administras/Pendidikan

Copyright© 2021  
Hak Cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Cetakan I, Juli 2021

Penulis : Bambang Qomaruzzaman  
Editor : Jamiludin  
Layout : Rosihan Anwar  
Desain Cover : Ahmad Muhajir

*Diterbitkan oleh :*  
**Pustaka Aura Semesta**  
Jl. PHH. Mustofa No. 120  
Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40125

ISBN : 978-623-7231-35-6

# Kata Pengantar

Selalu ada mata kuliah filsafat pada setiap program studi di kampus. Apa gunanya filsafat? Apa gunanya Filsafat untuk Administrasi Pendidikan?

Ada banyak prodi Administrasi Pendidikan di banyak Perguruan Tinggi, namun sedikit buku mengenai Filsafat Administrasi apalagi mengenai Filsafat Administrasi Pendidikan. Untuk itu kehadiran buku ini menjadi penting bagi publik akademik di Indonesia. Selain memberikan pemahaman mengenai pentingnya belajar Filsafat yang terkait dengan bidang ilmu tertentu –dalam hal ini Administrasi Pendidikan, buku ini

juga secara telaten menyisir persoalan-persoalan Administrasi Pendidikan dari sudut Filsafat.

Buku ini masih membicarakan Filsafat dalam aliran klasik, seperti rasionalisme, empirisme, positivisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan lainnya. Jadi, sangat cocok untuk pembelajar pemula. Ilmu-ilmu dasar Administrasi dan Administrasi Pendidikan pastilah didasarkan pada filsafat klasik itu, sehingga memahami latar belakang filsafatnya sangat diperlukan. Filsafat memberikan basis, atau fondasi, yang membuat para pembelajar mengerti secara mendasar ilmu administrasi Pendidikan. Jika sudah memahami dari dasar, dari fondasinya, ilmu itu akan meresap dan mempengaruhi perilaku.

Buku ini hadir untuk Anda para pembelajar dan praktisi Administrasi atau Manajemen Pendidikan.

Selamat membaca

# Daftar Isi

**Kata Pengantar —iii**

**Daftar Isi —vii**

**PROLOG: Pentingnya Administrasi Pendidikan —I**

1. Untuk Apa Belajar Filsafat? —9
2. Memahami Ilmu Administrasi —20
3. Urgensi Filsafat Bagi Administrasi Pendidikan —65
4. Merumuskan Kerangka Filsafat Administrasi Pendidikan —78
5. Pemikiran Filsafat Klasik dan Administrasi —I I 2

6. Idealisme —119
7. Realisme dan Administrasi —134
8. Positivisme —143
9. Pragmatisme —154
10. Eksistensialisme —174

**Epilog: Membaca Drucker —188**



# PROLOG

## PENTINGNYA ADMINISTRASI PENDIDIKAN

*“the basic economic resource is no longer capital, not natural resources, not labor. It is and will be knowledge”*

**(Peter Drucker)**

Penerapan Merdeka Belajar pada sistem pendidikan Indonesia menciptakan iklim baru pada pengelolaan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan. Perubahan ini pada satu sisi menunjukkan pembaharuan yang memaksa sekolah untuk memperbaiki tata kelolanya. Pada sisi lain perubahan ini menciptakan transisi yang cukup kompleks dari sekolah gaya tradisional menuju manajemen sekolah baru. Karena transisi ini sedemikian kompleks maka dibutuhkan pemahaman mengenai administrasi pendidikan secara mendasar, untuk itulah buku ini dituliskan.

Perubahan arah administrasi pendidikan selain diletupkan oleh kebijakan Merdeka Belajar juga didorong oleh perubahan sosial yang memaksa semua organisasi untuk merubah jati dirinya. Peter Drucker dalam *The New Realities* (1989) mengemukakan bahwa perubahan dunia baru yang lebih terbuka, menyibak, menghadirkan pola-pola baru dalam pengelolaan organisasi. Efektivitas dan produktivitas suatu lembaga, misalnya, kini semakin tergantung pada teknologi yang menekankan pengetahuan, pekerjaan-pekerjaan lama tahap demi tahap dihapuskan, pekerjaan-pekerjaan baru ditingkatkan, dan pekerjaan-baru yang terus bermunculan mulai diterapkan. Pekerjaan

demi pekerjaan membutuhkan pengetahuan tertentu karena itu Drucker menegaskan bahwa pengetahuan bagi organisasi masa kini adalah modal yang sesungguhnya. Pada saat ini, dibandingkan dengan penumpukan laba yang besar, akses dan pengembangan pengetahuan lebih menjanjikan masa depan lembaga apa pun. Ini berarti, saat ini telah terjadi transformasi dari *labor intensive* menuju *knowledge intensive*.

Untuk saat ini dan seterusnya, ujar Drucker, pengetahuanlah yang menjadi sumber daya ekonomi. Pergeseran ini dapat ditengarai sebagai sebuah tugas baru bagi system organisasi manapun, yaitu tugas untuk meninjau ulang apa yang selama ini telah dilakukan dalam proses manajerial. Begitu yang menjadi “pusat” bergeser, terciptalah medan makna yang baru dengan konsekuensi yang baru pula. Ketika uang menjadi sumber daya utama dalam kehidupan, maka uang itulah yang penting sekaligus menjadi patokan pemaknaan unsur-unsur lainnya. Demikian pun jika sumber daya utama itu adalah pengetahuan, maka pengetahuanlah yang menjadi dasar pijakan dan sumber makna.

Penyataan Peter Drucker merupakan dasar dari tumbuhnya kesadaran bahwa di antara sejumlah sumber daya kehidupan, saat ini, pengetahuanlah yang menjadi faktor penentu utama. Uang bisa saja melimpah ruah, sumber daya manusia dapat saja luar biasa hebat, alam juga dapat saja luar biasa kaya raya seperti negeri ini, namun ketiadaan pengetahuan akan menyebabkan kerusakan.

Suatu lembaga bisa juga negara akan mengalami kerugian jika tak mengelola pengetahuan pegawainya dengan baik. Contoh sederhananya adalah anekdot bangkrutnya satu hotel karena pekerja yang sudah 40 tahun mengurus listrik dan AC pensiun. Sehari setelah itu ia pensiun, hotel itu mengalami masalah: listrik dan AC-nya tidak bisa menyala. Tak ada yang memperbaikinya, karena satu-satunya pegawai yang mengerti Listrik dan AC sudah pensiun. Inilah

yang contoh sederhana pengelolaan pengetahuan. Hal serupa tentu terjadi di Perguruan Tinggi. Begitu 1 profesor pensiun, ilmunya ikut dibawa oleh profesor itu. Padahal ilmu itu adalah ciri khas yang sekian puluh tahu telah menjadi keunggulan Perguruan Tinggi itu. Setelah itu apa yang terjadi? Perguruan Tinggi itu kehilangan daya saingnya.

Untuk itu, wajib hukumnya suatu organisasi mengelola pengetahuan yang dimilikinya. Itu artinya transfer pengetahuan harus diupayakan terjadi. Pimpinan dan karyawan bisa datang pergi bergantian, namun pengetahuan yang menjadi ciri penting organisasi itu harus tetap ada dan berkembang. Simpuylnya pengelolaan pengetahuan penting untuk:

- Memahami kekuatan dan penempatan SDM. Prinsipnya pengetahuan yang dimiliki SDM, menentukan kekuatan dan posisinya.
- Menghindari pengulangan proses kegagalan, karena kegagalan masa lalu telah menjadi pengetahuan yang dapat dihindari.
- Percepatan proses penciptaan pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada
- Menjaga pergerakan organisasi agar terys stabil

Fokus pada pengetahuan membuat suatu organisasi atau perusahaan tidak lagi menjadi tempat bagi sekumpulan orang yang bekerja itu-itu saja dengan target itu-itu saja. Para karyawan atau pelaku organisasi dalam konsep manajemen pengetahuan (*knowledge management*) ini bukanlah seseorang yang bekerja seperti robot, melakukan sesuatu secara otomatis, melainkan makhluk yang berpikir, mengemukakan suatu penemuan akan pekejeraannya, mengkombinasikan dengan pengetahuan lain, meresapi pengetahuannya, belajar dari rekan kerjanya, dan seterusnya. Proses panjang yang diantarai oleh kegiatan berpikir ini akan membuat statu perusahaan berkembang sekaligus juga menjadikan karyawannya menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Realitas baru ini ikut menuntut perubahan pola kerja administrasi di lembaga pendidikan. Dulu, para administrator bisa mengatasi krisis berkala dengan keyakinan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada segera akan kembali normal. Kini perubahan cepat di bidang sosial, teknologi, ekonomi, dan politik membuat para administrator tidak mungkin mengembangkan perencanaan jangka panjang, bertahan dalam kerangka organisasi yang mapan, dan mengukur efektivitas lembaga dengan ukuran-ukuran yang biasa (Veill, 1989).

Salah satu penyebab pergolakan yang harus diterima lembaga adalah konteks sosial yang dinamis dari suatu lembaga. Penyertaan masyarakat dan masalahnya sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan (bahkan perumusan kurikulum) menjadikan lembaga pendidikan untuk bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang tak tentu dan beragam.

\*

Ilmu Administrasi pada perkembangan awalnya merupakan bagian dari kecenderungan modern untuk menempatkan atau memandang seluruh aspek kehidupan dalam perspektif rasio instrumental. Rasio disebut Instrumental seperti namanya berarti “alat” atau “instrument” belaka. Di depan palu semuanya menjelma paku. Rasio yang telah jadi alat akan menjelma seperti palu, tidak lain, hanya itu. Rasio seperti hanya sebagai pelayan bagi pemiliknya. Sebagai instrument, rasio jadi tunduk pada macam-macam tujuan, karena itu dapat dipakai oleh siapa saja. Agar tetap bisa berfungsi baik, pengguna alat harus “bebas nilai”: inilah yang ditawarkan positivisme.

Positivisme adalah paradigma ilmu social yang dipengaruhi oleh ilmu alam. Memang pada perkembangan peradaban manusia ilmu alam berkembang lebih dahulu karena itu dimensi-dimensi ilmu alam dijadikan tolok ukur bagi ilmu social. Misalnya tentang kepastian

hukum benda-benda yang tidak terkait dengan cara pandang manusia (subyek) diadopsi menjadi prinsip obyektivitas dalam ilmu. Yakni seharusnya apa yang diamati pun terbebas dari penilaian manusia. Keharusan ini kemudian dikembangkan positivisme menjadi kaidah “bebas nilai”.

Prinsip “bebas nilai” ini yang mulanya dikembangkan dalam seluruh ilmu di dunia modern.. Dalam kebudayaan modern, segala hal dipandang rasional sejauh dapat diperalat, dimanipulasi, dimanfaatkan atau diperhitungkan secara matematis dan ekonomis. Melalui rasio teknologis penataan masyarakat semakin bersifat “rasional, produktif, teknis dan total”, tetapi dalam kondisi demikian setiap perubahan kualitatif pada system itu harus disingkirkan. Perubahan-perubahan dapat dibiarkan sejauh dapat dicocokkan dengan sistem sebagai keseluruhan. Artinya pemikiran manusia zaman ini dianggap berguna sejauh dapat diterapkan pada keseluruhan sistem sehingga menjadi *operable* (Kees Bertens, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman, Jakarta, Gramedia, 1983: 203). Keputusan menggunakan rasio secara instrumental membuat kehidupan menjadi semakin teratur, namun, seperti dikemukakan Herbert Marcuse, pada sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah merampas kebebasan manusia sampai ke dasar-dasarnya.

Kesadaran akan perlunya memandang manusia sebagai bukan benda-benda dapat ditemukan dalam gerakan administrasi demokratis dengan tokoh Elton Mayo (1930-an). Manusia, bagi Mayo, bukanlah “benda-benda” yang hanya menerima dan melakukan pengarahan satu arah, Mayo berpinsip bahwa, manusia juga adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dan memiliki keputusan tertentu terhadap apa yang dilakukannya. Karena itu Mayo percaya bahwa produktivitas para pekerja dapat diungkit dengan mempertemukan kebutuhan sosial mereka dalam bekerja, yaitu dengan cara diberi peluang untuk ikut mengambil keputusan (dalam apa yang dilakukannya) dan saling berinteraksi (tidak hanya melakukan sesuai

dengan yang diperintahkan). Teori relasi individu ini merupakan antitesa dari teori saintifik.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan sifat ilmu yang terus berubah, juga ilmu administrasi pendidikan.

“Tidak ada ilmu yang selesai, para ilmuwan selalu dapat mengembangkan ilmunya lebih lanjut. Ilmu bukan ibarat sebuah rumah dengan dasar abadi yang sepanjang sejarah hanya dilengkapi dengan tingkat-tingkat baru. Struktur ilmu bahkan pokok-pokok ilmu mengalami perubahan. Ontologi menyelidiki dasar-dasar ilmu. Hasil penelaahaannya dapat dijadikan dasar merumuskan hipótesis-hipotesis baru untuk memperbaharui asumís-asumsi dasar yang pernah digunakan” (Van Peursen, 1985)

Pada kutipan ini, Peursen menegaskan bahwa perubahan ilmu diawali dari perubahan cara pandang terhadap penyelidikan “dasar-dasar ilmu” (ontologi). Kajian mengenai ontologi didapatkan dalam filsafat. Untuk itulah, maka kajian filsafat dibutuhkan oleh semua ilmu dengan faidah utama memperbaharui atau paling tidak menciptakan sifat kritis dalam menggunakan ilmu.

Menurut pengertian yang terkandung di dalam namanya, filsafat (*philosophia*) adalah cinta (*philia*) kebijaksanaan (*sophia*). Konon, Phytagoraslah –filsuf Yunani dari abad ke-6 SM-- yang pertama kali mengemukakan istilah ini. Ia juga menegaskan bahwa mencintai bukanlah orang yang merasa sudah memiliki, mencintai berarti terus mencari dengan hati yang merindu. Filsafat adalah sebuah kerinduan atau dambaan akan sesuatu yang belum selesai.

Tugas filsafat adalah menemukan hakikat segala sesuatu. Juga hakikat administrasi pendidikan. Namun apa yang disebut hakikat itu tidak pernah mudah dideskripsikan. Mengapa? Eran Dofrman dalam “*Philosophy as an’As*” menyebutkan bahwa berfilsafat bermula dari

hasrat untuk mendeskripsikan realitas sebagaimana adanya, namun agar dapat mendeskripsikannya kita harus mengambil jarak dari realitas ini sehingga kita tidak dapat memilikinya secara utuh. “Seorang filsuf harus surut ke belakang, menanggukuhkan pengalamannya agar dapat mencermati benda-benda dengan jelas sebagaimana adanya” (Eran Dofman, *Philosophy as an’As*”, dalam Carel., Havi et al (Eds), *What Philosophy is*, Continuum, London, 2004, hal. 169). Hakikat realitas tidak dapat secara tuntas dideskripsikan, namun kita harus mengatakan sesuatu agar kenyataan ini memiliki nama yang mengubah yang tak dikenali menjadi suatu tatanan, suatu dunia.

Realitas menurut Heidegger adalah keterbukaan (*Erchlossenheit*), segala kemungkinan yang tak terkatakan namun berjubelan untuk keluar menampilkan diri saat dimaknai. Persepsi, pikiran atau bahasa kita tentang realitas merupakan suatu upaya menghentikan keterbukaan itu menjadi suatu susunan yang bermakna. Proses pemaknaan ini disebut Lawson sebagai “*closure*” (penutupan) (Lihat Hilary Lawson, “*Philosophy as saying the unsayable*” dalam Carel, Havi, et al (eds.), *What Philosophy Is*, Continuum, London, 2004, hal. 276).

“Hampan jutaan bintang yang tampak di langit pada malam yang cerah adalah sebuah keterbukaan yang serba tak tentu. Kita bisa menyebut apa saja, namun katakana sesuatu, misalnya “*sagitarious*”, “*leo*” atau bahkan “*patung*”, maka pola yang dibayangkan itu menjadi suatu *closure* yang memungkinkan kita menemukan bintang-bintang menurut pola itu dan menamai mereka masing-masing.” (F Budhi Hardiman, 2007: hal. 17).

Berfilsafat memang kegiatan yang mendorong kita tidak menerima sesuatu begitu saja, selalu ada pertanyaan yang menanggukuhkan penerimaan akan apa adanya sesuatu. Sementara orang

awam cenderung terpaku pada deskripsi realitas tanpa mencoba keluar dari perspektif mereka sendiri dan melebur di dalam dunia rekaan mereka seolah-olah dunia itu hādala satu-satunya dunia yang ada, seorang filsuf tidak pernah merasa puas dengan meleburkan diri ke dalam dunia itu begitu saja. Ia mencoba keluar dari perspektif baku, beku, dan kaku yang dipegang teguh orang banyak sebagai kebenaran.

Ilmu Administrasi pendidikan, dari sudut pandang filsafat, belum selesai terutama karena selalu ada hal-hal baru atau masalah baru yang harus dijawab. Untuk mendapatkan jawabannya dalam kasus tertentu tidak bisa menggunakan cara pandang lama, jawaban diberikan dengan merubah “dasar-dasar ilmu” seperti yang dilakukan Mayo dengan merubah cara pandang tentang manusia yang kemudian menghasilkan struktur ilmu baru administrasi pendidikan.

Untuk itulah filsafat administrasi pendidikan perlu untuk dibicarakan secara sistematis sekaligus berdasarkan perkembangan ilmu administrasi mutakhir. Penegasan ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa buku (dan berarti juga kajian) filsafat administrasi pendidikan sampai saat ini belum berkembang dengan baik, bila pun ada masih menampilkan kaitan filsafat klasik (rasionalisme, idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme) dengan administrator. Sementara kajian filosofis mengenai perkembangan manajemen/administrasi kontemporer seperti *knowledge management*, *strategic management*, *risk management*, dan sejenisnya tidak berkembang.

Buku ini mencoba membuka “jalan awal” bagi ideal ini.



## UNTUK APA BELAJAR FILSAFAT?

“Studi filsafat mempersiapkan mahasiswa untuk *handle advanced thinking*. Mereka sanggup menempatkan problem-problem yang harus ditangani dalam konteks lebih luas dan pada tahap lebih mendalam. Mereka lebih gampang menangkap inti persoalan dan tahu membedakan hal-hal penting dari hal-hal sampingan. Mereka lebih peka terhadap nuansa-nuansa. Dan yang tak kalah penting: mereka lebih sanggup merumuskan suatu permasalahan dengan jelas. Pendek kata, walaupun studi filsafat tentu belum menjamin jawaban yang tepat bagi semua problem yang dihadapi, namun seringkali ia dapat membantu untuk menilai dan mensituir problem-problem konkret dengan lebih tepat dan matang”<sup>1</sup>

Lalu apa manfaat dari belajar Filsafat Ilmu pengetahuan, seperti Filsafat Ilmu Administrasi Pendidikan ini?

Filsafat membuat mahasiswa menjadi kritis dalam bersikap ilmiah. Kritis artinya tak menerima begitu saja satu pernyataan sebagai benar. Semua diperiksa, dipertanyakan. Hanya yang pasti

---

<sup>1</sup> K. Berteens, *Panorama Filsafat Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 19

kebenarannya yang diterima. Itupun selagi buktinya yang menunjukkan kesalahan belum ditemukan. Kritis berarti selalu menyiapkan pertanyaan pada setiap hal. Melalui bekal pertanyaan yang selalu curiga ini, proses pengetahuan akan terus berjalan. Kenapa? Karena semua pengetahuan baru bermula dari pertanyaan. Ini fungsi yang pertama.

Fungsi kedua, filsafat berguna bagi mahasiswa dalam berpikir secara metodis. Sejak awal filsafat berkembang dari spirit mencari jawaban atas pertanyaan. Jawaban itu dipikirkan ulang, diragukan oleh filsuf selanjutnya, sebagian ada yang diterima namun dengan catatan. Peraguan dan penolakan ini menghasilkan temuan baru. Temuan baru itu tak pernah selamat dari gugatan pemikir selanjutnya. Demikian seterusnya. Itu semua melatih mahasiswa dalam beberapa hal yang berguna dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Beberapa aspek itu adalah (a) kemampuan mengamati sebuah peristiwa (fakta, data, informasi, tindakan, dan semacamnya); (b) kemampuan membuat analisis dan kemudian memberi penjelasan dalam hubungan sebab akibat dengan peristiwa lainnya; (c) kemampuan mengajukan pemecahan masalah; (d) kemampuan membuat prediksi atau ramalan tentang berbagai kemungkinan yang akan timbul serta solusi yang telah diajukan.

Bukankah fungsi ini menarik?

Ketiga, membantu kerja mahasiswa pada saat memasuki dunia kerja. Ini yang lebih penting. Dunia kerja membutuhkan orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah, bukan orang-orang bermasalah. Terbiasa dengan cara berpikir filosofis yang mengajukan pertanyaan untuk menemukan solusi yang telah teruji, membuat pembelajar filsafat dapat (a) melihat masalah (seberapa besar masalahnya, di mana masalahnya, apa dampak masalahnya, dan bagaimana mengatasinya), (b) mampu menemukan sebabnya, akibatnya, dan sekaligus solusinya, (c), menyadari kekeliruan atas pikirannya tanpa

merasa gengsi ---karena salah dalam berfilsafat adalah sinyal untuk menemukan kebenaran yang lebih ajeg.

## Filsafat dan Berpikir Kritis

Filsafat adalah ibu semua ilmu. Itu berarti hanya melalui filsafatlah, suatu ilmu akan berkembang. Tak sekadar ada, berjalan apa adanya, melainkan lebih mendalam dan dibutuhkan. Mari kita lihat relevansi dari pernyataan filsafat sebagai ibu semua ilmu.

Jurgen Habermas, seorang filsuf dari Mazhab Frankfurt, yang mengemukakan adanya keterkaitan antara pengetahuan manusia dengan kepentingan. Habermas pada buku *Knowledge and Human Interest* (1968) membagi ilmu pengetahuan berdasarkan kepentingan. Setiap ilmu tak pernah lepas dari kepentingan. Pemahaman akan kepentingan ini membuat kita jadi tahu ilmu apa yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan kita.

No	Kelompok Ilmu	Tujuan dan Kepentingan
1	Ilmu-ilmu empiris analitis: Ilmu-ilmu alam	<b>Tujuan:</b> mencari hukum alam yang pasti <b>Kepentingan:</b> penguasaan alam (kepentingan kontrol teknis)
2	Ilmu-ilmu historis hermeneutis: ilmu sastra- sejarah	<b>Tujuan:</b> mengungkap makna <b>Kepentingan:</b> perluasan subyektivitas dan komunikasi intersubjektif
3	Ilmu-ilmu tindakan (politik- sosiologi-filsafat-kritik- ideologi)	<b>Tujuan:</b> kehidupan manusia yang lebih baik <b>Kepentingan:</b> emansipasi

Pada table ini terlihat 3 jenis ilmu yang berbeda: empiris-analitis, historis-hermeneutis, dan tindakan. Pada ilmu empiris, basisnya adalah apa yang nyata. Metodenya diurai, dianalisis, dipilah-pilah. Akal manusia dijadikan sebagai menjadi rasio instrumental yang sifatnya manipulatif (merubah x menjadi y), kalkulatif (jika x begini, maka akan dihasilkan y seperti ini), mendominasi alam semesta, dan lupa akan tujuan hidup manusiis sendiri. Ini ditemukan pada ilmu-ilmu

positivisme awal yang berjalan tanpa tanggung jawab kemanusiaan. Diktum ilmu ini adalah “apa yang bisa dilakukan, boleh dilakukan”.

Ilmu historis menempatkan obyek sebagai bagian dari sejarah yang panjang. Keberadaan suatu organisasi bukan apa yang ada-nyata sekarang ini, ada sejarah panjang di belakangnya, ada peristiwa yang terjadi di dalamnya, ada pemikiran dan segala aspek lain yang meliuptinya. Semua yang mengitari organisasi dalam sejarahnya itu membuat jalinan teks yang rumit. Karena rumit, ia tak bisa langsung dipahami secara langsung, melainkan harus dimaknai. Untuk bisa memaknai, kita harus berkomunikasi dengan pelakunya. Seraya memposisikan pelakunya sebagai manusia, bukan sebagai benda-benda yang diukur. Memaknai bukan mengukur, melainkan memahami.

Ilmu Tindakan adalah ilmu yang tak sekadar teori namun terlibat dengan kehidupan. Tak sekadar berkomunikasi demi mendapatkan makna, namun beraksi untuk menghasilkan perubahan. Ilmu seperti ini berniat untuk membebaskan manusia lain atau masyarakat dari penindasan. Apa yang semula diam didorong untuk bisa bergerak dan melawan, itulah makna emansipasi sebagai pemulihan.

Apa konteks dari pembagian Habermas ini?

Pertama, table di atas adalah contoh salah satu kerja filsafat yang mau dan mampu memilah-milah ilmu secara mendalam. Pemilahan ini tak mudah dilakukan. Bagi awam, semua ilmu itu sama. Melalui table ini segera kita tahu bahwa ilmu itu ternyata memiliki kepentingan yang berbeda-beada, ada yang hendak menguasai, berkomunikasi (membuat yang lain bicara), dan ada yang mendorong tumbuhnya emansipasi.

Kedua, Pembagian ilmu dari Habermas ini berguna bagi kita untuk menakar apa yang terjadi pada praktik ilmu administrasi

pendidikan. Pada tahap awal, ketika manajemen ditujukan untuk kepentingan kontrol teknis, administrasi pendidikan memberlakukan cara kerja ilmu empiris-analitis. Semua sumber daya organisasi dianggap sebagai benda yang harus bergerak secara otomatis, saat itu nilai-nilai kemanusiaan diabaikan karena yang penting adalah efektif dan efisien. Pada tahap lanjutan, ketika ilmu administrasi pendidikan mulai mempertimbangkan teori (manusia) administrasi tidak sekadar kontrol teknis melainkan sebagai cara untuk menemukan makna dan emansipasi.

Sebagai pembanding mengenai perkembangan ilmu administrasi yang semakin memanusiawi, rumusan Stephen Covey layak kita baca juga. Covey membuat evolusi paradigma manajemen sebagai berikut:

### Tabel

#### Evolusi Paradigma Manajemen

KEBUTUHAN	METAFOR	PARADIGMA	PRINSIP
Fisik/Ekonomi	Perut	Otoriter, Ilmiah	Keadilan
Sosial/emosional	Hati	Hubungan manusia (otoriter yang baik)	Kebaikan
Psikologis	Pikiran	Sumber daya manusia	Penggunaan & Pengembangan Bakat
Spiritual	Jiwa (manusia seutuhnya)	Kepemimpinan yang berprinsip	Makna

Menurut Stephen Covey dalam *Principle Centered Leadership* keempat paradigma ini adalah pergeseran manajemen dari masa ke masa dan menunjukkan pemahaman manusia mengenai manajemen.

*Pertama, Paradigma manajemen ilmiah.* Paradigma ini memandang manusia terutama sebagai perut (makhluk ekonomi). Motivasi

yang diberikan melalui metode hukuman dan ganjaran (cambuk dan wortel, *carrot and stick*). Kuda dapat bergerak dengan cepat jika di depannya ditawarkan wortel, makanan yang dibutuhkannya; lalu di belakangnya dilecuti oleh cambuk agar ketakutan. Inilah model manajemen atau administrasi awal: beri hadiah di depan untuk memikat dan menyemangati, lalu jangan segan-segan memberikan hukuman di belakang, kemudian pimpin semua orang untuk memperoleh manfaat.

Tugas kepemimpinan adalah mengendalikan, menguasai, terpisah dan berbeda dari yang dipimpin, mengetahui apa yang terbaik. Pemimpin persis seperti kusir pada kuda, yang memiliki tujuan karena itu mengarahkan kuda sesuai dengan tujuan yang dimilikinya. Siapa yang jadi kuda? Tentu saja para karyawan adalah kudanya. Di sini pemimpin mengarahkan ke mana karyawan akan pergi dan diorganisasikan melalui hukuman dan ganjaran. Tentu saja idealnya seorang pemimpin harus adil dengan ganjaran-ganjaran ekonomi dan paket tunjangan. Kesemua kerja kepemimpinan dilakukan oleh seorang pemimpin demi memenuhi kebutuhan perut seseorang.

Asumsi mengenai hakikat manusia yang berhubungan dengan paradigma perut adalah asumsi manusia ekonomi. Artinya bahwa manusia itu terutama termotivasi oleh pencarian akan keamanan ekonomi. Wortel di depan adalah kebutuhan ekonominya, semua orang mengejar kebutuhan perutnya. Semua orang mau bekerja keras demi mendapatkan makanan. Sementara cambuk di belakang adalah kode, jika tak bergerak siksaan akan datang, tak hanya itu pemecatan akan segera diberikan. Demi mendapatkan kebutuhan akan perut, semua orang akan bergerak. Karena itu, seorang pemimpin terus mempergunakan sistem ganjaran dan hukuman. Apabila asumsinya benar, orang akan merespon secara konsisten berdasarkan motivasi untuk mencari nafkah bagi diri mereka sendiri atau untuk menghindari kesengsaraan diri dan keluarganya.

Gaya manajemennya adalah gaya otoriter. Seorang manajer otoriter membuat keputusan dan memberi perintah, dan para karyawan mematuhi dan bekerja sama, melaksanakan dan memberikan kontribusi seperti yang diminta. Melalui cara ini karyawan akan mendapat ganjaran ekonomi berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain –juga selamat dari kesengsaraan tanpa pekerjaan dan penghasilan.

*Kedua, paradigma hubungan manusia.* Kita mengakui bahwa manusia tidak hanya terdiri dari perut, melainkan juga memiliki hati (makhluk sosial) dan perasaan. Karena itu manusia diperlakukan tidak hanya dengan makanan, tetapi dengan kebaikan, penghormatan, kesopanan, dan kesusilaan. Terus-menerus memberikan janji akan ada wortel di depan sambil mencambuki karyawan dengan sejumlah ancaman, tidaklah adil. Manusia harus dihormati sebagaimana manajer atau pemimpin menginginkan penghormatan yang sama.

Ini artinya harus ada perubahan dari otoriter menjadi seorang otoriter yang baik (*benevolent authoritarian*). Otoriter yang baik berarti, pemimpin masih tetap elit yang terpisah dan membedakan diri dari yang dipimpinnnya, namun ia mulai mempertimbangkan kemanusiaan. Pandangan tentang hakekat manusia ini merupakan dasar pergerakan hubungan manusia.

Asumsi pada paradigm ini masih membuat manajemen sangat berkuasa. Manajer atau pemimpinlah yang membuat keputusan-keputusan dan memberi perintah-perintah, tetapi paling tidak para manajer pada paradigm hubungan manusia ini mencoba membentuk tim yang harmonis dan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bekerja bersama untuk mengenal satu sama lain dan bergembira bersama dalam situasi sosial dan rekreasional. Para manajer paradigma ini menampilkan diri menjadi permisif, lunak, dan penurut, karena mereka mempunyai kebutuhan yang tinggi akan harta milik dan popularitas dan tidak suka membebaskan standar ketat apapun

kepada orang lain. Manajer jenis ini berpikir, “Kami ini atau keras atau lunak, kuat atau lemah. Jika kami tidak menggunakan kesempatan, orang lain akan memanfaatkan kami”.

Seorang manajer dalam paradigma ini seperti seorang bapak yang baik yang tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya dan memelihara mereka sepanjang mereka memenuhi keinginan dan harapan-harapannya. Jika anak-anak itu tidak memenuhi harapan si bapak, dia memandang pembangkangan ini sebagai bentuk ketidaksetiaan atau ketidaktahuan terima kasih.

*Ketiga, Paradigma Sumber Daya Manusia.* Keadilan dan kebaikan sebagai prinsip manajemen ditingkatkan lagi. Manusia ternyata tidak hanya perut dan perasaan, melainkan memiliki pikiran. Dengan kata lain manusia adalah makhluk kognitif, makhluk yang berpikir. Dengan pengertian yang lebih luas tentang hakikat manusia ini, manajer mulai memanfaatkan bakat, kreativitas, akal budi, kepintaran, dan imajinasi mereka secara lebih baik.

Pada paradigme ini manajer mulai lebih banyak mendelegasikan sejumlah rencana pada karyawannya. Ia menyadari bahwa manusia akan melakukan apa yang perlu jika karyawannya memahami apa yang dikerjakannya, mempunyai komitmen pada tujuan pekerjaan itu. Manajer pada paradigme mulai memandang manusia sebagai sumber daya yang utama: bukan barang modal, bukan harta milik fisik, tetapi daya manusia (hati, dan pikiran mereka). Manajer mulai mencari jalan untuk menciptakan lingkungan yang optimal, suatu budaya yang memanfaatkan bakat karyawannya serta membebaskan energi kreatifnya. Manajer menyadari bahwa manusia memberikan sumbangan yang berarti. Manajer ingin bahan-bahan diketahui anak buahnya, dikembangkan, digunakan dan diketahui.

Pada paradigma ini manusia dipandang sebagai makhluk psikologis. Artinya, di samping kebutuhan akan keamanan ekonomi dan



keanggotaan sosial, manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang serta menyumbangkan sesuatu secara efektif dan kreatif untuk mencapai tujuan-tujuan yang berharga. Para manajer dengan paradigma ini akan memandang manusia sebagai suatu kesatuan bakat dan kemampuan yang terpendam. Tujuan kepemimpinan adalah mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan ini untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sosial dan psikologis dengan kebutuhan dan keinginan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang serta menggunakan bakat-bakat mereka dengan cara yang kreatif dan konstruktif, maka manajer mencoba menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang-orang menyumbangkan seluruh bakat untuk mencapai tujuan organisasi.

*Keempat, Kepemimpinan yang Berprinsip.* Ini adalah tahap keempat evolusi manajemen. Pada titik ini manusia dianggap sebagai yang memiliki keadilan, kebaikan, efisiensi, dan efektivitas. Manusia dianggap secara utuh, bukan sebagai sumber dan aset, bukan hanya makhluk ekonomi, sosial, dan psikologis. Manusia adalah juga makhluk spiritual, manusia menginginkan makna, perasaan melakukan sesuatu yang berarti. Orang tidak ingin bekerja untuk alasan yang tak berarti, meskipun hal itu menafaatkan kapasitas mental mereka ke tingkat paling tinggi. Harus ada tujuan yang mengangkat manusia (karyawan), memuliakannya, dan membawa mereka ke keberadaan yang tertinggi.

Melalui paradigma ini manajer mengatur orang dengan serangkaian prinsip yang telah terbukti. Prinsip-prinsip ini adalah hukum-hukum alam dan nilai-nilai sosial yang berlaku yang telah menjadi ciri setiap masyarakat besar, setiap peradaban yang bertanggung jawab, selama berabad-abad. Prinsip ini mengemuka dalam bentuk nilai-nilai ide, cita-cita, norma-norma, dan ajaran-ajaran yang meninggikan, memuliakan, memenuhi, memberdayakan, dan memberi inspirasi.

Para manajer memandang manusia memiliki energi, akal budi, dan inisiatif yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh pekerjaan mereka pada suatu saat. Orang ingin menyumbang untuk pencapaian tujuan yang berharga, ingin menjadi bagian dari suatu misi dan usaha yang memberikan makna pada tugas-tugas mereka. Karyawan tidak ingin memiliki pekerjaan yang kurang berarti, meskipun pekerjaan itu mungkin memanfaatkan kemampuan mental mereka. Mereka menginginkan tujuan dan prinsip yang mengangkat mereka, memuliakan, memberi inspirasi kepada mereka, memberdayakan, serta mendorong mereka menjadi lebih baik.

Pandangan tentang hakikat manusia pada paradigma ini lebih luas lagi, bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang mendambakan makna bagi kehidupannya. Para manajer kemudian mencoba mengotomatisasikan pekerjaan-pekerjaan rutin, membosankan, dan berulang-ulang dan memberi kesempatan kepada pekerjanya untuk merasa bangga dengan pekerjaannya. Manajer mendorong munculnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan hal-hal penting lainnya, mencoba memperluas bidang-bidang bagi karyawan-karyawannya untuk dapat menjalankan pengarahannya diri dan pengontrolan diri saat mereka mengembangkan dan menunjukkan pandangannya serta kemampuan yang lebih baik.

Secara sederhana perbedaan keempat manajemen ini dapat digambarkan pada pernyataan berikut ini:

- 1) Paradigma ilmiah (Perut): “Bayarlah saya dengan baik!”
- 2) Paradigma Hubungan Manusia (Hati), “Perlakukanlah saya dengan baik!”
- 3) Paradigma Sumber Daya Manusia (pikiran), “Manfaatkan saya dengan baik!”
- 4) Paradigma Kepemimpinan yang Berprinsip (manusia seutuhnya), “Mari berbicara tentang visi dan misi, peranan, dan tujuan. Saya mau memberikan sumbangan yang berarti!”

Teori Empat Evolusi Paradigma Manajemen Covey ini menunjukkan keberubahan teori manajemen/administrasi yang semakin memfokuskan pada manusia seutuhnya. Kajian tentang manusia seutuhnya adalah salah satu kajian khas filsafat, karena itu kajian filsafat dapat menjadi inspirasi bagi perumusan teori baru administrasi pendidikan.

Baca lagi keempat paradigam dari Covey, lalu bandingkan dengan table dari Habermas.

### **Refleksi: Jadi, Mari Belajar Filsafat....**

Pada bagian prolog telah dikemukakan bagaimana *knowledge management* dapat dikembangkan berdasarkan pada teori filosofis mengenai pengetahuan dari Michael Polanyi. Contoh kaitan antara Polanyi dan Knowledge Management merupakan salah satu bukti bahwa kajian filsafat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi/manajemen. Hal lain yang dapat dikembangkan dari filsafat bagi ilmu administrasi pendidikan adalah bidang studi analisis kebijakan pendidikan yang dapat juga menerapkan kajian filsafat mengenai hermeneutika atau studi kuasa-nya Michel Foucault.

Pada bagian-bagian berikutnya, kita akan menemukan hubungan yang jelas antara filsafat dan ilmu Administrasi/Pendidikan. Seperti hubungan konsep rasio instrumental dengan teori birokrasi Weber, hubungan polemik teori filsafat ekonomi versus filsafat negara dalam pengurusan ruang publik yang berpengaruh pada perbedaan ilmu administrasi dan Ilmu manajemen, dan sebagainya.

## 2

# MEMAHAMI ILMU ADMINISTRASI

Lalu bagaimana hubungan filsafat dengan administrasi pendidikan?

Untuk membicarakan masalah ini, ada baiknya dikemukakan asumsi yang mendasari administrasi. Orin B. Graff, dkk., dalam *Philosophic theory & practice in educational administration* (1966) mengemukakan sejumlah asumsi perlunya filsafat bagi administrasi di antaranya:

*Haruskah para administrator memandang fungsinya sebatas memimpin institusi pendidikan dalam menghadapi persoalan-persoalan perubahan tersebut atau haruskah ia melihat fungsi utamanya untuk fokus pada pemecahan masalah, serta membentuk dan mengarahkan perubahan? Jawaban atas persoalan tersebut akan bergantung pada pilihan sandaran filosofis seseorang perihal hakikat realitas, manusia dan masyarakat. (Orin B Graff, dkk, *Philosophic Theory & Practice in Educational Administration*, 1954)*

Tugas seorang administrator, bagi Graff, tidak sekadar *memimpin institusi pendidikan dalam menghadapi persoalan-persoalan peruba-*

han melainkan juga fokus pada (1) pemecahan masalah, (2) membentuk, dan (3) mengarahkan perubahan. Lalu tentang bagaimana melaksanakan ketiga fokus itu, bagi Graff, tergantung pada pilihan sandaran filosofis seorang administrator perihal hakikat realitas, manusia dan masyarakat.

Kenapa begitu? Kenapa pemecahan masalah membutuhkan sandaran filosofis?

Filsafat adalah dasar dalam memahami realitas. Seperti pada pemikiran Habermas, jika filosofisnya manusia hanyalah perut maka pemimpin hanya akan memikirkan penyediaan makanan tanpa mempedulikan hati dan pikirannya. Inilah yang disebut sandaran filosofis, yakni cara kita memandang hakikat dari sesuatu. Seorang pemimpin membutuhkan sandaran filosofis ini.

Graff meyakini bahwa pilihan sandaran filosofis sangat memengaruhi seorang administrator dalam mengajukan pertanyaan mengenai:

- *Apa masalah yang dapat diketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya?*
- *Masalah-masalah apa yang ada dan bagaimana hubungannya satu sama lain?*
- *Apakah "pendapat-pendapat (teori, konsep) tentang penyelesaian masalah" yang telah diterima untuk dicobaterapkan, yang ukuran-ukuran dan nilainya telah digunakan?*
- *Apakah asumsi-asumsi dari "pendapat-pendapat (teori, konsep) tentang penyelesaian masalah"?*

Sebelum lebih jauh membicarakan urgensi filsafat bagi ilmu administrasi, ada baiknya kita membicarakan apa itu ilmu administrasi. Kenapa kita harus membicarakan ilmu Administrasi? Jawaban sederhananya adalah bagaimanapun ilmu administrasi pendidikan

merupakan bagian dari Ilmu Administrasi pada umumnya.

## ILMU ADMINISTRASI

Seperti judul buku ini, bagian ini juga menuliskan administrasi/pendidikan. Maksudnya adalah bahwa buku ini hendak membicarakan administrasi secara umum lalu dikhususkan untuk administrasi pendidikan.

Administrasi dalam pemahaman awam adalah “kegiatan ketatausahaan” atau “kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis semua keterangan yang diperoleh dan diperlukan mengenai hubungannya satu sama lain”. Singkatnya, administrasi adalah “kegiatan pencatatan” atau “surat-menyurat”. Pemahaman ini tak keliru, walaupun terlalu sempit. Pemahaman seperti ini berasal dari makna “*administratite*” dalam bahasa Belanda. Namun administrasi yang kita bicarakan lebih luas dari istilah Belanda ini. Administrasi yang kita bicarakan adalah kegiatan “melayani secara intensif”.

Administrasi bila dirujuk dari bahasa Inggris memang menunjukkan arti yang lebih luas dari bahasa Belandanya. Kata *administer* merupakan gabungan dari *ad* (yang berarti intensif) dan *minister* (yang berarti melayani, membantu dan memenuhi). Jadi dari segi asal muasal bahasanya saja administrasi itu memiliki arti yang luar biasa mulia, yakni “kegiatan melayani secara intensif”. Dalam hal ini administrasi pendidikan memiliki makna “melayani kegiatan persekolahan atau pendidikan secara intensif”.

Siapa yang harus dilayani?

Untuk menjawab itu mari kita lihat apa yang terjadi di sebuah rumah makan. Yang dilayani di rumah makan adalah pembeli (pelanggan atau pembeli sekadar lewat), untuk itu disediakan pelayan yang sigap dan tanggap. Agar pelayan dapat melayani pelanggan dengan

baik maka pemilik rumah makan itu akan memberikan gaji yang memadai, penghargaan yang baik, dan pelatihan yang sesuai bagi karyawan pelayan rumah makan itu. Dalam arti administrasi, pemilik rumah makan ini pun “melayani” karyawannya. Dengan cara ini, tujuan pemilik rumah makan agar rumah makannya laris dapat tercapai dan mendapatkan keuntungan.

Sekolah atau pendidikan pun demikian. Pelanggan pendidikan (yang mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha) adalah siswa dan orang tua siswa; merekalah yang terutama harus dilayani secara intensif. Hanya itu? Tentu saja tidak. Ada lagi yang harus dilayani oleh manajer sekolah, yakni guru dan tenaga kependidikan.

Namun masalahnya tidaklah sesederhana itu, pendidikan memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Pada kegiatan pendidikan kegiatannya tidak sesederhana menyediakan makanan dengan sejumlah menu, yang selesai dengan terpenuhinya selera dan rasa kenyang. Pendidikan berhubungan dengan perubahan diri manusia sesuai dengan nilai tertentu. Nilai tersebut dapat berasal kepentingan masyarakat, agama atau ideologi, negara, dunia usaha, atau pribadi siswa dan orang tuanya. Mengorganisasikan sejumlah tujuan ini tentulah tidak sederhana. Untuk itu diperlukan administrasi.

Kembali pada rumah makan. Begitu makanan disajikan pelanggan tinggal mengunyahnya dan sesekali mengajukan komplain jika ada menu yang tidak sesuai atau ada alat dan sejenisnya. Setelah mereka makan, dapat dipastikan semuanya merasa kenyang dan relatif terpuaskan selernya. Menyajikan pengajaran di sekolah tidaklah demikian. Begitu pelajaran disajikan, sekolah harus memastikan bahwa pelanggannya dapat “mengunyah” dengan baik dan kalau bisa mendapatkan hasil yang sama (sama cerdas, sama sikapnya, sama perilakunya, juga sama pekerjaan dan gajinya). Tentu tak sesederhana itu. Siswa yang sama, di kelas yang sama, dengan guru yang sama, juga dengan metode yang sama tidak serta merta menghasilkan yang

sama. Inilah rumitnya. Keberhasilan siswa ditentukan oleh terlalu banyak faktor, tidak hanya tergantung pada bagaimana guru mengajar namun juga tergantung pada potensi kecerdasan masing-masing siswa, kondisi ketenteraman rumah tangga siswa, informasi lain yang diterima, motivasi yang berlainan, dan sejenisnya.

Di titik ini sudah terlihat kerumitannya.

Pada satu sisi ada banyak tuntutan nilai untuk tujuan pendidikan, pada sisi lain ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Sementara itu, idealnya semua peserta didik mencapai kemampuan yang relatif sama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sekarang mari kita bayangkan suatu sekolah.

Di dalamnya terdapat sejumlah siswa (dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain), sejumlah guru (dengan karakter yang juga berbeda-beda), tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Jika yang harus dilayani adalah siswa maka semua pihak harus melayani siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun para guru dan tenaga kependidikan bukanlah mesin yang siap sedia secara otomatis memberikan pelayanan yang sama kapan saja di mana saja. Para guru bisa saja jenuh, karenanya mengajar secara serampangan, tanpa rencana dan cenderung asal “masuk kelas”. Tenaga kependidikan bisa saja bosan melakukan hal yang itu-itu saja, lalu mereka tidak merasa ikut bertanggung jawab kepada hasil akhir siswa di sekolah itu. Lalu secara bersamaan, ada masalah-masalah lain yang harus ditangani seperti kekurangan alat tulis, SPP yang macet, gedung yang hampir roboh, buku ajar yang terbatas, tekanan pemerintah agar mencapai prestasi tertentu, dan sejenisnya.

Jadi praktek pendidikan tak sesederhana melayani rumah makan. Praktek pendidikan juga tak semudah aktivitas seorang guru mengajari satu muridnya. Ada banyak aspek yang harus dikelola dan



harus dicarikan penyelesaian problemnya. Ada banyak juga yang harus dilayani. Pada situasi seperti inilah kegiatan administrasi diperlukan.

Sekali lagi administrasi adalah aktivitas “melayani secara intensif”. Kata intensif di sini berarti “secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal”.

## **SEJARAH ILMU ADMINISTRASI**

Kegiatan pengkoordinasian interaksi manusia pastilah sudah terjadi semenjak manusia ada. Peradaban-peradaban kuno secara niscaya memiliki teknis pengaturan tertentu, jadi kegiatan administrasi sudah dimulai ketika ada dua orang atau lebih hidup secara bersama-sama. Namun, dalam literatur Barat, awal sekali munculnya ilmu administrasi terjadi pada revolusi industri di Inggris pada abad 18. Yaitu ketika muncul sejumlah pabrik yang mengelola sumberdaya alam (sebagai bahan industri) dan sumber daya manusia sebagai pekerjanya. Untuk dapat mencapai hasil maksimum dibutuhkan pengelolaan secara sistematis.

### **Dari Sekop Taylor Lahirlah Manajemen Saintifik**

Di *Bethlehem Steel Company*, lelaki itu menjadi insinyur *scientific-management*. Ia harus mengondisikan perusahaannya agar mendapat keuntungan. Ia melihat buruh yang gampang kecapekan. Setelah mengangkat besi kasar 12 ½ ton ke dalam truk, mereka kecapekan dan tidak bisa mengerjakan hal lain lagi.

Lelaki itu penasaran. Ia membuat penyelidikan ilmiah tentang segala factor kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya ia menyatakan baha sebenarnya para pekerja dapat mengangkut bukan hanya 12 ½ ton besi kasar setiap hari, tetapi 47 ton setiap harinya. Ia juga menemukan kesimpulan bahwa mereka dapat bekerja

empat kali lebih banyak tanpa merasa capek. Tapi coba buktikan.

Sebagai kelinci percobaan, Insinyur itu memilih Schmidt. Orang ini harus bekerja dengan menggunakan stopwatch. Ia bekerja menurut instruksi yang diberikan seseorang, "Sekarang angkat besi itu dan berjalanlah... Saatnya duduk dan beristirahat... sekarang jalan lagi... Nah, istirahatlah!"

Bagaimana hasilnya?

Schmidt dapat mengangkat besi kasar empat puluh ton sehari, sedangkan pekerja yang lain hanya mampu mengangkat 12 ½ ton. Lelaki itu bekerja di Bethlehem selama tiga tahun. Selama itu Schmidt dapat bekerja dengan baik sekali, sebab ia beristirahat sebelum merasa lelah. Setiap jamnya ia bekerja 26 menit dan beristirahat selama 34 menit. Istirahatnya memang lebih banyak daripada kerjanya, tetapi kenyataannya ia dapat menghasilkan hampir 4 kali lipat lebih banyak daripada rekan-rekannya yang lain.

Lelaki itu adalah Frederick Winslow Taylor (1856-1915), yang kemudian dikenal sebagai bapak Manajemen. Ia menuliskan kisah eksperimennya ini pada buku *Principles of Scientific Management*, hal 41-62.

Taylor adalah bapak Ilmu manajemen karena ia mulai mengatur pembagian kerja berdasarkan ilmu pengetahuan. Ihwal pembagian kerja sebenarnya sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum Taylor. Adam Smith, pada tahun 1776, telah membicarakannya dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*). Pada buku ini ia mengemukakan bahwa keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi, perusahaan terdapat dari pembagian kerja, (*division of labor*). Pembagian kerja yang baik dimulai dari perincian satu pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih detail. Adam Smith pada buku ini mencontohkan sebuah pembuatan peniti pada pabrik,

sepuluh orang yang melakukan pekerjaan khusus (berdasarkan rincian yang telah ditentukan) secara bersama-sama dapat menghasilkan peniti 48.000 peniti sehari. Namun ketika masing-masing dari sepuluh orang tersebut diminta membuat peniti sendiri-sendiri maka jumlah peniti maksimal yang mereka hasilkan hanyalah sepuluh peniti perhari. Di sini Adam Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja akan dapat meningkatkan produktifitas, pembagian kerja juga akan mendorong para pekerja dapat meningkatkan keterampilan dan kecekatannya masing-masing.

Adam Smith adalah bapak ekonomi yang meletakkan dasar bagaimana menaikkan produktivitas suatu perusahaan, juga Negara. Selain modal, pembagian kerja diyakini dapat meningkatkan produktivitas di samping penghematan biaya kerja. Pembagian kerja secara sederhana membicarakan ihwal “siapa mengerjakan apa”. Melalui prinsip ini Smith sedang menegaskan perlunya spesialisasi pada masing-masing pekerja. Smith meyakini pembagian pekerjaan (Devison Labor) dengan disertai spesialisasi dapat menyebabkan kenaikan kecakapan para pekerja (karena semakin terlatih pada satu bidang), mengurangi waktu, dan dapat mendorong penemuan mesin-mesin dan peralatan yang lebih baik (Inovasi).

Demi penghematan biaya dan naiknya produktivitas ini, Smith bahkan mengusulkan penggunaan pekerja wanita dan anak-anak yang tentu saja memiliki ketrampilan rendah. Para buruh wanita dan anak-anak dengan keterampilan rendah tentu dibayar dengan gaji kecil, sehingga biaya dapat ditekan. Tentu saja pekerja murah ini hanya mengerjakan bagian-bagian tertentu atau mengerjakan pekerjaan yang kurang penting saja.

Taylor melakukan terobosan penting dalam teori pembagian kerja ini, bahkan kemudian meletakkan dasar-dasar manajemen sebagai ilmu. Taylor memang seorang insinyur yang melakukan semua proses pengaturan kerja berdasarkan riset. Untuk meningkatkan kerja

buruh yang menggunakan sekop untuk memindahkan barang saja ia melakukan eksperimen serius. Pada tahun 1898, Taylor melakukan eksperimen penyekopan di *Bethlehem Steel Corporation*. Tujuan dari percobaan tersebut adalah untuk menemukan secara tepat berapa berat sekop yang paling cocok untuk diangkat oleh buruh dalam periode waktu kerja tertentu tanpa mengakibatkan kelelahan fisik yang berlebihan.

Taylor dari eksperimennya kemudian menemukan bahwa sekop seberat 21,4 pon dapat menghasilkan jumlah penyekopan tiap hari yang maksimum. Disamping itu, Taylor juga melakukan standarisasi metode penyekopan dan berat material yang diangkat, untuk menemukan gerakan yang menyebabkan tingkat kelelahan paling kecil. walaupun, konsep pemikiran ini belum teruji, karena tidak ada rekaman data yang dapat menunjukkan perbedaan efektivitas penggunaan sekop, namun hasil dari percobaan ilmiah ini menghasilkan kesimpulan tentang perlunya sekop yang berbeda bagi tiap pekerja, tergantung pada jenis dan berat material yang diangkat (batubara, besi scrap, atau lembaran kayu).

Dari eksperimen ini Taylor juga menemukan bahwa terdapat pemborosan waktu kerja di *Bethlehem Steel Works*, yang disebabkan oleh seringnya pekerja untuk mengambil alat dan perlengkapan serta material di gudang yang berjarak terlalu jauh. Untuk itu, ia merekomendasikan untuk memperbaiki tata letak pabrik, membuat kartu instruksi pekerja dengan catatan indikasi tipe peralatan yang dibutuhkan, dan rekomendasi untuk membangun sebuah pusat gedung untuk perawatan dan pemeriksaan alat. Penerapan perbaikan tersebut memberikan implikasi efisiensi berupa penurunan jumlah pekerja yang dibutuhkan dari 400-600 pekerja menjadi 140 pekerja untuk menangani beban kerja yang sama, sehingga biaya tenaga kerja dapat dihemat sebesar \$ 78.000 tiap tahun.

Saat hidup Taylor adalah saat mulai berkembangnya Revolusi

Industri di Inggris. Saat itu mesin mulai digunakan menggantikan tenaga manusia. Pabrik didirikan, kegiatan produksi yang semula di rumah-rumah berpindah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan kebutuhan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku untuk produksi, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain.

Taylor bekerja untuk membantu memecahkan masalah-masalah pabrik agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu ia tidak hanya mengatur, melainkan melakukan penelitian, bahkan eksperimen. Dari eksperimennya ia menyimpulkan perlunya waktu istirahat bagi para pekerja. Dari risetnya ini ia mengemukakan 4 prinsip dasar pengaturan:

1. *Develop a science for each element of a man's work, which replaces the old rule of thumb method*
2. *Select scientifically and then train, teach, and develop the workman, whereas previously he chose his own work methods and trained himself as best as he could*
3. *Cooperate heartily with the men so as to ensure that all of the work being done is in accordance with the principles of the science which has been develop*
4. *There is almost an equal division of the work and the responsibility between management and the workmen. The management takes over all work for which they are better fitted than the workman.*

Terjemahan bebasnya kira-kira

1. Kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang, yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan.

2. Ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, pelajirlah atau kembangkanlah pekerja tersebut [sebelumnya, para pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri semampu mereka].
3. Bekerjasamalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi
4. Bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara merata antara manajemen dan para pekerja. Manajemen mengambil alih, semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya daripada bagi para pekerja [sebelumnya: hampir semua pekerjaan serta sebagian besar tanggung jawab dilemparkan ke pundak para pekerja]

Empat prinsip manajemen ilmiah merupakan sebuah “Revolusi Mental” yang memperbaiki cara bekerja dan hubungan antara buruh dan manajer, sehingga buruh memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan kerjanya dan memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik, dengan cara menentukan metode dan output produksi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, tanpa adanya kelelahan yang harus dialami buruh. Taylor adalah orang yang pertama kali menganjurkan untuk memberikan kelonggaran (*allowance*) waktu kerja dan jam istirahat bagi buruh untuk meningkatkan produktivitas kerja

Peter Drucker, dalam buku *The Age of Discontinuity*, menyatakan bahwa konsep produktivitas kerja tidak memiliki arti apapun, sebelum para insinyur teknik industri –seperti Taylor-- menemukan cara untuk mengukur produktivitas tersebut. Drucker mengamati bahwa Taylor melakukan terobosan dengan cara melakukan edukasi kepada pekerja sehingga dapat melakukan pekerjaan manual sesuai dengan standar yang telah dibuat dengan *scientific management*. Sebelumnya sebuah pekerjaan diyakini sebagai suatu hal yang tidak dapat diubah (*given by God or by nature*), sehingga untuk meningkatkan produktivitas kerja dibutuhkan kerja yang lebih

keras. Menurut Taylor, hal tersebut adalah salah, karena sebenarnya sebuah pekerjaan dapat dirancang secara ilmiah dan pekerja dapat dilatih untuk mengimplementasikan rancangan kerja tersebut.

Dari sini, Taylor berpendapat bahwa kunci dari peningkatan produktivitas kerja adalah ilmu pengetahuan bukan keringat, atau dikenal dengan istilah *work smarter, don't work harder*. Untuk itulah Peter Drucker menyebut peningkatan produktivitas dan pendapatan versi Taylor dengan istilah *knowledge economy*.

Pada tahun 1912, Taylor berpidato dihadapan komite khusus dari *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat) yang menguji konsep ajaran Taylor. Taylor saat itu berkata bahwa

*“Scientific management* bukanlah suatu alat untuk mengejar efisiensi, yang berfungsi untuk menjaga efisiensi, juga bukan sekelompok alat untuk menciptakan efisiensi. ini bukan suatu sistem yang baru untuk menghitung biaya, bukan skema yang baru untuk menghitung gaji pegawai. Ini bukanlah sistem bonus, sistem premium, dan tidak terdapat skema untuk pembayaran pegawai, bukan juga mengatur waktu tiap pekerja dan menuliskan sesuatu tentangnya, juga bukan *time study, motion study* ataupun *motion analysis*. Ini juga bukan tentang mencetak dan mengatur satu atau dua ton orang yang buta terhadap sistem dan mengatakan “ Ini dia sistemmu, sekarang terapkan” Sistem ini bukan tentang membedakan antara mandor biasa dan mandor yang fungsional, Ini juga bukan suatu alat yang mana pekerja dengan kemampuan rata-rata terangkat kemampuannya. Pekerja dengan kemampuan rata-rata akan berpikir satu atau dua kali ketika dia mendengar kata *scientific management*. Saya tidak menemukan sistem untuk pengaturan biaya, pada *time study*, pada pekerja fungsional dan apapun tentang pembayaran gaji pekerja

ataupun tentang efisiensi kalau memang *scientific management* ini adalah alat yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi. Saya percaya mereka, tetapi apa yang saya yakini bahwa alat tersebut bukanlah *scientific management*, hal tersebut berguna untuk menjembatani kearah *scientific management*, sehingga hal tersebut juga berguna untuk menjembatani sistem manajemen yang lain.(Taylor 1947)”.

Dari sinilah *Scientific management* berkembang sebagai paradigma berpikir untuk memperbaiki cara bekerja dan memperbaiki hubungan antara buruh dan manajer, sehingga buruh memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan kerjanya dan memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik, dengan cara merancang metode kerja dan menentukan output produksi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, tanpa adanya kelelahan yang harus dialami buruh.

Karena itu, prinsip-prinsip *scientific management* bukan untuk melakukan efisiensi kerja atau meningkatkan pendapatan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja, melainkan dari rasa simpati sosial dari sebuah konflik antara tenaga kerja dan pemilik modal. *Scientific management* memiliki perhatian pada perancangan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitas tenaga kerja, sistem pengupahan yang adil sesuai dengan kontribusi pekerja, sehingga sehingga mencegah terjadinya kerja rodi.

Dari 4 prinsip dasar manajemen Taylor ini kemudian berkembanglah Ilmu Manajemen.

Pekerjaan tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan pekerja dan produktivitas pabrik. Pengaturan dunia kerja, mulai saat itu, tidak lagi dilakukan berdasarkan kebiasaan, melainkan berdasarkan riset yang mendalam, pemahaman atas kebutuhan dan kemampuan



pekerja, atau berdasarkan ilmu.

*Work smarter, don't work harder*

Dari sinilah kita mulai menemukan pintu masuk pada ilmu manajemen

Di samping Taylor sebenarnya ada tokoh lain yang memikirkan pekerja, yakni **Robert Owen (1771 -1858)** dan **Charles Babbage**.

Apa peran penting Robert Owen?

Abad saat Owen dan Taylor hidup adalah abad Revolusi Industri, saat munculnya mesin-mesin yang menggantikan tenaga kerja manusia. Tujuannya mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Owen saat itu menemukan praktek-praktek memperkerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Tersentuh dengan kondisi kerja yang amat menyedihkan itu, beliau mengajukan perbaikan. Keinginan mendapatkan maksimalisasi keuntungan tidak seharusnya mengorbankan anak-anak. Owen sudah mulai memikirkan bahwa investasi yang penting bagi manajer adalah sumber daya manusia. Karena itu manusia –apalagi anak-anak—jangan diperas bekerja sampai 13 jam sehari.

Owen mengusulkan perbaikan kondisi kerja dengan membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas, seperti prosedur penilaian kerja dan bersaing juga secara terbuka. Pada sisi lain Owen mengajukan perbaikan sistem kerja demi produktivitas seperti menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan hidup karyawan dengan harga yang layak, dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat karyawan tinggal, dengan membangun rumah-rumah dan membuat jalan, sehingga lingkungan hidup dan pabrik rnenjadi menarik. Semua usaha ini menjadikan Owen disebut sebagai "Bapak Personal Mana-

jemen Modem".

**Charles Babbage (1792 -1871)** adalah seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada operasional suatu pabrik, dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah agar terwujud peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat kalkulator.

Babbage tertarik pada prinsip efisiensi dalam pembagian tugas dan perkembangan prinsip-prinsip ilmiah, untuk menentukan seorang manajer harus mendayagunakan fasilitas, bahan, dan tenaga kerja supaya mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Di samping itu Babbage sangat memperhatikan faktor manusia, dia menyarankan sebaiknya ada semacam sistem pembagian keuntungan antara pekerja dan pemilik pabrik, sehingga para pekerja memperoleh bagian keuntungan pabrik, apabila mereka ikut menyumbang dalam peningkatan produktivitas. Ia menyarankan para pekerja selayaknya menerima pembayaran tetap atas dasar sifat pekerjaan mereka, ditambahkan dengan pembagian keuntungan, dan bonus untuk setiap saran yang mereka berikan dalam meningkatkan produktivitas.

**Taylor, Owen dan Babbage** berupaya menemukan cara terbaik melalui metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Cara ilmiah yang diusulkan Taylor terbukti jauh lebih baik dibandingkan dengan cara pengelolaan lama. Walaupun mereka lupa bahwa manusia bukanlah mesin, namun spirit zaman itu adalah 'semua harus seefektif dan seefisien mesin'. Cara berpikir mesin ini disebut *Internal Process Model*, yakni model yang mengandalkan stabilitas dan kontrol melalui koordinasi dan kontrol semua kegiatan (Tompkins, 2005). Model ini memiliki tujuan menghasilkan efisiensi dan produktivitas melalui perencanaan, penetapan, dan evaluasi (Tompkins,

2005).

Model ini masih terus dikembangkan oleh **Henry Fayol (1861 - 1919)**, dan **Max Weber**

**Henry Fayol (1841 -1925)**. berkeyakinan keberhasilan para manajer tidak hanya ditentukan oleh mutu pribadi manajernya, tetapi karena adanya penggunaan metode manajemen yang tepat. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 bidang kerja (teknis, komersial, finansial, keamanan, akuntansi, manajerial):

1. Kegiatan Teknis (produksi) yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi.
2. Kegiatan komersial (Jual, beli, Pertukaran) dengan tara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi.
3. Kegiatan finansial(pencarian dan penggunaan optimum atas modal) berusaha mendapatkan dan menggunakan modal.
4. Kegiatan Keamanan (perlindungan harga milik dan manusia) berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan.
5. Kegiatan Akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca, serta berbagai data statistik.
6. Kegiatan Manajerial yang terdiri dari 5 fungsi, (a) Perencanaan (*planning*) merencanakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dengan tepat, (b) *Organizing*: memobilisasikan sumberdaya manusia dan material organisasi; (c) *Commanding*: mengarahkan dan memotivasi para anggota organisasi; (d) *Coordinating*: menyelaraskan kegiatan berbagai unit agar tidak terjadi duplikasi, dan saling negasi; dan (e) *Controlling*: mengawasi jalannya rencana agar selalu sesuai dengan apa yang direncanakan.

Proses manajerial dari perencanaan sampai pengontrolan ini begitu terkenal sehingga dijadikan ciri utama dari aktivitas manajerial. Sejumlah ilmuwan manajemen kemudian berupaya menerapkan dan memodifikasi 5 fungsi manajerial Fayol ini. Misalnya, Gullick yang mengajukan 7 tahap administrasi: perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pengarahan, koordinasi, penganggaran dan pengontrolan (POSDCORB); atau Edward Deming dengan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).

Selain hal-hal pokok diatas, masih ada beberapa ajaran Fayol lainnya yaitu:

1. Keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat padatingkatan organisasi, yang rendah lebih membutuhkan keterampilan dankemampuan teknis dibandingkan dengan keterampilan manajerial pada manajeringkat atas.
2. Kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari, sehingga tidak mungkin hanya diperoleh melalui praktek, timbul tenggelamseperti orang belajar menyelam tanpa guru.
3. Kernampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan pada segala bentukdan jenis organisasi, seperti rumah tangga, pemerintah, partai, industri dan lainlain.
4. Prinsip-prinsip manajemen lebih baik daripada hukum manajemen, karena hukum bersifat kaku, sedang prinsip bersifat lebih luwes, sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi.

Kemudian yang terpenting adalah Fayol mengemukakan 14 macam prinsip manajemen, yaitu:

- 1) Pembagian kerja (*Division of labor*), yaitu sernakin mengkhusus manusia dalam pekerjaannya, semakin efisien kerjanya, seperti terdapat pada ban berjalan.
- 2) Otoritas dan tanggung jawab (*Authority and Responsibility*)

diperoleh melalui perintah dan untuk dapat memberi perintah haruslah dengan wewenang formil. Walaupun demikian wewenang pribadi dapat memaksa kepatuhan orang lain.

- 3) Disiplin (*discipline*), dalam arti kepatuhan anggota organisasi terhadap aturan dan kesempatan. Kepemimpinan yang baik berperan penting bagi kepatuhan ini dan juga kesepakatan yang adil, seperti penghargaan terhadap prestasi serta penerapan sanksi hukum secara adil terhadap yang menyimpang.
- 4) Kesatuan komando (*Unity of command*), yang berarti setiap karyawan hanya menerima perintah kerja dari satu orang dan apabila perintah itu datangnya dari dua orang atasan atau lebih akan timbul pertentangan perintah dan kerancuan wewenang yang harus dipatuhi.
- 5) Kesatuan pengarahan (*unity of Direction*), dalam arti sekelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama yang harus dipimpin oleh seorang manajer dengan satu rencana kerja.
- 6) Menomorduakan kepentingan perorangan terhadap terhadap kepentingan umum (*Subordination of Individual interest to general interes*), yaitu kepentingan perorangan dikalahkan terhadap kepentingan organisasi sebagai satu keseluruhan.
- 7) Renumerasi Personil (*Remuneration of personnel*), dalam arti imbalan yang adil bagi karyawan dan pengusaha.
- 8) Sentralisasi (*Centralisation*), dalam arti bahwa tanggung jawab akhir terletak pada atasan dengan tetap memberi wewenang memutuskan kepada bawahan sesuai kebutuhan, sehingga kemungkinan adanya desentralisasi.
- 9) Rantai Skalar (*Scalar Chain*), dalam arti adanya garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas sampai ke tingkat terendah seperti tergambar pada bagan organisasi.
- 10) Tata-tertib (*Order*), dalam arti terbitnya penempatan barang dan orang pada tempat dan waktu yang tepat.
- 11) Keadilan (*Equity*), yaitu adanya sikap persaudaraan keadilan

- para manajer terhadap bawahannya.
- 12) Stabilitas masa jabatan (*Stability of Penure of Personal*) dalam arti tidak banyak pergantian karyawan yang ke luar masuk organisasi.
  - 13) Inisiatif (*Initiative*), dengan memberi kebebasan kepada bawahan untuk berprakarsa dalam menyelesaikan pekerjaannya walaupun akan terjadi kesalahan-kesalahan.
  - 14) Semangat Korps (*Esprit de Corps*), dalam arti meningkatkan semangat berkelompok dan bersatu dengan lebih banyak menggunakan komunikasi langsung daripada komunikasi formal dan tertulis.

Prinsip-prinsip dan kegiatan manajemen ini mengandaikan organisasi sebagai ruang tertutup yang bebas nilai dan tidak berkaitan dengan lingkungan. Seperti mesin yang tak peduli lingkungannya, begitulah cara pandang manajemen klasik ini terhadap sumber daya manusia. Seperti dikemukakan Covey pada bab sebelumnya tujuan dari manajemen ini bersifat ekonomi semata, yaitu peningkatan produktivitas. Lalu kerja manajemen adalah menghadirkan satu cara terbaik (*one best way*) untuk meraih produksi yang lebih tinggi. Semua tokoh di atas, melalui cara-cara keilmuan yang bersifat sistematis, merumuskan prinsip-prinsip yang mendorong produktivitas. Seraya tokoh-tokoh ini melihat bahwa hanya melalui aplikasi prinsip-prinsip mereka, keberhasilan organisasi dan manajemen niscaya tercapai.

Tetapi apakah manusia itu seperti mesin?

### **Manajemen dalam *Model Human Relations*.**

Manusia pasti bukanlah mesin, tidak terbuat dari besi atau benda-benda yang saling diam satu sama lain. Untuk bisa memahaminya mari kita bayangkan sepeda motor. Ada banyak penyusun yang membuat sepeda motor itu bisa berfungsi. Semuanya dari

benda yang memiliki fungsi spesifik, berdekatan dan terhubung, sehingga kerja yang satu mempengaruhi yang lain dalam mencapai tujuan. Semua penyusun sepeda motor hanya bekerja sama saat bekerja, saat mesinnya dinyalakan. Di luar itu, masing-masing alat-alat penyusun mesin itu saling diam.

Itulah idela yang dibayangkan dari Manajemen Klasik. Semua pekerja bekerja sesuai fungsinya masing-masing, netral. Di luar waktu kerja, tak ada hubungan apapun.

Ini mustahil. Manusia bukan benda. Manusia tersenyum, saling melirik, dan mungkin tertarik. Manusia juga bisa cemberut, kesal, lalu marah. Semua perasaan itu bisa terjadi di luar tempat kerja dan di dalam tempat kerja. Semua perubahan perasaan itu bisa mempengaruhi proses kerja.

Pertimbangan ini mulai dipertimbangkan pada perkembangan Ilmu manajemen dan administrasi. Pada tahap ini, karakter dan hubungan manusiawi mulai dipertimbangkan sebagai aspek penting dalam organisasi. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu para manajer perlu dibantu dalam menghadapi pekerja sebagai manusia. Pada tahap ini, Ilmu sosiologi dan psikologi mulai digunakan dalam mempelajari kerja manajemen dan administrasi.

Ada tiga orang pelopor aliran perilaku yaitu Hugo Munsterberg, Oliver Sheldon, Elton Mayo, dan William Ouchi.

**Hugo Munsterberg** (1863-1916) adalah yang pertama mempertimbangkan aspek psikologis manusiawi dalam meningkatkan produktivitas. Untuk itu, ia disebut sebagai Bapak Psikologi Industri. Pada buku *Psychology and Industrial Efficiency* ia mengajukan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Pertama, tempatkan pekerja terbaik sesuai dengan bidangnya: tempatkan manusia sesuai kema-

mpuan terbaiknya pada pekerjaan yang cocok. Kedua, ciptakan suasana tempat kerja dan tata kerja terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis. Manusia bukan mesin, manusia memiliki perasaan yang harus diperhatikan. Tempat kerja harus mendorong tumbuhnya perasaan betah dan bahagia. Ketiga, gunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong produktivitas karyawan.

Selain Munsterberg ada tokoh lain yang mulai mempertimbangkan pendekatan relasi antar manusia dalam administrasi, yaitu Oliver Sheldon (1894 -1951).

Setelah Sheldon, pemikiran M. P. Follet (1868-1933) dapat diposisikan di sini. Follet mengusulkan pekerja diperlakukan secara manusiawi, diberdayakan kelompok kerjanya, dan kekuasaan, otoritas serta kontrol diterapkan sesuai situasi dan kondisi. Perlakuan manusiawi terhadap pekerja ini, bagi Follet, dapat mendorong pencapaian tujuan manajemen. Dari gagasan Follet ini kemudian menginspirasi E. Mayo dan F. J. Roethlisberger mengenai perlunya hubungan informal organisasi antara anggota organisasi dalam peningkatan produktivitas kerja. Pekerja dengan pekerja lain terhubung tidak seperti bagian mesin, melainkan terkait secara manusiawi.

**Elton Mayo (1880-1949)** memperkenalkan perlunya hubungan timbal balik antara manajer dan bawahan sehingga mereka secara serasi dapat mewujudkan kerjasama yang memuaskan, dan akan tercipta semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Mayo sudah menyimpulkan bahwa rangsangan uang saja tidak menyebabkan membaiknya produktivitas. Selain uang dibutuhkan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka atau "*Hawthorne effect*". Perhatian manusiawi menjadi faktor produktivitas yang diusulkan Mayo.



Mayo kemudian mengajukan konsep *socialman*, sebagai kritik terhadap *rationalman*. *Social man* meyakini bahwa produktivita dapat dinaikkan bila karyawan dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan sosial dalam hubungan yang lebih efektif, daripada pengawasan ataupun pengendalian manajemen. **Sementara** konsep *rationalman* adalah prinsip bahwa seseorang bekerja didorong semata-mata oleh kebutuhan ekonomis pribadi yang terkenal dengan julukan *rational economicman* (yang oleh Robert Owen diperkenalkan dengan istilah *vital machine*). Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa pendidikan dan pelatihan karyawan, yang diperlukan adalah *people management skills* daripada *engineering atau technical skills*, Sehingga konsep dinamika kelompok dalam praktek manajemen lebih penting daripada manajemen atas dasar kemampuan perseorangan (individu).

Sumbangan para ilmuwan yang beraliran hubungan manusiawi ini terlihat dalam peningkatan pemahaman terhadap motivasi perseorangan, perilaku kelompok, ataupun hubungan antara pribadi dalam kerja dan pentingnya kerja bagi manusia.

Para manajer diharapkan semakin peka dan terampil dalam menangani dan berhubungan dengan bawahannya. Bahkan muncul berbagai jenis konsep yang lebih mengaji pada masalah-masalah kepemimpinan, penyelesaian perselisihan memperoleh dan memanfaatkan kekuasaan, perubahan organisasi dan konsep komunikasi.

Manajemen yang lebih manusiawi ini dapat diamati dari karya Robert K. Merton (1910 –2003) yang mengkritik Weber. Bagi Merton keyakinan Weber tentang keandalan struktur birokrasinya bisa tidak berfungsi karena tidak memperhatikan apa yang bakal terjadi dalam organisasi. Keberhasilan suatu birokrasi tidak sekadar bergantung pada peraturan yang dibuat untuk mengendalikan birokrasi bisa menjelma menjadi tujuan itu sendiri oleh birokrat (*instrumental value becomes a terminal value*), tapi juga tergantung kepada perilaku, sikap, dan suasana hati (*personality*) para birokrat itu sendiri. Merton

menyatakan mungkin saja Birokrat yang berkuasa, kata Merton, akan membentuk semacam solidaritas kelompok sehingga sangat mungkin tetap melanggengkan kedudukannya dan menolak berbagai usulan perubahan, dan akhirnya bisa sebagai tembok yang tebal yang sulit. Ramalan Merton ini akan mementahkan semua ideal yang dikemukakan Weber mengenai birokrasi.

Pada bagian ini, model ***Human Relations***, ilmu manajemen dan administrasi lebih manusiawi. Inilah yang disimpulkan Covey sebagai paradigm hati. Manusia bukan hanya perut, tapi juga punya hati. Agar manusia dapat bekerja sama mencapai tujuan, kebutuhan perut dan hatinya harus diperhatikan.

Semakin menarik. Pada tahap ini, sudah sempurnakah teori administrasi?

### **Manajemen Model Open System**

Model ***Human Relations*** telah memberikan perhatian pada aspek perasaan manusia. Pekerja tak lagi diperlakukan sebagai mesin, sebagai alat yang secara semena-mana digunakan untuk mencapai tujuan. Perasaan manusia di tempat kerja sudah mulai dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas. Namun pekerja tetap dianggap sebagai pekerja, bukan sebagai manusia yang punya kehidupan di luar tempat kerja. Manusia masih tetap dianggap sebagai pekerja yang harus 'siap kerja' saat di tempat kerja, masalah di luar tempat kerja dengan alasan apapun tak boleh masuk ke tempat kerja.

Kemudian muncullah pengaruh perkembangan "behavioral scientists" daripada "human relations theorists" yang memberikan cara pandang terhadap manusia secara lebih utuh. Manusia bukan sekadar pekerja berperasaan, namun manusia yang utuh. Ada beberapa tokoh penting, di antaranya yang terkenal adalah Bernard, Argyris, Maslow and Mc Gregor yang lebih mengutamakan konsep

*self actualizing man* daripada hanya sekedar *social man* dalam memberi dorongan kepada karyawan.

**Chester L. Bernard (1886 -1961)**, berdasarkan sosiologi dan filsafat, merumuskan teori kehidupan organisasi. Menurut Bernard manusia akan cenderung berorganisasi karena ingin mencapai tujuan pribadinya melalui pencapaian tujuan organisasi. Manusia terdorong bekerja sama dengan yang lain, jika ia tahu bahwa melalui kerja sama itu tujuan pribadinya dapat tercapai. Karena itu perusahaan akan berjalan efisien dan terus bertumbuh, apabila dapat menyeimbangkan antara pencapaian tujuan perusahaan dan kebutuhan individu. Untuk itu organisasi harus mempertimbangkan dan menyerap kebutuhan individu sebagai pertimbangan penetapan tujuan organisasi. Bernard kemudian menyatakan perlunya organisasi informal untuk menyerap kebutuhan individu. Dari sini, seperti ditulis dalam buku "*The Functions of the Executive*" (1933) ia menuliskan perlunya pendekatan sistem social bagi manajer. Tugas eksekutif, bagi Bernard, adalah memelihara suatu sistem kerja sama dalam organisasi formal. Berikut ini beberapa pemikiran Bernard tentang manajemen:

1. Individu-individu mau bekerja sama dalam kelompok karena menyadari bahwa masing-masing dirinya memiliki keterbatasan fisis dan biologis; melalui kerja sama keterbatasan psikologis dan sosial individu itu akan terbebaskan.
2. Tindakan kerjasama berdasarkan kebutuhan mengatasi keterbatasan individu akan mendorong terbentuknya sistem kerjasama yang efektif dan efisien. Efektivitas adalah jawaban atas pertanyaan 'apakah tujuan kerjasama itu tercapai? Efisiensi adalah jawaban atas pertanyaan 'apakah tujuan itu dapat dicapai dengan ketidakpuasan dan pengorbanan yang seminimum mungkin dari pihak anggota yang bekerjasama?'
3. Setiap sistem kerjasama dibagi ke dalam dua bagian yaitu : "Organisasi", yang merupakan interaksi-insteraksi dari individu

- yang berada di dalam sistem itu, dan "unsur-unsur lainnya"
4. Organisasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, organisasi "formal" (kumpulan interaksi sosial yang memang dikoordinasikan dan mempunyai tujuan bersama) dan organisasi "informal" (interaksi-interaksi sosial tanpa tujuan bersama dan tidak dikoordinasikan secara sengaja).
  5. Organisasi formal dapat berlangsung hanya bila orang-orang yang didalamnya (a) dapat saling berkomunikasi, (b) mau memberi sumbangan pikiran kepada kegiatan kelompok, dan (c) memiliki kesadaran mempunyai tujuan umum.
  6. Setiap organisasi formal harus memiliki unsur-unsur : (a) sistem fungsionalisasi sehingga orang-orang dapat berspesialisasi dengan dibentuknya departementasi ; (b) adanya sistem perangsang yang efektif dan efisien yang akan mendorong setiap orang menyumbang ke pikirannya kepada kegiatan kelompok; (c) sistem kekuasaan ("otoritas") yang menyebabkan setiap anggota kelompok menerima keputusan-keputusan para eksekutif ; dan (d) sistem pengambilan keputusan yang logis sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
  7. Tugas eksekutif dalam organisasi formal adalah : (a) menjaga hubungan komunikasi organisasi melalui suatu skema organisasi, ditambahkan dengan adanya bawahan yang setia, bertanggung jawab, dan mampu bekerja, serta satu organisasi informal" yang baik; (b) membuat perlindungan terhadap pekerjaan pokok dari individu –individu di dalam organisasi; dan (c) adanya perumusan dan penentuan tujuan perusahaan.
  8. Seorang manajer dapat bekerja efektif bila memiliki tata kepemimpinan yang bertanggung jawab dan bekerjasama.

Bernard telah mengajukan cara pandang yang lebih manusiawi. Pertimbangan kebutuhan manusiawi dalam pengelolaan organisasi. Bernard bahkan mendorong adanya organisasi non—formal sebagai pendukung produktivitas organisasi formal.

Setelah Bernard mengusulkan pentingnya mempertimbangan kebutuhan Individu, pemikiran Abraham Maslow (1908-1970) memperinci aspek kebutuhan manusia. Maslow mengemukakan lima jenjang kebutuhan yakni psikologis, keamanan, social, penghargaan, dan, aktualiasis diri. Maslow menegaskan bahwa organisasi akan semakin optimal bila kebutuhan pekerja dipenuhi sampai pada puncaknya, yakni kebutuhan aktualisasi diri.

Pemikir lain yang perlu dibicarakan adalah Mc Gregor yang mengemukakan teori X dan Y. Manusia pada dasarnya memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negative atau X dan Y. Kedua sisi ini saling bersaing, kadang-kadang salah satunya yang paling menonjol dari yang lain.

Teori X menganggap individu dalam organisasi tidak menyukai pekerjaan, mereka malas dan sedapat mungkin menghindari pekerjaan, tidak jujur, tak mau bertanggung jawab, lebih suka “cari selamat”, tidak kreatif, ambisinya rendah, lebih mementingkan apa yang diperoleh daripada apa yang organisasi peroleh. Manusia bekerja secara “terpaksa” untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Lalu manusia X ini bekerja tanpa kreativitas, sekadar mengikti rutinitas semata. Untuk mencapai tujuan organisasi para pekerja harus diiming-imingi, dipaksa bahkan diancam dengan hukuman. Untuk itu, organisasi perlu melakukan pengawasan agar sifat-sifat X ini dapat teratasi. Manajer harus teknik motivasi melalui pemaksaan, sanksi pengawasan ketat, yang mengarahkan perilaku pekerja dengan insentif dan ancaman atau hukuman. Yang paling penting semua aturan harus dibuat secara sederhana dan operatif.

Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai sosok positif bagi organisasi. Manusia bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi, sanggup mengorbankan segalanya demi mencapai tujuan organisasi. Pada jenis manusia Y, ini manajer perlu memberikan kepastian bahwa kontribusi yang diberikan mendapatkan

balasan yang setimpal. Teori Y mengandaikan manusia sempurna yang dapat bekerja sama, memahami tujuan bersama, menyenangkan dan melaksanakan tanggung jawab pekerjaan secara sepenuh hati. Manusia-manusia Y ini tumbuh berkembang bersama organisasi secara kreatif, inovatif.

## **ILMU ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN**

Ketiga aliran manajemen (saintifik, relasi manusia, dan open system) yang telah diuraikan di atas ternyata terus berkembang. Ketiga model pemikiran manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah manajemen.

Lalu bagaimana dengan ilmu administrasi?

Ilmu administrasi lebih tua daripada manajemen. Tokoh seperti Taylor, Fayol, dan lainnya adalah tokoh manajemen yang lahir dari dunia bisnis pada masa revolusi industry. Yang dipikirkan Taylor dan Fayol adalah produktivitas pekerja di dalam organisasi bisnis, sedangkan administrasi bukan urusan bisnis. Administrasi adalah pengelolaan organisasi Negara yang mengurus warga Negara. Aktivitas administrasi lebih tua daripada manajemen. Secara mudah dapat dikemukakan, begitu ada warga masyarakat saat itu ada administrasi. Kerajaan-kerajaan feodal pada zaman dahulu melakukan pengaturan juga pengelolaan warganya. Tujuannya bukan sekadar keuntungan ekonomi, melainkan stabilitas, keamanan, dan kenyamanan bersama.

Mari kita lihat pemikiran Wilson, salah satu teoritis utama administrasi public. Wilson menyatakan bahwa administrasi publik adalah sebuah disiplin ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik. Kata politik di sini adalah

“pengurusan kehidupan bersama di suatu Negara”. Wilson mengemukakan bahwa disiplin administrasi publik merupakan produk perkembangan dari ilmu politik.

W. Wilson (kemudian menjadi presiden Amerika Serikat ke-28: 1913–1921) merumuskan administrasi modern yang bebas nilai. Inilah pembeda dari administrasi feodal yang didasarkan relasi kekerabatan. Untuk itu W. Wilson menginginkan suatu administrasi dan manajemen publik yang profesional harus bersih dari ‘hiruk-pikuk’ lingkungan politik. Wilson memisahkan administrasi dari politik, untuk itu dibutuhkan *‘administrative science’*, Gagasan ini kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi. Sejak itu, selama satu abad lebih, administrasi publik baik sebagai bidang studi maupun sebagai profesi terus berkembang. Ilmu administrasi publik, menurut Wilson, berkaitan dengan dua pertanyaan utama, yaitu:

- *What government can properly and successfully do?*
- *How it can do these proper things with the utmost possible efficiency and at the least possible cost either of money or of energy?*

Bertolak dari gagasan dasar tersebut, dapat diyakini bahwa administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena pada dasarnya administrasi publik berurusan dengan persoalan bagaimana menentukan *to do the right things* dan *to do the things right*. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Wilson walaupun menegaskan pembeda antara manajemen dan administrasi namun ia membuka diri untuk menggunakan pendekatan saintifik dan orientasi bisnis yang mengutamakan nilai efisiensi dan keekonomian (produktivitas). Hal sama dilakukan oleh Max Weber.

**Max Weber** adalah tokoh penting pada pembentukan teori klasik administrasi. Weber sebenarnya seorang sosiolog dan filsuf sosial, namun ia dapat merumuskan teori yang berguna bagi administrasi. Hal ini dapat terjadi karena sifat dasar administrasi adalah pengaturan di dalam interaksi sosial, sosiologi tentu membicarakan interaksi sosial secara lebih mendalam daripada ilmu lainnya. Weber menyumbangkan teori tentang birokrasi, yaitu tentang organisasi yang rasional dan efisien.

Organisasi yang rasional dan efisien bagi Weber adalah organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit, posisi SDMnya diatur dalam suatu hierarki berbentuk piramida dengan wewenang yang makin meningkat, kewenangan pekerjanya terletak pada posisi yang diduduki (bukan karena siapa orangnya), seleksi dan prestasi para anggota berdasar standar yang jelas, dan setiap anggota memiliki keterikatan terhadap organisasi. Semua ini bagi Weber merupakan tipe ideal dari sebuah organisasi modern:

“Secara universal, pengalaman cenderung menunjukkan bahwa jenis birokrasi administrative organization yang murni... adalah, jika dilihat melulu dari pandangan yang teknis murni, mampu memperoleh tingkat efisiensi tertinggi dan dalam pengertian ini secara formal merupakan sarana paling rasional yang dikenal untuk melaksanakan kontrol imperatif terhadap manusia. Bentuk birokrasi ini superior bila dibandingkan bentuk lain dalam hal ketepatan, stabilitas, kekerasan disiplin, dan keandalan. Maka birokrasi semacam ini memungkinkan diperolehnya tingkat perhitungan yang tinggi dalam hubungannya dengan hal itu. Akhirnya, ia juga superior



baik dalam hal efisiensi yang intensif dan dalam jangkauan kegiatan, dan secara formal birokrasi semacam ini dapat digunakan pada semua tugas administrasi” (Weber, 1947: 337)

Teori dasar birokrasi adalah standardisasi. Perilaku orang dalam organisasi ditentukan sebelumnya oleh struktur dan proses yang distandardisasi. Model itu sendiri dapat dipecah menjadi tiga kelompok karakteristik: (a) yang berhubungan dengan struktur dan fungsi dari organisasi; (b) yang berhubungan dengan cara untuk memberi imbalan terhadap usaha; dan (c) yang berhubungan dengan perlindungan bagi para anggota secara individual.

Karakteristik pertama, hierarki kedudukan, yang satu di atas yang lainnya. Masing-masing kedudukan dibedakan secara horisontal oleh pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut menciptakan unit-unit yang menguasai bidang-bidang tertentu, menentukan daerah di mana dilakukan kegiatan yang konsisten dengan kemampuan anggota unit, memberi tanggung jawab bagi pelaksanaan tindakan tersebut, dan mengalokasikan wewenang yang sebanding, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada saat yang sama, peraturan tertulis mengatur prestasi tugas para anggota. Pembebanan struktur dan fungsi-fungsi tersebut memberikan keahlian tingkat tinggi tertentu, koordinasi peran, dan kontrol dari anggota melalui standardisasi.

Imbalan merupakan model kedua yang dikemukakan Weber. Dalam birokrasi Weber, para anggota menerima gaji selaras dengan pangkat mereka dalam organisasi. Promosi didasarkan atas kriteria yang objektif seperti senioritas atau keberhasilan. Karena para anggota bukan pemilik, maka perlu diadakan pemisahan yang jelas antara masalah pribadi dan milik mereka serta masalah dan milik organisasi. Selanjutnya diharapkan bahwa komitmen kepada organisasi adalah yang tertinggi, kedudukan dalam organisasi merupakan pekerjaan satu-satunya dan yang paling utama.

Model ketiga adalah perlindungan hak individu. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karirnya, para anggota menerima perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh para atasan, pengetahuan yang jelas mengenai tanggung jawab mereka dan jumlah wewenang yang dipehang para atasan mereka, dan kemampuan untuk naik banding atas keputusan yang mereka rasakan tidak adil atau berada di luar bidang kewenangan atasa mereka.

Weber menunjukkan prinsip yang sama dengan Fayol, yakni demi efisiensi. Ada sejumlah kritik yang kemudian muncul terhadap pemikiran ini. Paul Appleby dalam tulisannya *Government is Different* (1945) memberi kritik pada upaya pengabdiosian logika organisasi bisnis ke organisasi pemerintahan seperti dilakukan Weber yang mengadopsi Fayol. Bagi Paul Appleby, pengabdiosian tersebut adalah hal yang keliru karena institusi negara sangatlah berbeda dengan institusi swasta. Herbert Simon dalam *The Proverbs of Administration* (1946) juga mengulas lemahnya prinsip-prinsip administrasi dalam pemikiran Weber. Bagi Simon, Weber tidak menulis prinsip administrasi melainkan hanya mengisi ruang keilmuan pada cara kerja birokrasi agar menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pelayanan publik.

Weber menekankan bahwa organisasi negara harus mengadopsi konsep hierarki dan menjalankan meritokrasi (prestasi menentukan promosi jabatan). Dengan langkah itu, Weber membersihkan sistem administrasi dari perkoncoan patrimonial, patronase, dan favoritisme. Asumsi dasar Weber adalah manusia memiliki hasrat dan oportunisme yang membuat proses birokrasi menjadi penuh tipu daya. Untuk menyingkirkan sikap tersebut, maka birokrat harus bekerja layaknya sebuah mesin yang bekerja sesuai tupoksinya. Agar bekerja seperti mesin yang sesuai dengan tupoksinya, maka hierarki birokrasi yang ketat harus dibuat secara *top-down* (yang atas memerintah yang bawah) secara formalisasi, instrumentalisasi, dan

otoritas legal-rasional. Cara kerja Weber ini dapat digambarkan pada table berikut:

MANUSIA	RASIONALITAS BIROKRASI	MESIN
Proses dan hasil kerja dipengaruhi hasrat, kehendak, dan kepentingan politik.	Formalisasi, instrumentalisasi dan otoritas legal-rasional	Kepastian output, efektivitas dan efisien dalam proses kerja.

**Gambar.** Rasionalitas birokrasi untuk menciptakan birokrat layaknya mesin

**Sumber :** Weber, 1947 dikutip dari Agus Pramusinto, dkk, *Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2021

Pada pemikiran Weber ini terlihat adanya prinsip yang sama dengan manajemen, seperti kepastian output, efektivitas, dan efisiensi. Manajemen dan administrasi memiliki aktivitas yang sama ‘mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan’, karena itu teori-teori yang dihasilkan kedua ilmu ini dapat saling digunakan. Pemikiran Weber misalnya lebih membicarakan penataan birokrasi pada ilmu administrasi, namun juga digunakan pada ilmu manajemen. Di sinilah perlu penataan posisi di antara manajemen dan administrasi.

Sheldon memiliki pemikiran menarik mengenai relasi organisasi, manajemen, dan administrasi ini. Pemikirannya dapat ditemukan pada buku *The Philosophy of Management* yang ditulis pada tahun 1923. Sheldon menengahi kritik penggunaan prinsip manajemen bisnis pada administrasi Negara. Pada bagian awal bukunya (chapter II *The Fundamentals of Management*, hal. 31) ia membedakan manajemen, organisasi, dan administrasi.

*Administration is the function in industry concerned in the determination of the corporate policy, the coordination of finance, production and distribution, the settlement of the compass of the organization, and the ultimate control of the*

*executive.*

*Management proper is the function in industry concerned in the execution. of policy, within the limits set up by administration, and the employment of the organization for the particular objects set before it.*

*Organization is the process of so combining the work which individuals or groups have to perform with the faculties necessary for its execution. that the duties, so formed, provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and coordinated application of the available effort.*

Di sini administrasi diposisikan seperti badan legislatif dalam Negara yang berfungsi dalam menentukan kebijakan perusahaan, mengkoordinasikan keuangan, produksi dan distribusi, menyusun kompas organisasi, dan mengendalikan eksekutif. Lalu Manajemen adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh administrasi.

Sheldon menjelaskan relasi organisasi, administrasi, dan manajemen sebagai mesin efektif yang diarahkan dan dijalankan. Organization adalah pembentuk mesin efektif” (*effective machine*), manajemen adalah pelaksana efektif (*effective executive*), sedang administrasi adalah pengarah efektif (*effective direction*). Sebagai pengarah, administrasi menentukan organisasi, lalu manajemen yang menggunakan ketentuan itu. Administrasi mendefinisikan tujuan, lalu manajemen mengupayakan pencapaian tujuan itu. Semua itu lalu dijalankan oleh organisasi sebagai “*machine of management* “ dalam pencapaian yang telah ditentukan oleh administrasi

Yang menarik Sheldon menetapkan sasaran organisasi tidak hanya efisien dan afektif, namun juga sistematis, positif, dan terkoordinasi. Lalu ia menetapkan pentingnya motif pelayanan social. Untuk itu Sheldon menetapkan 3 prinsip manajemen. Pertama,

kebijakan, kondisi, dan metode industri harus mengarah pada kesejahteraan komunal. Oleh karena itu, merupakan bagian dari tugas manajemen untuk menilai kebijakan, kondisi, dan metode berdasarkan ukuran etis. *Kedua*, penilaian etis ini harus diusahakan manajemen sebagai sanksi moral tertinggi dari masyarakat sehingga memberikan efek praktis kepada cita-cita keadilan sosial. Ketiga, komunitas adalah otoritas tertinggi dalam penentuan sanksi etis.

Sumbangan utama Sheldon adalah mendamaikan relasi administrasi dan manajemen. Di sini terlihat jelas bahwa bahkan pada organisasi bisnis, kerja administrasi dibutuhkan. Sebagaimana manajemen juga dibutuhkan dalam organisasi public. Kerangka dari Sheldon ini dapat dijadikan cara untuk menamakan perdebatan ihwal mana dari administrasi dan manajemen yang lebih unggul dan penting.

Titik beda dari organisasi dan manajemen pada lokusnya saja: bisnis atau urusan publik. Di sinilah perlu dipahami dua istilah penting dalam memahami relasi ilmu administrasi dan manajemen. Dua istilah kunci itu adalah fokus dan lokus. *Fokus*-nya adalah "pengelolaan" dengan sejumlah prinsip dan teori-teori yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan *lokus*-nya adalah organisasi tertentu yang memiliki kekhasan tertentu. Dengan demikian seluruh perkembangan teori ilmu manajemen dan administrasi dapat tetap relevan untuk organisasi bisnis dan organisasi negara/publik.

Ilmu Administrasi Pendidikan, tentu juga dapat menggunakan logika yang sama: lokus dan fokus. Lokusnya adalah organisasi pendidikan yang memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi publik lainnya. Walaupun demikian fokusnya tetap saja sama, yakni pengelolaan. Hanya saja, kesemua fokus itu harus tunduk pada lokusnya (yaitu tujuan, sifat dasar, dan paradigm organisasi) yakni organisasi pendidikan.

Mari kita amati perkembangan ilmu administrasi. Kita telah bicarakan perkembangan manajemen dalam 3 tahap: saintifik, human relation, dan open system. Ilmu Administrasi juga memiliki tahap yang sama, yakni administrasi sebagai birokrasi yang tertutup, administrasi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau lingkungan internal, lalu administrasi yang mulai terbuka pada lingkungan eksternal.

Pertama, administrasi dibersihkan atau dinetralkan pengaruh luar organisasi. Prinsip ini dikemukakan Wilson dan juga Weber. Orientasi ilmu positivism yang netral mendorong aktivitas administrasi harus bekerja sebagai mesin tertutup yang bekerja demi mencapai efektivitas dan efisiensi. Gelombang pertama dari model ilmu administrasi ini muncul saat negara modern ingin benar-benar berbeda dari Negara feodal yang terleluai kenal dengan relasi kekeluargaan dan perkoncoan. Setelah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow dalam buku *Politics and Administration* (1900) mengemukakan secara lebih detail tentang pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik. Penetralkan ilmu administrasi ini juga turut dipengaruhi oleh ilmu manajemen, salah satunya dari karya Frederick Taylor (1912) berjudul *Scientific Management*, Henry Fayol (1916) berjudul *General and Industrial Management*, hingga karya W. F. Willoughby (1918) berjudul *The Movement for Budgetary Reform in the State*. Karya-karya mereka mempengaruhi upaya pembentukan prinsip-prinsip dasar bagi cabang ilmu baru, yaitu ilmu administrasi dan menekankan tentang perlunya organisasi pemerintahan mengikuti tata kelola dalam organisasi bisnis.

Kedua, munculnya pertimbangan aspek human relation dalam ilmu administrasi. Administrasi bukan mesin, tapi diisi oleh manusia karena itu pengembangan manusia sebagai sumber daya dipertimbangkan. Upaya menjaga atau mempertahankan pegawai agar tetap profesional, terintegrasi, dan berdedikasi pada organisasi menjelma menjadi tujuan itu sendiri oleh birokrat (*instrumental value becomes a terminal value*).

Dasar dari teori ini adalah ketakmungkinan menjadikan manusia sebagai mesin. Serinci apapun aturan birokrasi yang dirancang Weber, manusia tetap membawa sisi kemanusiawianya. Birokrat yang berkuasa, kata Robert K Merton (1910-2003), akan membentuk semacam solidaritas kelompok sehingga sangat mungkin tetap melanggengkan kedudukannya dan menolak berbagai usulan perubahan, dan akhirnya bisa sebagai tembok yang tebal yang sulit. Pada titik ini diperlukan pengamatan dan pengelolaan lingkungan internal atau hubungan antar manusia di dalam birokrasi, karena suasana lingkungan internal organisasi juga diwarnai oleh terpenuhinya tidaknya kebutuhan manusia pekerja dalam organisasi.

Isu lingkungan internal juga pernah diungkapkan oleh Dwight Waldo (1913-2000). Waldo yang berpendapat bahwa dalam kenyataan, setiap individu datang ke lembaga pemerintah membawa serta karakternya dan latar belakangnya yang akan mewarnai dinamika kerja dan kinerja organisasi. Tujuan organisasi public menjadi tidak serasional mesin, ada kelokan yang dipengaruhi orang-orang yang di dalamnya. Aaron Wildavsky (1930-1993) juga mengemukakan kecenderungan pengaruh hubungan rasional yang merusak ideal mesin birokrasi yang dibayangkan Weber. Para biorkrat kerap membeberkan yang baik-baik saja pada saat evaluasi seraya menyembunyikan kesalahan atau kegagalan. Akibatnya evaluasi tidak membawa dampak negatif bagi penilaian status dan jabatan para birokrat.

Amatan Wildavsky, Waldo, dan lainnya ini menunjukkan pentingnya ilmu administrasi memperhatikan organisasi internal. Karena bagaimana pun situasi dan kondisi yang tercipta dalam organisasi karena faktor *leadership*, variasi karakter dan motivasi kerja pegawai/pekerja, perbedaan dalam kondisi psikologis dan kebutuhan, aspek sosiologis dan antropologis serta kepentingan politis dan birokrasi dari para anggota organisasi, sangat menentukan keberhasilan organisasi dan manajemen.

Ketiga, model administrasi open system yang membuka diri terhadap lingkungan eksternal. Model ini mendorong agar organisasi bertumbuh secara fleksibel dengan senantiasa melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap lingkungan yang tidak menentu (Quinn & Cameron, 1983). Perubahan ini didasarkan pada perubahan peta politik dan dunia, juga pada temuan ilmiah.

Secara ilmiah, pentingnya pengaruh lingkungan di luar administrasi ini telah disadari oleh F. Goodnow (1859-1939). Bagi Goodnow, administrasi merupakan satu dari dua fungsi dasar pemerintah. Kedua fungsi fungsi dasar pemerintah itu adalah fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik melahirkan kebijakan atau ekspresi dari *state will*, sedangkan fungsi administrasi bertujuan untuk melaksanakan kebijakan negara. Pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan administasi dari adanya politisasi, karena administrasi khusus bertugas menyediakan pelayanan publik secara merata dan adil. Fungsi Politik bertugas membuat kebijakan atau keinginan-keinginan Negara, sementara administrasi pelaksana kebijakan-kebijakan.

Lebih jauh Goodnow menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga otoritas yang memiliki wewenang yang berbeda, yaitu yudisial, eksekutif, dan administratif. Otoritas yudisial memiliki fungsi untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak orang lain. Otoritas yudisial ini memiliki kekuasaan terpisah dari fungsi pemerintah otoritas eksekutif dan otoritas administratif. Fungsi otoritas eksekutif adalah pengawasan atas pelaksanaan kehendak negara. Pelaksana kehendak Negara adalah otoritas administrative. Dari konsep ini Goodnow, walaupun tetap menetralkan aktivitas administrasi, namun tetap memberi ruang bagi ototritas politik eskekutif dalam melakukan kontrol.

Isu lingkungan eksternal diungkapkan juga oleh P. Appleby (1891-1963). Di sini, Appleby menolak pemisahan administrasi dari



politik yang dikemukakan Wilson. Pemisahan itu hanya mungkin dilakukan pada organisasi bisnis, sedang dalam organisasi pemerintahan itu berbeda dengan bisnis. Appleby mendorong keterlibatan politik dalam administrasi sebagai pengontrol. *'Government is different because government is politics'*, demikian tulis Appleby.

Pentingnya lingkungan eksternal dalam administrasi juga dikemukakan oleh R. Dahl (1916-1990). Dahl menegaskan bahwa manusia dalam administrasi publik bukanlah mesin, karena itu tidak mungkin benar-benar steril dari kepentingan. Daripada menginginkan kenetralan, lebih baik menyadari dan menciptakan nilai-nilai normatif yang disepakati bersama. Pemikiran mengenai perlunya melibatkan lingkungan eksternal dalam pengelolaan administrasi dikemukakan Katz dan Kahn. Kedua pemikir ini memperkenalkan organisasi yang berkarakter *'open system'*. Organisasi jika ingin berkembang dan adaptif harus terbuka

R Dahli lalu mengemukakan 9 karakter organisasi sebagai sistem yang terbuka yaitu :

1. Pemasukan Energy (input): sebuah sistem yang terbuka mendatangkan dan menerima energy dari lingkungan eksternal.
2. *The Through-Put*: input itu ditransformasikan untuk organisasi, dijadikan bahan untuk menciptakan produk baru.
3. *The Output*: sistem mengambil beberapa produk dari luar ke dalam lingkungannya seperti makhluk hidup yang menghasilkan karbondioksida dari paru-paru yang dibutuhkan tumbuhan.
4. *Systems as cycles of events*: pola aktivitas dari pertukaran energi mempunyai sifat yang membentuk suatu siklus. Produk yang diambil dari luar lingkungan organisasi melengkapi sumber energi untuk dilakukan proses

- pengulangan dan membentuk sebuah siklus.
5. *Negative Entropy*: Sistem terbuka, dengan mengambil energi lebih dari lingkungannya daripada yang dikeluarkan dapat menyimpan energy dan memperoleh entropi negatif.
  6. *Information Input, Negative Feedback, and the Coding Process*: Input juga informatif dalam karakter dan memberi sinyal kepada struktur mengenai lingkungan dan mengenai fungsinya yang berhubungan dengan lingkungan. Umpan balik informasi dari jenis negatif memungkinkan sistem untuk memperbaiki deviasi dari arahnya. Coding adalah istilah umum bagi mekanisme selektif dalam penerimaan input, dimana bahan yang masuk ditolak atau diterima dan diterjemahkan untuk struktur.
  7. *The Steady State and Dynamic Homeostatis : Steady state* tidak terpaku atau keseimbangan yang benar. Prinsip homeostatis tidak berlaku secara harfiah untuk fungsi dari semua sistem kehidupan yang kompleks, bahwa dalam menangkal entropi mereka bergerak menuju pertumbuhan dan ekspansi.
  8. *Differentiation*: Organisasi terbuka bergerak ke arah diferensiasi dan elaborasi dengan spesialisasi fungsi.
  9. *Equifinality*: sistem terbuka dapat mencapai tahap akhir yang sama dari kondisi awal yang berbeda dan dengan berbagai jalur.

Pemikiran lain yang mengkritik system tertutup yang dikemukakan Weber dan Wilson adalah W. Bennis (1925-2014). Bennis mengkritik organisasi klasik model Weber tidak akan bertahan di masa depan. Di masa depan, bagi Bennis, organisasi harus lebih responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan dan perubahan kondisi tersebut, karena itu karakter yang cenderung birokratis, terstruktur dan kaku harus dikurangi. Pandangan Bennis ini semakin menegaskan perlunya

transformasi pandangan dari *'closed system'* ke *'open system'*.

George Frederickson (1934-2020) dalam *paper*-nya *"Toward a New Public Administration"* lebih tegas mengajukan perubahan Administrasi publik dengan memasukkan indikator keadilan sosial (*social equity*) baik dalam kinerja maupun dalam pemberian pelayanan publik. Inilah yang disebut gerakan Administrasi Publik Baru. Frederickson menegaskan jika dalam administrasi klasik menjadikan efisiensi (*how can we offer better services*) ekonomi (*how can we maintain our level of services while spending less money*) menjadi pertimbangan utama, maka dalam *New Public Administration* ditambahkan satu aspek lagi, yakni keadilan sosial (*does this service enhance "social equity"*). Aspek keadilan sosial ini menjadi penting karena suatu negara memiliki begitu banyak kelompok dalam masyarakat (pluralisme), yang semuanya menuntut diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi.

Secara politik, model open system ini dipengaruhi oleh perkembangan politik neoliberalisme pada tahun 1970-an yang dipromosikan oleh Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris. Bandul kebijakan berpindah dari Negara mengurus keseluruhan persoalan warganya, menjadi sebagian urusan Negara diberikan kepada swasta pelaku bisnis atau pasar. Jika liberalisme menempatkan negara hanya sebagai (pengawas) aktivitas publik, neoliberalisme mendorong negara untuk berperan aktif memfasilitasi dunia bisnis. Situasi ini melahirkan model *New Public Administration* (NPA) dan ditopang oleh konsep *good governance* yang disebarluaskan oleh World Bank dan IMF.

NPA muncul sebagai tanggapan agar administrasi dapat menyelaraskan diri dengan tuntutan ekonomi pasar yang kompetitif. Model NPA memasukkan prinsip persaingan, kepemimpinan kewirausahaan, dan manajemen organisasi bisnis dalam cara kerja administrasi negara. Sementara dalam konsep *good governance*,

peran negara tidak lagi sebagai penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan. Negara dalam *good governance* posisinya dikurangi hingga setara dengan aktor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sini, negara hanya bertindak wasit yang memastikan *win-win solution* dari persaingan aktor swasta dengan aktor masyarakat .

Model NPA ini mendorong perubahan lokus dan fokus dari ilmu adminis-trasi negara. Jika sebelumnya lokus ilmu administrasi adalah pemerintahan saja, NPM memperluas lokus ke wilayah publik. Fokus ilmu administrasi kemudian tidak lagi terbatas pada tata kelola pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga mencakup persoalan pelayanan publik (baik yang dijalankan pemerintah maupun swasta), pembangunan ekonomi, hingga hubungan antara swasta dengan pemerintah. Konsekuensi dari pergeseran lokus dan fokus ini, membuat penyebutan “ilmu administrasi negara” pun tidak lagi relevan, karena menjadi sempit. Cabang ilmu ini kemudian disebut sebagai “ilmu administrasi publik”.

Ilmu Administrasi telah berevolusi dari bebas nilai menjadi sadar nilai, dari tanpa nilai menjadi merasa perlu melibatkan etika, kejujuran dan tanggung jawab. Keadilan sosial harus menjadi justifikasi penilaian baru yang disandingkan dengan nilai efisiensi dan keekonomian (*economy*). Model rasionalitas dan penggunaan konsep hierarki yang kaku terus diperbaiki, kriteria administrasi publik yang efektif menjadi warga negara yang dilayani aktif dan partisipatif. Namun masih ada masalah lain dari NPA, yakni sifatnya yang masih *top-down*.

NPA dianggap gagal menciptakan pemerintahan yang profesional dan gagal memberikan pelayanan pada kebutuhan warga. Konsep *good governance*, dinilai melemahkan suara publik dan memenangkan pemilik modal ekonomi. Konsekuensinya NPA membiarkan kepentingan publik tergerus dan kekuatan bisnis semakin

dominan. Dari sinilah muncul gagasan alternatif, yaitu *New Public Services* (NPS) yang menekankan bahwa administrator publik harus mendedikasikan kerja mereka untuk kepentingan publik secara luas. Lebih dari itu NPS harus melibatkan warga negara dalam “manajemen publik” dan “kebijakan publik”. Dengan paradigma ini peran utama dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membantu mengartikulasikan kepentingan dan memenuhi kehendak masyarakat (*bottom-up*).

Demikianlah perkembangan ilmu administrasi yang semakin terbuka dari mesin menjadi lebih manusiawi, dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka, dari *top-down* menjadi juga *bottom-up*. Organisasi pendidikan merupakan bagian dari proses administrasi publik ini, terutama keterkaitannya dengan kewajiban menjalankan kebijakan pendidikan yang ditetapkan Negara. Walaupun pengelolaan organisasi pendidikan semakin menjadi lebih berorientasi bisnis, sehingga pendekatan manajemen dianggap lebih tepat, namun bagaimanapun organisasi pendidikan tak bisa lepas dari Negara dan terkait dengan publik.

Sekali lagi, aktivitas pendidikan berada sebagai bagian dari kegiatan negara sebagai penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Lokusnya adalah pendidikan sebagai kebijakan negara dan kepentingan warga negara secara umum. Sementara *fokusnya* disesuaikan dengan kebutuhan dan paradigma lokus. Walaupun demikian pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan politik, pendidikan juga berhubungan dengan kegiatan bisnis, kebutuhan masyarakat, dan nilai luhur. Karena itu administrasi pendidikan juga terkait dengan kecenderungan ekonomi makro.

Sebagai salah satu contoh bagaimana fokus ilmu administrasi disesuaikan dengan lokusnya dapat dikemukakan sifat organisasi pendidikan sebagai sistem terbuka. Salah satu teori tentang organisasi adalah memandang organisasi dari perspektif sistem. Sistem adalah “kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling

terhubung yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan” (Robbins, 2003: 11). Sistem dapat diklasifikasikan sebagai terbuka dan tertutup. Sistem tertutup berarti memandang sistem sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri yang berarti mengabaikan efek lingkungan, tidak akan menerima energi dari luar dan tidak akan ada sumbangan energi untuk lingkungannya. Sementara sistem terbuka mengakui interaksi yang dinamis dari sistem tersebut dengan lingkungannya.

Pendidikan berdasarkan karakteristiknya yang memerlukan sumber masukan dari masyarakat dan akan berguna bagi masyarakat tentulah dapat dikategorikan sebagai suatu sistem terbuka (ini berarti menggunakan teori organisasi umum). Tapi tentu saja unsur-unsur di dalamnya berbeda dan disesuaikan dengan kepentingan organisasi pendidikan.

## **Refleksi**

Pendidikan merupakan kegiatan manusia yang paling utama yang berkaitan dengan tujuan, pola kerja, sumber daya dan manusia. Agar pendidikan itu mencapai tujuannya maka diperlukan pengaturan atau upaya tertentu seperti penetapan tujuan yang akan dicapai, pola kerja yang produktif, pemanfaatan sumber yang efisien dan kerja sama orang-orang yang terpadu. Upaya tersebut dapat diberi batasan sebagai *administrasi pendidikan*. Jelaslah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pendidikan seharusnya memahami dan sekaligus mahir dalam administrasi pendidikan sehingga proses pendidikan menjadi produktif.

Perencanaan merupakan salah satu dari kegiatan dasar praktik administrasi. Tanpa perencanaan yang baik, hampir dapat dipastikan, tidak akan ada proses tindak administrasi. Pada proses perencanaan terdapat aktivitas menganalisis masalah, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan sumber daya –termasuk SDM—bagi

perencanaan masa depan, penghitungan peluang dan ancaman, dan seterusnya. Paling tidak terdapat dua manfaat atau peran penting Filsafat dalam perencanaan pendidikan:

1. Filsafat memberikan metode berpikir yang dapat membantu proses perencanaan;
2. Filsafat memberikan inspirasi dan sumber kearifan dalam perencanaan.

Filsafat dengan sifat dasar *kritis*, *sistematis*, dan *radikal* memberikan banyak sumbangan gagasan dan pola kerja yang efektif dan efisien. Salah satu manfaat dari sifat dasar *kritis* dan *radikal* misalnya mendorong kita untuk “tidak menerima sesuatu sebagaimana adanya” dan “meneliti sampai akar masalah yang terdasar”. Perencanaan pendidikan tentu tidak bisa dilakukan semena-mena. Perencanaan meliputi (a) analisis atas masalah dan potensi yang tersedia, (b) penetapan tujuan bagi masa depan pendidikan; dan (c) kebijakan yang akan menjadi dasar seluruh realisasi tujuan. Ketiga kerja perencanaan ini, sangat terkait dengan tugas pokok filsafat:

- Analisis konsep-konsep, yaitu (a) Analisis konsep-konsep ilmiah: hukum sebab-akibat, keseragaman, ruang, waktu dan sebagainya; (b) Analisis bahasa sehari-hari
- Sintesis spekulatif, yakni filsafat sebagai sintesis ilmu-ilmu; pencarian kearifan sebagai pedoman kehidupan dan pengembangan sosial (Reiser, 1966: XV)

Analisis atas masalah dan potensi yang dimiliki tak mudah dilaksanakan, kecuali bila didasari oleh kerja rasional yang *kritis* dan *radikal*. Masalah tidak akan ditemukan bila seorang perencana menerima suatu gejala sebagai kewajaran. Masalah bisa ditemukan melalui prinsip kritis: “*tidak menerima sesuatu sebagaimana adanya*”, melalui prinsip itu seluruh kebiasaan tidak diterima begitu saja sebagai sesuatu yang telah benar dengan sendirinya melainkan harus

terus diuji atau diteliti ulang sampai benar-benar –meminjam ungkapan Descartes—*Clear and distinct*. Setelah penelitian kritis, perencanaan dapat dilakukan melalui prinsip radikal dan sistematis, yaitu *meneliti sampai akar masalah yang terdasar* secara sistematis sampai ditemukan titik masalah yang terdasar. Pola kerja prinsip radikal, sistematis, dan kritis ini dibutuhkan dalam seluruh aspek perencanaan.

Filsafat banyak mengkaji hakikat terdasar dari manusia (dan masyarakat), alam, dan Tuhan. Ada banyak temuan filosofis yang dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan kerja perencanaan. Teori-teori, atau bahkan ungkapan-ungkapan filosofis dapat menjadi inspirasi kerja perencanaan. Misalnya ada banyak ungkapan filosofis yang terkait dengan pendidikan: Seorang manusia hanyalah apa yang diketahuinya (Francis Bacon), hanya kaum terpelajarlah yang akan bebas (Epictetus), orang yang tahu akan kebenaran tidak sama dengan orang yang mencintainya dan orang yang mencintainya tidak sama dengan orang yang bersuka cita di dalamnya (Konfusius), Manusia selalu cenderung tertarik pada kepentingan masa kini daripada kepentingan masa depan yang jauh (David Hume), Kegiatan yang dilakukan bersama-sama lebih mungkin berhasil apabila keberhasilannya menguntungkan semua pihak yang terlibat (Euripides), dll.



## URGENSI FILSAFAT BAGI ADMINISTRASI PENDIDIKAN

“Jika kita bersedia untuk memahami pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan pendapat-pendapat mendasar, bersifat intelektual dan emosional, tentang alam serta tentang sesama manusia, maka filosofi dapat dirumuskan sebagai *teori umum tentang pendidikan...* Karenanya pendidikan tidak dibawahahi oleh apapun juga untuk menyelamatkan lebih banyak lagi pendidikan.”

**(John Dewey)**

Filsafat adalah upaya untuk memahami ide atau konsep, karena itu dapat juga dilihat sebagai “pemikiran tentang pemikiran” atau “berpikir tentang berpikir”. Dengan kata lain, aktivitas pelaku filsafat adalah berpikir, yaitu berpikir tentang apa saja, termasuk berpikir tentang pemikirannya sendiri, tentang apa yang sedang dipikirkannya. Maka ketika seorang filuf sedang berpikir, sesungguhnya ia melakukan “dialog” dalam dirinya tentang apa saja. Ia bertanya dan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, tetapi kemudian jawaban itu disanggah, dikritik, dan dipertanyakannya lagi. Maka, terjadilah proses bertanya dan menjawab dan bertanya dan menjawab terus-menerus tanpa henti.

Filsafat dalam hal ini adalah sebuah *quest* (pencarian) dan pertanyaan (*question*) tentang berbagai ide.

Filsafat dapat didefinisikan sebagai upaya mencari atau memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan lewat penalaran sistematis yang kritis, radikal, refleksif dan integral. Filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lewat pendekatannya yang integral yang berarti filsafat tidak mengkaji semesta dari satu sisi saja namun secara menyeluruh. Kritis berarti mengkaji objeknya tidak berhenti pada penampakan, melainkan terus mengajukan pertanyaan demi mencapai hakikat. Filsafat juga bersifat refleksif dalam arti dalam memahami obyeknya, filsafat berusaha mengendapkan apa yang ia tangkap untuk diolah dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan yang jernih. Dalam usaha mencapai hakikat ini banyak sekali metode yang digunakan dalam filsafat antara lain: metode kritis, metode intuitif, metode geometris, metode fenomenologis, dan sebagainya

Berbeda dengan filsafat, ilmu pengetahuan hanya mencoba menerangkan gejala-gejala secara ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak bersikap kritis dalam menyikapi semesta dan cenderung terkotak-kotak dalam obyek penelitiannya masing-masing. Tujuannya bukan mencapai hakikat yang paling mendasar dari semesta melainkan hanya mencoba menjelaskan gejala-gejala secara relasional. Dalam mengupayakan penjelasan ilmiah tersebut, ilmu pengetahuan pun menggunakan metode. Metode ilmu pengetahuan adalah satu urutan metodologis yang ketat demi mendapatkan penjelasan yang seobyektif mungkin tentang semesta. Metode pemerolehan ilmu pengetahuan ini diterima begitu saja sebagaimana halnya sebuah dogma. Filsafat ilmu pengetahuan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang amat mendasar terhadap ilmu pengetahuan untuk membongkar asumsi-asumsi yang tadinya diterima begitu saja.

Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan

segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Di sini terlihat bahwa pengetahuan lebih bersifat spontan, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan reflektif. Perbedaan yang jelas antar keduanya ini menghasilkan pembedaan antara filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan.

Filsafat pengetahuan berkaitan dengan upaya mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan manusia pada umumnya, terutama menyangkut gejala pengetahuan dan sumber pengetahuan manusia. Dalam hal ini kemudian dipertanyakan dan dipersoalkan, misalnya, tentang bagaimana manusia bisa tahu? Apakah manusia bisa sampai pada pengetahuan yang bersifat pasti? Apakah pengetahuan yang pasti itu mungkin? Apa artinya mengetahui sesuatu? Bagaimana manusia bisa tahu bahwa ia tahu? Dari mana asal dan sumber pengetahuan manusia itu? Apakah pengetahuan sama dengan keyakinan? Di mana letak perbedaannya?

Sementara filsafat ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempersoalkan dan mengkaji segala persoalan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang dipersoalkan adalah: apa itu kebenaran? Apa metode ilmu pengetahuan itu? Manakah metode yang paling bisa diandalkan? Apakah kelemahan metode yang ada? Apa itu teori? Apa itu hipotesis? Apa itu hukum ilmiah? Terkait dengan itu dapat dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan peristiwa dalam alam semesta ini secara sistematis dan masuk akal (rasional). Asumsinya adalah bahwa segala sesuatu yang dilihat dalam alam semesta ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri sesungguhnya saling terkait satu sama lain. Lalu ilmu pengetahuan menghubungkan dan menjelaskan bahwa yang satu adalah sebab dari yang lainnya, dan yang lain adalah akibat dari yang lainnya. Maka ilmu pengetahuan, dalam kerangka ini, dipahami sebagai upaya untuk

mencari dan menjelaskan secara sistematis dan masuk akal sebab dan akibat dari berbagai peristiwa di alam semesta ini. Maka dalam ilmu pengetahuan dikembangkan pelbagai metode untuk tidak hanya menemukan sebab dan akibat dari berbagai peristiwa dengan peristiwa lainnya melainkan juga untuk menjelaskan kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya (yang mungkin sehari-hari terlihat seakan tanpa keterkaitan apa pun).

Berdasarkan argumen ini, maka filsafat ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai “cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya”. Obyek materi filsafat ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan dan obyek formanya adalah ciri-ciri dan cara kerja ilmu pengetahuan. Dalam hal administrasi pendidikan, filsafat administrasi pendidikan adalah cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu administrasi pendidikan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya. Obyek materinya adalah ilmu administrasi pendidikan; dan obyek formanya adalah ciri-ciri dan cara kerja ilmu administrasi pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, yang pertama-tama menjadi fokus filsafat ilmu pengetahuan adalah masalah metode ilmu pengetahuan. Pembicaraan tentang metode ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mengerti bahwa ilmu pengetahuan tidak lebih dari salah satu cara mengerti bagaimana akal budi kita bekerja. Ilmu pengetahuan merupakan karya budi yang logis dan imajinatif. Metode-metode ilmu pengetahuan adalah metode-metode yang logis karena ilmu pengetahuan mempraktikkan logika. Namun selain logika temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan oleh akal budi manusia yang terbuka pada realitas. Keterbukaan budi manusia pada realitas itu disebut imajinasi. Maka logika dan imajinasi merupakan dua dimensi penting dari seluruh cara kerja ilmu pengetahuan. Tugas filsafat ilmu pengetahuan, dengan demikian, adalah mempelajari dengan serius proses logis dan imajinatif dalam cara kerja ilmu pengetahuan. Dengan alasan ini, filsafat ilmu

pengetahuan perlu mengarahkan diri selain pembicaraan tentang masalah metode ilmu pengetahuan juga berbicara tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Nah, dalam kaitannya dengan filsafat Administrasi pendidikan tentu saja arah pembicaraannya berkenaan dengan pertanyaan: apa itu kebenaran dalam kerangka ilmu administrasi pendidikan? Apa metode ilmu administrasi pendidikan itu? Manakah metode yang paling bisa diandalkan? Apakah kelemahan metode yang ada? Apa itu teori administrasi pendidikan? Apa itu hipotesis? Apa itu hukum ilmiah? Pendek kata, filsafat ilmu pengetahuan mendorong ilmu administrasi pendidikan tidak sekadar praktek administratif melainkan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan peristiwa administratif ini secara sistematis dan masuk akal (rasional).

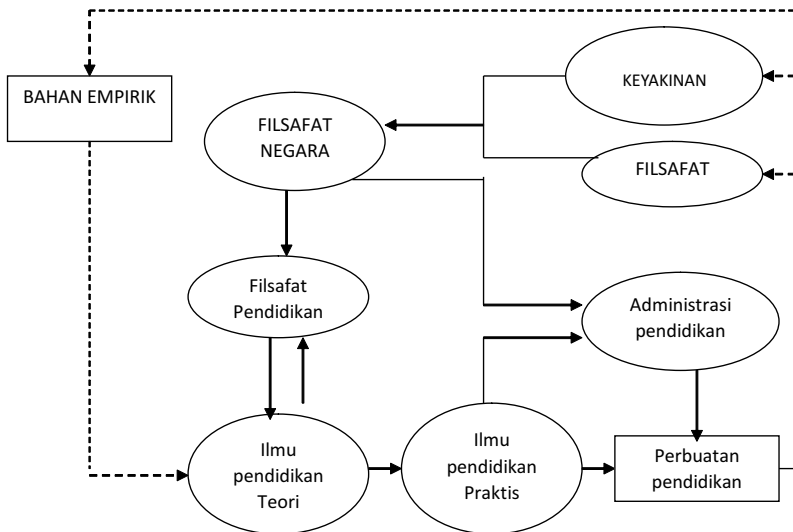
### **Memahami Rumusan Filsafat Administrasi versi ISPI**

Pada tahun 1995, ISPI (Ikatan Sarajan Pendidikan Indonesia) merumuskan sumbangan pemikiran mengenai kerangka Filsafat Pendidikan dan Filsafat Administrasi Pendidikan. Bagan di atas adalah salah satu sumbangan ISPI. Ada beberapa sumbangan pemikiran yang dapat ditemukan dari bagan ini., yaitu 1) tentang filsafat pendidikan, 2) posisi ilmu administrasi pendidikan dalam hubungannya dengan filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan (teoritis dan praktis).

*Pertama*, ISPI telah merumuskan bahwa Filsafat Pendidikan dan Ilmu Pendidikan merupakan turunan dari Filsafat Negara atau Filsafat Politik. Ini berarti arah dan tujuan pendidikan adalah mendorong siswa menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang beretika. Rumusan ini mendapat kritik dari Naquib al-Attas, filsuf Muslim Malaysia, sebaiknya tujuan pendidikan itu bukan demi menjadi warga negara yang baik melainkan menjadi manusia yang baik. Alasan yang dikemukakan Naquib cukup logis, bila seseorang

menjadi manusia yang baik otomatis ia akan menjadi warga negara atau warga masyarakat yang baik pula, sementara seorang warga negara yang baik belum tentu menjadi manusia yang baik. Sebagaimana dikemukakan Al-Attas dalam buku *Islam and Secularism* (Wan Daud, 1998: 172);

”Tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara ataupun anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan (dalam pendidikan) adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaannya yang mikro, sebagai sesuatu yang spiritual (dengan demikian yang ditekankan itu) bukan nilai manusia sebagai wujud fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan utilitarian berdasarkan kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia”.



Seraya Al-Attas menegaskan bahwa warga negara yang baik atau pekerja yang baik belum tentu menjadi manusia yang baik, sebaliknya manusia yang baik sudah pasti akan menjadi seorang pekerja dan warga negara yang baik. Lebih lanjut Al-Attas (Wan Daud, 1998: 173) menegaskan:

“Penekanan terhadap individu mengimplikasikan.. pengetahuan mengenai akal, nilai, jiwa, tujuan dan maksud yang sebenarnya (dari kehidupan ini); sebab akal, nilai, dan jiwa adalah unsur-unsur inheren setiap individu.... (sedangkan) penekanan terhadap masyarakat dan negara membuka pintu menuju sekularisme, termasuk di dalamnya ideologi dan pendidikan sekuler.”

Arah pendidikan untuk menjadi warga negara ini memengaruhi pola yang diterima Administrasi Pendidikan. Pada bagan di atas terlihat bahwa administrasi pendidikan dipengaruhi secara langsung oleh Filsafat Negara dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh filsafat pada umumnya. Posisi subordinat ini pada gilirannya kelak akan membuat Ilmu administrasi pendidikan tidak akan memiliki daya pengembangan dirinya, ia hanya berkembang sejauh perkembangan yang dimiliki filsafat negara.

Kalau begitu, kita harus merumuskan ulang apa itu filsafat pendidikan dan apa juga filsafat administrasi pendidikan? Untuk merumuskan kaitan antara filsafat dan ilmu administrasi pendidikan dapat dilakukan dalam perumusan struktur ilmu administrasi berdasarkan perspektif filsafat.

Suatu ilmu dalam filsafat ilmu selalu memiliki tiga bagian penting ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Ontologi* adalah jawaban atas pertanyaan “apa yang paling mendasar/tertinggi yang bisa diketahui, dan bagaimana kita bisa mengetahuinya?” *Epistemologi* adalah jawaban atas pertanyaan “apakah realitas ontologis itu benar

dan bagaimana cara mengetahuinya?"; dan *Aksiologi* adalah jawaban atas pertanyaan "Apakah kebaikan tertinggi itu?"

Masalahnya adalah pada perkembangan awal pemikiran filsafat, tidak ada satupun yang secara serius membicarakan pendidikan –apalagi membicarakan filsafat. Kalaupun ada yang dinamakan filsafat pendidikan, itu merupakan hasil penurunan dari pemikiran "filsafat murni" (misalnya dari pemikiran Plato tentang ide diturunkan menjadi rumusan filsafat tertentu). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan penarikan dan peramalan berdasarkan filsafat yang lebih murni. Mungkin, filsafat murni itu hanya menggambarkan sekilas mengenai pendidikan, lalu dirasionalisasikan untuk mengabsahkan praktik-praktik pendidikan.

Karena sumber dasarnya adalah pemikiran murni, maka filsafat pendidikan pada dirinya hanya berpikir tentang dirinya saja. Untuk dapat sampai pada rumusan Filsafat Pendidikan, ketiga struktur ilmu Filsafat ini membutuhkan perantara. Misalnya, bila Filsafat Pendidikan yang hendak dirumuskan adalah filsafat pendidikan dengan tujuan sosial, maka hubungannya akan berbentuk : Ontologi – Epistemolog – Aksiologi (*mencakup dalam*) Teori Moral (Apakah perilaku antarmanusia yang baik itu ), kemudian teori moral *tertanam dalam* Filsafat Politik (Apakah organisasi politik yang baik itu?), dan Filsafat Politik itu sebagian tertanam dalam Filsafat Pendidikan (Pengetahuan macam apa yang diperlukan dan bagaimana semestinya ia ditanamkan?). Jadi ontologi-epistemologi-aksiologinya dikerangkai oleh perspektif filsafat yang lain, sebagaimana filsafat administrasi pendidikan rumusan ISPI yang dikerangkai filsafat negara.

Ilmu pendidikan, menurut perspektif ISPI, merupakan kajian pendidikan yang bertujuan demi masyarakat (bukan pengembangan individu), karena itu Filsafat pendidikan dikaitkan dengan etika sosial. Filsafat pendidikan bermula dari prinsip nilai (*yang menjadi landasan bagi*) prinsip-prinsip moral, lalu prinsip moral ini berfungsi *sebagai*



*dasar pembentukan* kebijakan-kebijakan moral; kebijakan moral adalah *dasar bagi pembentukan* kebijakan politik; kemudian pada tahap akhir kebijakan politik ini *memengaruhi* kebijakan pendidikan. Untuk memperjelas hubungan tersebut dapat dikemukakan uraian dari prinsip-prinsip tersebut:

- a) **Prinsip-prinsip nilai:** Apa yang ideal? Apakah yang memiliki kebaikan tertinggi? (sebagai *landasan bagi Pendidikan*)
- b) **Prinsip-prinsip moral:** Apa pengaruh yang ideal tadi terhadap perilaku manusia dalam masyarakat? Perilaku apa yang paling bermoral? (sebagai dasar pembentukan peserta didik dalam kegiatan pendidikan)
- c) **Kebijakan-kebijakan Moral:** Tindakan macam apakah yang disyaratkan oleh sistem prinsip-prinsip moral ini bila dilihat dalam kondisi yang ada sekarang? Tindakan apa yang praktis? (sebagai dasar bagi praktik pendidikan)
- d) **Kebijakan-kebijakan Politik:** Kondisi-kondisi seperti apa, lembaga-lembaga apa, dan hubungan antar lembaga yang seperti apakah yang perlu ada bagi penanaman dan pelestarian kebijakan-kebijakan moral semacam itu? Bagaimana moralitas bisa dilembagakan sebagai aspek kelanjutan masyarakat secara luas? (sebagai landasan bagi penyediaan konteks pendidikan)
- e) **Kebijakan-kebijakan pendidikan.** Pengetahuan macam apakah yang diperlukan, dan bagaimana ia dibagikan pada orang-orang lain?

Pada kaitan urut-urutan di atas, filsafat pendidikan sudah dengan sendirinya terhubung dengan proses administrasi (dalam arti pengaturan kebijakan negara) karena prinsip nilai dan moralnya sudah melewati mekanisme pembuatan kebijakan politik.

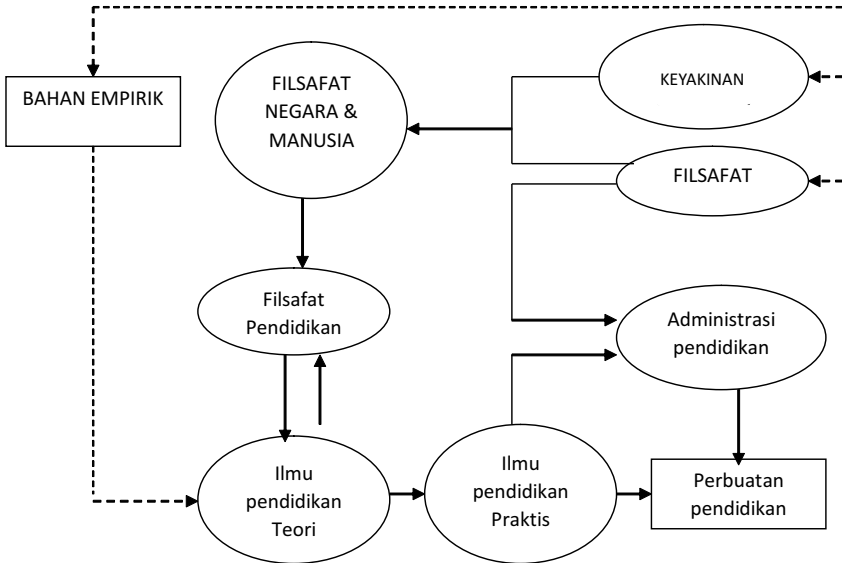
Untuk dapat memahami kedua perspektif ini (ISPI dan Naquib al-Attas), akan dikemukakan kemungkinan perumusan Filsafat

Pendidikan dari perspektif Filsafat Manusia. Seperti sudah dikemukakan di atas, bahwa Naquib al-Attas merumuskan ideal ilmu dan praktek pendidikan itu berdasar Filsafat Manusia, bukan Filsafat negara/politik.

<b>Ontologi</b>	Apakah realitas itu? Apa realitas tertingginya?
<b>Epistemologi</b>	Apakah Kebenaran tertinggi itu? Bagaimana kita bisa mengetahuinya?
<b>Aksiologi</b>	Apakah Kebaikan Tertinggi itu?
<b>Filsafat Manusia</b>	Apakah Tujuan Menjadi Manusia itu? Apakah Kebenaran dan Kebaikan Tertinggi sebagai Manusia (dan warga negara)?
<b>Filsafat Pendidikan</b>	Pengetahuan macam apa yang diperlukan dan bagaimana semestinya ia ditanamkan?

Filsafat Pendidikan yang merujuk pada Filsafat Manusia akan merumuskan pendidikan yang bertujuan demi "aktualisasi potensi" khas individu dalam tindakan kreatif. Filsafat Pendidikan yang merujuk pada Filsafat Manusia lebih memprioritaskan nilai kemanusiaan, baru dari nilai itulah muncul moralitas tertentu. Maka, filsafat pendidikan (yang berlandaskan manusia) ini akan lebih memfokuskan diri pada empat pertanyaan yang mengarah pada penemuan prioritas nilai berikut ini:

- a) Apa sajakah nilai-nilai mendasar? Apa komitmen nilainya secara menyeluruh?
- b) Seberapa mendalamkah ia terikat pada nilai-nilai? Seberapa kuatkah komitmennya?



- c) Secara umum apa peringkat prioritas nilai-nilai itu, dan bagaimana kaitannya satu sama lain? Apa yang paling diperhatikannya, dan apa struktur nilai *value-gestalt* yang dihasilkan dari situ?
- d) Bagaimana individu yang bersangkutan memahami nilai-nilai itu dalam kaitannya dengan situasi yang dihadapinya? Apa relevansi situasional dari komitmen personal itu?

Kedua perspektif ini, ISPI dan al-Attas, dapat dipertimbangkan untuk dibuat sinergi. Bahwa pendidikan harus mengarahkan siswa menjadi warga negara yang baik memang diperlukan, karena takaran seseorang berilmu diantaranya dibuktikan dari perilaku keseharian sebagai warga negara atau warga masyarakat.

Namun praduga Al-Attas bahwa terlalu memfokuskan diri pada tujuan menjadi "warga negara yang baik" akan membuat

manusia lupa akan dirinya dan lupa akan tanggung jawabnya pada Yang Maha Kuasa juga patut dipertimbangkan kebenarannya. Sementara itu, dalam banyak kasus pendidikan Islam (sumber rujukan al-Attas) ilmu pendidikan yang menafikan tujuan menjadi "warga negara" pun akan menimbulkan masalah tersendiri. Karena itu layak dirumuskan sinergi antara keduanya, paling tidak dengan memasukkan Filsafat Manusia dalam kerangka ilmu yang diusulkan ISPI.

*Kedua*, ISPI merumuskan bahwa Ilmu Administrasi pendidikan sebagai ilmu yang dipengaruhi dua landasan filosofis: filsafat Negara (hubungan langsung) dan filsafat Pendidikan (dengan hubungan tak langsung). Jadi, dapat dikatakan bagi ISPI, pada dirinya Ilmu Administrasi Pendidikan tidak memiliki landasan filosofis tersendiri –landasan filosofisnya hanya "merujuk" pada filsafat pendidikan dan filsafat negara/ filsafat politik (atau yang lebih dekat lagi filsafat administrasi).

Filsafat Administrasi pendidikan dalam kerangka ini akan mengajukan perhatian pada dua pertanyaan mendasar dalam pendidikan. *Pertama*, Hubungan mendasar apakah yang ada antara sekolah dengan negara dan masyarakat? Bagaimana semestinya sasaran-sasaran pendidikan mengait ke tujuan-tujuan sosial dan tujuan-tujuan negara secara menyeluruh?; *kedua*, Apa implikasi hubungan itu dalam kaitannya dengan sifat dan susunan (organisasi dan hakikat) pengajaran? Apa sajakah tujuan-tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya tujuan-tujuan itu ditanamkan lewat kurikulum dan petunjuk pengajaran?

Kerangka Filsafat inilah yang kemudian dalam banyak hal dapat menjadi dasar dari perumusan filsafat Administrasi pendidikan. Karena Administrasi Pendidikan dalam banyak hal berbeda dengan tindak pendidikan murni. Sementara tindak pendidikan murni mendasarkan kegiatannya pada tujuan untuk manusia sebagai individu, administrasi pendidikan meletakkan pendidikan sebagai bagian dari

tujuan sosial bahkan bagian dari kebijakan lembaga (sosial atau negara)

### **Refleksi:**

Perumusan Filsafat Administrasi pendidikan (juga ilmu administrasi pendidikan) tidaklah mudah. Kedua ilmu ini (ilmu pendidikan dan ilmu administrasi pendidikan) memiliki tujuannya masing-masing, yang ketika disatukan berarti menyatukan kedua tujuan dari masing-masing ilmu. Jika tidak dihubungkan yang terjadi adalah keterhubungan yang tidak menyatu. Ilmu Administrasi Pendidikan hanya akan mengurus pengelolaan keorganisasian pendidikan yang pada momen tertentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Misalnya, ketika tujuan pendidikannya adalah untuk mendorong siswa agar menjadi manusia biasa (Pendidikan berlandas filsafat manusia) akan berhadapan dengan ilmu administrasi yang merujuk pada filsafat negara.

Untuk itulah perlu disusun rumusan filsafat Administrasi pendidikan yang merumuskan hubungan sinergis antara kedua ilmu yang berbeda ini.

## MERUMUSKAN KERANGKA FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Administrasi, menurut Orin B. Graff, dkk., adalah nama yang diberikan pada "kegiatan *koordinasi* dan *kontrol proses* dalam pencapaian tujuan". Proses administratif juga mencakup ukuran atas identifikasi dan perencanaan tujuan, meskipun dalam sebuah situasi demokratis, identifikasi dan penegakan tujuan sosial merupakan fungsi dari keseluruhan bangunan politik. Ketika administrasi memprakarsai proses dan prosedur-prosedur untuk identifikasi tujuan atau penggantian sesuatu, maka ia telah menjalankan fungsi kepemimpinan.

Proses administratif, yang membutuhkan sekelompok orang untuk membuatnya nyata, menjadi keharusan karena adanya kompleksitas masyarakat modern. Pemerintahan tidak lagi berupa wewenang seorang pimpinan atau seorang 'kepala suku'; pendidikan tidak lagi hanya merupakan proses informal pembelajaran dan imitasi. Administrasi pendidikan adalah proses kompleks yang penting yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari masyarakat yang kompleks. Dalam masyarakat yang demokratis secara umum administrasi mempunyai lima fungsi utama (Orin B. Graf, 1966):

- 1) Untuk membantu masyarakat menerjemahkan segala sesuatu ke dalam tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang konkret dan bisa diterima.
- 2) Untuk merelasikan unsur-unsur pendidikan dalam satu sistem yang disebut sekolah.
- 3) Untuk membuat alur umpan balik yang efektif sehingga evaluasi yang cukup bisa dihasilkan. Ini biasanya mencakup jalannya penelitian atas dua hal: a) meneliti seluruh data dan menghadirkannya dalam gambaran yang akurat; b) mengadakan berbagai percobaan untuk menmfaatkan hal-hal baru yang ditemukan dalam sains murni dan sosial dengan teori-teori belajar yang baru untuk menghasilkan situasi belajar dan mengajar yang berkembang.
- 4) Untuk memanfaatkan struktur, proses atau prosedur-prosedur baru yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau untuk merubah tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Untuk berkomunikasi dengan lembaga politik atas seluruh tahapan institusi pendidikan.

Lebih dari itu, hal ini mencakup dua cara komunikasi yang prosesnya tidak sesederhana seperti satu kelompok mengatakan pada yang lain, melainkan percakapan yang benar dan terus-menerus—sebuah dialektika yang mengarah pada pendidikan

Filsafat Administrasi Pendidikan dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari Filsafat Ilmu Pengetahuan. filsafat ilmu pengetahuan seperti telah didefinisikan di atas merupakan “cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara pemerolehannya”. Filsafat Ilmu Pengetahuan mengurus pertanyaan mengenai.

<b>Ontologi</b>	Apakah realitas itu dalam administrasi pendidikan? Apa realitas tertingginya?
<b>Epistemologi</b>	Apakah Kebenaran tertinggi administrasi pendidikanitu? Bagaimana kita bisa mengetahuinya?

<b>Aksiologi</b>	Apakah Kebaikan Tertinggi dalam administrasi pendidikan itu?
<b>Filsafat Manusia</b>	Apakah Tujuan Menjadi Manusia itu terkait dalam administrasi pendidikan? Apakah Kebenaran dan Kebaikan Tertinggi sebagai Manusia terhubung dengan administrasi pendidikan?
<b>Filsafat Pendidikan</b>	Pengetahuan macam apa yang diperlukan dan bagaimana semestinya ia ditanamkan?
<b>Filsafat Administrasi Pendidikan</b>	Pola pengaturan organisasi dan sumber daya seperti apa yang diperlukan dan bagaimana semestinya mengelola sumber daya itu demi pencapaian tujuan pendidikan?

## Rumusan Ontologi Filsafat Administrasi Pendidikan

Ontologi adalah bagian dari Filsafat Ilmu yang membicarakan mengenai:

- Apakah yang dianggap sebagai sumber kenyataan itu dalam suatu ilmu?
- Apakah obyek yang ditelaah oleh ilmu tersebut?
- Bagaimanakah hakikat dari obyek itu?
- Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan dan ilmu?

Istilah obyek material dan formal ini sebenarnya dapat dirujuk dari Filsafat Skolastik, dalam pandangan filsafat skolastik, obyek material adalah eksisten konkret seutuhnya yang merupakan sasaran perhatian (intensionalitas) subyek; obyek formal adalah ciri atau aspek khusus (bentuk) yang ditonjolkan untuk menyimak keutuhan eksistennya (Bagus, 2000: 731). Dalam hal ini, obyek adalah tujuan perhatian dari ilmu. Karena itu, eksisten (apa yang ada) harus dipahami secara murni sebagai eksisten (apa yang ada) bukan merupakan obyek, ia baru menjadi obyek apabila eksisten (apa yang ada)



itu sungguh-sungguh diketahui dan diinginkan oleh suatu ilmu.

Secara umum kedua jenis obyek ini dipahami sebagai berikut: obyek ilmu dapat dibedakan atas obyek materi dan obyek forma. Obyek materi adalah obyek yang menjadi pengamatan dari ilmu tertentu, sedangkan obyek forma adalah sudut pandang apa yang digunakan ilmu itu dalam memandang obyek materialnya. Misalnya, sosiologi dan antropologi memiliki obyek material yang sama yaitu manusia; namun obyek formalnya berbeda, sosiologi mengamati manusia dalam tatanan komunitasnya sementara antropologi mengamati manusia dalam kaitannya dengan budaya.

Lalu apa obyek material dan formal dari ilmu administrasi atau lebih spesifik lagi ilmu administrasi pendidikan?

Sebelum membicarakan apa obyek dari ilmu administrasi/pendidikan ada baiknya kita memahami jenis-jenis ilmu berdasarkan polanya dan obyek ilmu secara keseluruhan.

## 1. Pola-Pola Pengetahuan

Pada diri manusia terdapat empat jenis pola pengetahuan, yakni *tahu bahwa*, *tahu bagaimana*, *tahu tentang*, dan *tahu kenapa*. Pembagian pola ini dapat dijadikan dasar perumusan proses pengetahuan.

- a. *Pengetahuan bahwa* adalah pengetahuan tentang informasi tertentu. Misalnya kita mengenali pernyataan bahwa seseorang itu “tahu bahwa sesuatu itu terjadi”, “tahu bahwa ini atau itu memang demikian adanya”, “tahu bahwa apa yang dikatakan memang benar”. Jenis pengetahuan ini disebut pengetahuan teoritis, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini berkaitan dengan keberhasilan dalam mengumpulkan informasi atau data tertentu. Kekuatan pengetahuan model ini terletak pada informasi

- atau data yang dimilikinya.
- b. *Pengetahuan bagaimana* berkaitan dengan kemahiran atau keterampilan teknis dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena pengetahuan ini bersifat praktek, maka disebut juga pengetahuan praktis. Walaupun praktis, pengetahuan jenis ini punya landasan atau asumsi teoritis tertentu. Pengetahuan ini menyangkut manajemen, teknik, organisasi, dan sebagainya.
  - c. *Pengetahuan akan/mengenai* adalah pengetahuan sesuatu yang sangat spesifik menyangkut pengetahuan akan sesuatu atau seseorang melalui pengalaman atau pengenalan pribadi. Unsur yang paling penting dalam pengetahuan jenis ini adalah pengenalan dan pengalaman pribadi secara langsung dengan objeknya. Pengetahuan jenis ini memiliki ciri [1] memiliki tingkat objektivitas tinggi, [2] subyek mampu membuat penilaian tertentu atas obyeknya karena pengenalan dan pengalaman pribadi yang bersifat langsung dengan objeknya, [3] berkaitan dengan barang atau jenis objek tertentu.
  - d. *Pengetahuan mengapa* berkaitan dengan penjelasan, tidak hanya berhenti pada informasi yang ada sebagaimana pada tahu bahwa. Pengetahuan mengapa menerobos masuk ke balik data atau informasi yang ada. Pengetahuan ini berdasarkan refleksi, mengajukan sistem, atau analogi yang memungkinkan subyek mengaitkan dan menyusun berbagai data yang mungkin kelihatan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang mengagumkan. Inilah filsafat.

Ke-empat pengetahuan ini saling berhubungan satu sama lain. *Pertama*, pengetahuan-*bagaimana* merupakan penerapan praktis dari apa yang telah diketahui dari tingkat pengetahuan-*bahwa*. Setelah seseorang mengetahui sesuatu, dimungkinkan ia dapat

melakukannya. Atau dapat dikatakan, suatu pengetahuan mengenai bagaimana bertindak dapat disebut benar bila didasarkan pada pengetahuan bahwa, pengetahuan teoretis yang mendasari pengetahuan praktis.

*Kedua*, tahu-*bahwa* dikuatkan oleh tahu-*akan*. Pada bagian di atas telah dikemukakan bahwa tahu-*bahwa* dan tahu-*akan* memiliki obyek yang sama, yakni informasi. Perbedaannya pada tingkat kedalaman, tahu-*bahwa* baru tahap awal berdasar informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Untuk itu dibutuhkan penguatan melalui pengenalan dan pengalaman langsung secara pribadi dengan objek pengetahuan kita itu (tahu-*akan*). Proses ilmiah biasanya dimulai dari tahu-*bahwa* menuju tahu-*akan*. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial tidak seharusnya bertumpu pada teori-teori (tahu-*bahwa*) melainkan juga harus diperkuat dengan ilmu hasil observasi atau penelitian (tahu-*akan*).

*Ketiga*, tahu-*bagaimana* dalam aspek tertentu akan menjadi referensi bagi tahu-*akan*. Kata kunci dari tahu-*akan* adalah pengetahuan yang dihasilkan dari pengenalan dan pengalaman langsung, sedangkan tahu-*bagaimana* adalah praktik. Pada aspek tertentu, praktik memberikan pengalaman langsung terhadap realitas sehingga dapat menghasilkan tahu-*akan*.

*Keempat*, demi mendapatkan pengetahuan yang akurat, atau 'sebagaimana adanya' dibutuhkan "pengetahuan-*mengapa*". Untuk bisa tahu-*bagaimana*, dalam banyak kasus diperlukan tahu-*mengapa* sesuatu itu terjadi. Kemudian, dalam kasus lain untuk bisa memiliki tahu-*mengapa* sesuatu terjadi, diperlukan pengenalan pribadi atau 'tahu-*akan*, yaitu tahu secara mendalam tentang hal itu.



## 2. Realitas Obyek

Apakah obyek itu? Obyek memiliki berbagai macam definisi, tergantung pada perspektifnya. Bagus Lorens (2000: 730) mengajukan beberapa pengertian tentang obyek:

- 1) apa yang tersaji bagi indera kita. Sesuatu yang dapat dilihat, dapat diraba, dapat dikecap, dan sebagainya
- 2) apa yang tersaji bagi kesadaran dan karenanya kesadaran

menjadi sadar. “Objek” dapat menunjuk (a) benda (hal di dunia luar yang ada secara independen yang merangsang indra atau kesadaran kita untuk memperhatikan benda (hal) ini atau (b) isi pikiran kita sendiri yang diperhatikan dalam kesadaran

- 3) apa saja yang dapat dibicarakan (karenanya dapat disebut) dan khususnya sebagai sebuah kata benda yang mempunyai eksistensi substantif.

Dalam kaitannya dengan obyek material dan formal, Bagus (2000: 731) merumuskan obyek sebagai “Segala sesuatu yang menjadi sasaran pengarahannya suatu tindakan sadar dari subyek ilmu”.

Obyek ilmu pengetahuan dapat dikatakan nyata atau real jika sekurang-kurangnya mengandung tiga arti: yang nyata berarti lepas dari pikiran manusia, realitas dapat dinyatakan real jika memang dapat dikenal, dan yang real adalah yang menjadi perhatian banyak orang (Sony Keraf & Michael Dua, 2008: 81-82).

*Pertama*, yang nyata berarti lepas dari pikiran manusia. Ini berarti realitas ada secara bebas di luar pikiran manusia, berdiri sendiri. Metode ilmu pengetahuan merupakan salah satu cara menangkap apa yang ingin disampaikan alam kepada manusia. Karena itu, penelitian ilmiah bertujuan meneliti alam dan tidak membuat suatu perkembangan apa pun selain dari bergantung pada realitas yang dipelajari manusia dari alam. *Kedua*, meskipun dunia real yang dipelajari ilmu pengetahuan bebas dari pemikiran manusia, realitas itu sendiri harus dapat dikatakan real jika memang dapat dikenal. Realitas sebagai obyek ilmu pengetahuan adalah realitas yang dikenal, realitas yang tampak dan mempengaruhi ilmuwan.

Kedua pandangan ini mewakili cara pandang realisme dan idealisme. *Realisme* mensyaratkan bahwa kebenaran adalah yang obyektif, sesuai apa adanya; sedang *idealisme* mensyaratkan bahwa

pengetahuan itu subyektif dalam arti yang logis-rasional. Namun keduanya tak bisa dipisahkan, keduanya harus disintesis. Jika keduanya dipisahkan, akan ada dilema. *Jika realitas tidak lepas dari pemikiran manusia*, maka tak perlu ada metode ilmiah. Setiap orang tinggal merenungkan pikirannya sendiri tanpa harus berhubungan dengan realitas. Tidak perlu juga ada penelitian, karena penelitian mengandaikan adanya realitas yang lepas dari pemikiran manusia, realitas yang berada di luar diri manusia. Sebaliknya, *jika realitas tidak dapat terhubung dengan pemikiran manusia*, atau lepas bebas di luar pikiran manusia, berarti ia tidak dapat dikenal. Metode ilmiah akan berakhir pada kegagalan, karena realitas yang diteliti tidak pernah bisa dipahami. Pengetahuan manusia tidak lebih dari sekadar mimpi atau bayangan. Karena itu, dibutuhkan sintesis antara keduanya. Obyek ilmu pada satu sisi berada lepas dari pikiran manusia, namun ia sungguh-sungguh dapat dikenali pikiran manusia.

*Ketiga*, realitas yang dibicarakan ilmu pengetahuan adalah realitas publik, realitas yang menjadi perhatian banyak orang. Yang real dalam ilmu pengetahuan adalah yang terlepas dari apa yang dapat dipikirkan oleh individu dan yang menjadi informasi publik. Jadi, pengetahuan itu benar menurut satu individu tertentu melainkan bereferensi pada realitas dan mendapat persetujuan dari komunitas (intersubyektif). Jika pengetahuan tidak dilihat sebagai kenyataan publik, yang diterima dan disetujui oleh publik, maka pengetahuan akan menjadi pendapat pribadi yang pada akhirnya tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Sebaliknya, bila pengetahuan merupakan urusan publik maka pengetahuan itu (karena dipahami dan mengikuti logika pengetahuan publik) dapat berkembang lebih lanjut melalui penelitian ilmiah lain.

Kriteria pengetahuan dari obyek ketiga ini adalah intersubyektif, berdasarkan persetujuan komunitas ilmiah. Hipotesis apapun dapat dikemukakan oleh setiap orang tetapi itu tidak lebih dari suatu percobaan yang harus mendapat persetujuan para ilmuwan. Sekali

suatu teori diterima oleh komunitas, pada waktu tertentu, maka seseorang tidak dapat meragukannya lagi sampai ada suatu penelitian dengan problem yang lebih luas dan lebih mendalam.

Di samping berdasarkan jenisnya, obyek ilmu juga menerima sifat perubahan yang terus-menerus. Apa yang dapat kita kenali selalu berubah dari ketika teori tentang gejala itu dirumuskan. Ini berarti, jika ilmu tidak berubah maka teori yang ada tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada realitas. Maka letak kekuatan ilmu-ilmu yang obyeknya realitas (ilmu alam dan ilmu kemanusiaan) bukanlah pada kepastian hukum logis rasional (seperti segitiga adalah 180 derajat) melainkan tersedianya bukti (evidensi) dari pernyataan.

Karena realitas selalu berubah maka kepastian tidak dapat ditemukan. Sesuatu disebut benar bukan karena dia memiliki kepastian, melainkan karena dia memiliki bukti. Oleh karena itu ilmu kemasyarakatan dapat mengejar kepastian-nya dalam dua arti. *Pertama*, kepastian tentang pernyataan yang menjelaskan gejala-gejala yang diselidiki (apakah kebenaran pernyataan yang menjelaskan berbagai gejala itu memiliki bukti?); dan kepastian tentang kesimpulan yang ditarik sebagai suatu hukum yang berlaku umum (apakah kesimpulan yang dibuat itu diturunkan dari hukum ilmiah tertentu?).

### **Merumuskan Ontologi Ilmu Administrasi/Pendidikan**

Dari dua uraian mengenai pola pengetahuan dan realitas obyek kita mendapatkan beberapa kesimpulan awal. *Pertama*, ilmu administrasi (pendidikan) termasuk dalam *tahu-bagaimana* yang terkait dengan *tahu-mengapa* (filsafat tertentu), *tahu bahwa* (teori umum), dan *tahu-akan* (hasil pengalaman langsung). Pengalaman yang menjadi basis ilmu administrasi adalah pengalaman pengelolaan organisasi demi mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. *Kedua*, realitas obyek dari ilmu admini-

strasi/pendidikan, sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya, adalah realitas publik (bukan obyek individual) yang memiliki sifat kebenaran intersubyektif dan terus-menerus berubah. Karena itu kebenarannya tergantung pada ketersediaan bukti dan keterkaitannya dengan hukum ilmiah tertentu.

Jadi apa obyek dari Ilmu administrasi/Pendidikan?

Obyek materi filsafat ilmu pengetahuan adalah tindakan manusia dalam konteks sosial. Obyek ini juga menjadi obyek semua ilmu sosial, karena itu pada perkembangan awal ilmu administrasi menggunakan temuan sosiologi (teori Birokrasi Weber dapat dikategorikan sebagai bagian dari teori sosiologinya) atau ilmu psikologi (karena berurusan dengan tindakan dan motif tindakan). Sementara obyek formanya adalah perspektif khas ilmu administrasi (pendidikan) dalam memandang konteks sosial.

Lalu apa perspektif khas ilmu Administrasi? Administrasi dapat dirunut dari akar katanya: *ad* dan *Ministrae* (*ad* = intensif; *ministrae* berarti melayani, membantu, mengarahkan atau memenuhi). Berarti, ilmu ini memandang konteks sosial sebagai suatu kegiatan pelayanan, pengarahan pada tujuan tertentu secara intensif. Administrasi Pendidikan memiliki perspektif yang lebih sempit lagi, yaitu demi tujuan pendidikan, dan lokus yang juga tertentu, yaitu organisasi pendidikan. Jadi obyek forma administrasi pendidikan adalah pelayanan, pengarahan, dan *pengelolaan segala sumber daya demi tujuan pendidikan yang dilakukan secara sistematis*.

Pada rumusan tersebut terdapat beberapa kata kunci: *pengelolaan sumber daya, tujuan pendidikan, dan sistematis*.

Kata kunci pertama, *pengelolaan sumber daya*. Pengelolaan adalah ciri khas dasar dari ilmu administrasi, seperti dikemukakan Vivien dalam *Etudes Administratives* bahwa ilmu administrasi merupakan fungsi dari kegiatan membuat kebijakan/aturan yang



dilakukan negara. Negara menciptakan aturan/kebijakan dengan tujuan tertentu, kemudian kerja administrasi melakukan pengelolaan sumber daya agar sesuai dengan kebijakan tersebut. Di samping itu, Hegel dalam *the Philosophy Of Rights* memberikan imbalan bahwa administrasi bukan hanya sebagai pelayan kepentingan negara, administrasi juga berfungsi sebagai pelayan publik, sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani Agar arah kebijakan negara atau penguasa dapat terlaksana dengan baik demi kepentingan publik, maka harus ada yang mengelola kebijakan tersebut secara rasional:pengelolanya adalah para administrator.

Kata kunci kedua: *tujuan pendidikan*. Administrasi berfungsi melayani, membantu, mengarahkan dan memenuhi tujuan yang dikelolanya. Bila administrasi berada di bawah negara, maka tujuan negara yang akan dikelolanya. Ini akan berbeda ketika administrasi berada pada tujuan yang berbeda, misalnya tujuan pendidikan. Ini berarti ketika *locus* administrasi berubah maka tujuannya pun berubah. Kalaupun ilmu administrasi pendidikan merupakan perluasan dari administrasi publik, namun pendidikan memiliki tujuannya sendiri sehingga tujuannya pun akan berbeda.

Nicholas Henry dalam *Public Administration and Public Affairs*, dengan mengutip Robert T. Golembiewski, mengemukakan bahwa ilmu administrasi harus dipahami melalui *Locus* dan *Focus*. *Locus* adalah letak/kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan *focus* adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Hal ini kemudian menjadi patokan pengembangan ilmu administrasi. Misalnya Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya *Politics and Administration* menekankan bahwa *locus* administrasi berpusat pada birokrasi pemerintahan (*Government Bureucracy* ), sedangkan *focus*nya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas, atau prinsip-prinsip administrasi yang dianggap bebas nilai (berlaku untuk semua locus kerja administrasi).*Jadi, locus* administrasi pendidikan adalah organisasi dan kegiatan pendidikan sehingga seluruh prinsip-

prinsip kerja administrasi (*focus*) harus melayani tujuan pendidikan.

Nah, bila obyek formalnya adalah manusia dalam konteks pengarahan organisasi sosial pada tujuan tertentu secara intensif, maka ada beberapa pemikiran yang saling-silang di dalamnya. Tidak hanya pemikiran negara, seperti dikemukakan ISPI, namun juga terkait dengan manusia (bukankah kerja administrasi tergantung pada leadership dan kerjasama antar manusia?), sosial, atau juga ekonomi (bukankah kriteria efektif efisien dalam administrasi adalah konsep-konsep ekonomi?). Dengan demikian, rumusan Filsafat administrasi/ pendidikan ditentukan dari hubungan ilmu dan praktek administrasi dengan filsafat negara/politik, filsafat sosial/manusia, dan filsafat ekonomi --tentu saja ada juga kait kelindan dengan filsafat pendidikan. Ini dapat dipahami ketika kita menegaskan bahwa locus administrasi memiliki tujuannya sendiri dan keterkaitannya dengan pelbagai hal di luar kaitan dan tujuan kerja administrasi.

Kata kunci ketiga: *sistematis* adalah syarat dari suatu ilmu. Suatu pengetahuan yang sistematis adalah ilmu, melalui susunan sistematis ini suatu pengetahuan dapat dilakukan oleh siapapun dengan hasil yang sama dan karenanya dapat diajarkan pada pihak lain. Walaupun demikian kata kunci sistematis ini jarang dikemukakan dalam pendefinisian ilmu administrasi yang selama ini berkembang. Hal ini dapat dipahami karena syarat sistematis merupakan syarat mutlak yang pasti ada pada suatu ilmu.

Untuk dapat memahami obyek forma dari administrasi pendidikan ada baiknya kita mengamati sejumlah batasan administrasi pendidikan yang telah dikemukakan sejumlah ahli. Beberapa definisi administrasi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) administrasi sekolah sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan

- bersama pendidikan anak-anak (Oteng Sutisna, 1983: 17)
- b) administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-anak dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan (Robert E Wilson, 1966)
  - c) Administrasi sekolah adalah ilmu yang mempelajari penataan sumberdaya yaitu manusia, kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan sekolah secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan sekolah yang disepakati (Engkoswara, 1984).
  - d) Administrasi sekolah didefinisikan sebagai pengarahan, kontrol dan manajemen dari seluruh unsur kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekolah (Monroe, 1952:7)
  - e) Administrasi sekolah adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin (Calvin Grieder, 1961).

Pada sejumlah definisi ini terlihat unsur-unsur penting yang meliputi pengelolaan sumber daya dan tujuan pendidikan, atau ada unsur *locus* dan *focus*. Locus yang terutama dikemukakan dari definisi di atas adalah sekolah yang diasumsikan memiliki tujuan khasnya sendiri. Selain itu ada dikemukakan fungsi administrasi yaitu melayani atau mengelola. Hal lain yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah *focus* administrasi (dalam hal ini prinsip-prinsip administrasi), misalnya pada definisi Calvin Grieder bahwa tujuan pendidikan itu harus efektif dan efisien. Efektif, efisien, produktif, dan sejenisnya merupakan *focus* dari kerja administrasi yang oleh Greider dijadikan focus pada pengelolaan administrasi pendidikan.

Pada titik ini kita telah sampai pada rumusan obyek forma dari administrasi pendidikan, yakni ilmu yang menjalankan fungsi administrasi (pengelolaan sumber daya) demi tujuan locusnya (tujuan pendidikan) dengan focus tertentu (misalnya efektif, efisien, produktif, dsb).

## **Rumusan Epistemologi Filsafat Administrasi Pendidikan**

Selain memiliki obyek yang khas, suatu pengetahuan (atau praktek manusia) dapat disebut sebagai ilmu jika memiliki teori tentang pengetahuan yang jelas. Epistemologi berasal dari kata Yunani: *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (perkataan, pikiran, ilmu). *Episteme* sendiri berasal dari kata kerja *epistamai* yang berarti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara harfiah, *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk “menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya”.

Secara lebih dalam, J Sudarminta, dalam *Epistemologi Dasar* (2003: 18-19) mengemukakan batasan dan ruang lingkup dari epistemologi:

“...epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya? Manakah ruang lingkup dan batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui? Epistemologi juga bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta obyektivitasnya. Pertanyaan pokok “bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” mau dicoba dijawab dengan seksama.”

Dalam kaitannya dengan ilmu administrasi/pendidikan, tentulah pertanyaannya terkait dengan: Bagaimana ilmu administrasi itu dapat diperoleh (sebagai ilmu) dan bagaimana kebenarannya dapat diuji?

Apa prasyarat-prasyarat dan pengandain logis yang mendasari sejumlah kebenaran dalam ilmu administrasi dan bagaimana bentuk kebenarannya? Jadi, epistemologi memberikan alat-alat untuk memeriksa kebenaran yang dihasilkan dalam proses ilmiah suatu ilmu, sekaligus juga mengembangkan kebenaran itu sehingga ilmu tersebut dapat terus maju. Hal ini terkait dengan beberapa sifat dasar yang dimiliki epistemologi, yaitu evaluatif, normatif, dan kritis.

“Evaluatif berarti bersifat menilai, ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur, dan dalam hal ini tolok ukur kebenaran bagi kebenaran pengetahuan. Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui itu terjadi (seperti dibuat oleh psikologi kognitif), tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Sedangkan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui. Yang dipertanyakan adalah baik asumsi-asumsi, cara kerja atau pendekatan yang diambil, maupun kesimpulan yang ditarik dalam pelbagai kegiatan kognitif manusia.” (Sudarminta, 2003: 19).

Epistemologi dalam filsafat ilmu adalah epistemologi kritis. Yaitu epistemologi yang berangkat dari asumsi, prosedur, atau kesimpulan pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan kesimpulan ilmiah sebagaimana ditemukan dalam kehidupan (dalam hal ini praktek administrasi/pendidikan), lalu ditanggapi secara kritis asumis, prosedur, dan kesimpulan tersebut. Keyakinan-keyakinan dan pendapat yang ada dijadikan data penyelidikan untuk diuji kebenarannya di hadapan pengadilan nalar.

Tambah lagi, dalam kaitannya dengan ilmu sosial (seperti ilmu administrasi/pendidikan) obyek yang dikaji menentukan jenis epistemologinya. Berdasar obyek yang dikaji ada dua jenis epistemologi: individual dan sosial. Epistemologi individual kajian memfokuskan pada bagaimana struktur pikiran manusia sebagai individu bekerja dalam proses mengetahui. Sementara epistemologi sosial adalah kajian filosofis terhadap pengetahuan sebagai data sosiologis. Bagi epistemologi sosial, hubungan sosial, kepentingan sosial, dan lembaga sosial dipandang sebagai faktor-faktor yang amat menentukan dalam proses, cara, maupun pemerolehan pengetahuan.

Untuk dapat memahami beberapa bagian dari kajian epistemologi atau menemukan jawaban dari pertanyaan dasar epistemologi, yakni “bagaimana tahu bahwa saya tahu” berikut ini akan dikemukakan beberapa kajian dasar epistemologi. Pengetahuan bermula dari keraguan, atau sikap skeptis, kemudian berkembang lebih jauh dalam perumusan sistematis cara berpikir manusia yang semakin kompleks (dari rasionalisme sederhana, empirisisme, kritisisme, sampai fenomenologi dan seterusnya).

## **1. Skeptisisme**

Salah satu topik dari Filsafat Ilmu pengetahuan adalah persoalan mengenai: Apakah pengetahuan itu mungkin dicapai? Apakah kita benar-benar tahu? Bagaimana kita bisa merasa yakin bahwa kita tahu? Bukankah apa yang kita anggap kita tahu hanya tipuan belaka? Singkatnya, salah satu topik filsafat ilmu pengetahuan adalah “bagaimana kita tahu bahwa kita tahu?”

Khazanah Filsafat Ilmu Pengetahuan memiliki satu istilah atau aliran pemikiran yang bernama “skeptis”, yaitu keyakinan bahwa kita tidak pernah tahu tentang apa pun. Kaum skeptis menyatakan, jangan-jangan apa yang selama ini banyak diyakini kebenarannya ternyata kemudian terbukti salah. Istilah “skeptisisme” berasal dari

kata Yunani *skeptomai* yang secara harfiah berarti “saya pikirkan dengan seksama” atau “saya lihat dengan teliti”.

Skeptisisme ini telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi ilmu pengetahuan. Uaitu memikirkan dengan seksama setiap klaim dan bukti yang kita peroleh. Skeptis memang kerap dianggap dapat mengarahkan kita pada ketidadaan, terutama ketika sikap meragukan segala sesuatu itu bersifat ekstrem. Namun skeptisisme di sini dipahami sebagai metode untuk memeriksa dan melihat secara teliti sebelum menerima suatu kebenaran.

Sikap skeptis dalam dunia ilmiah dibutuhkan agar kita tidak terjebak pada “tahu-bagaimana” namun bergerak menuju “tahu-akan” atau bahkan “tahu-kenapa”. Sikap skeptis inilah yang kemudian mendasari seluruh kegiatan berfilsafat sehingga filsafat melahirkan sejumlah pemikiran yang terus berkembang.

## **2. Sumber Pengetahuan: Rasionalisme dan Empirisisme**

Sikap skeptis pada satu sisi menghasilkan penelitian terus-menerus, pada sisi lain dapat menghasilkan nihilisme pengetahuan. Ini persoalan yang diajukan kaum skeptis adalah “bagaimana kita tahu secara pasti tentang sesuatu”. Dalam sejarah filsafat, persoalan ini dijawab secara berbeda oleh dua aliran pemikiran: rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme dikenal sebagai filsafat kontinental karena tokoh-tokohnya terutama berasal dari Eropa daratan, seperti Rene Descartes, Leibniz, dan Baruch Spinoza. Sementara empirisisme lebih dikenal sebagai filsafat Inggris karena tokoh-tokohnya berasal dari Inggris, seperti John Locke, David Hume, dan Berkeley.

### ***a) Rasionalisme***

Ini dari rasionalisme adalah bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis, sumber

pengetahuan satu-satunya adalah akal budi manusia. Akallah yang memberi kita pengetahuan yang pasti benar tentang sesuatu. Konsekuensinya, kaum rasional menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita.

Tokoh utama Rasionalisme adalah Rene Descartes, filsuf Prancis, yang menyatakan, "*cogito ergo sum!*" (Saya berpikir maka saya ada). Descartes adalah filsuf yang percaya bahwa kerja akal dapat meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya yang sedang meragu, dapat mengantarkan kita pada pengetahuan yang jelas dan tepat (*clara et distincta*). Descartes menghendaki agar kita tetap meragukan untuk sementara waktu apa saja yang tidak bisa dilihat dengan terang akal budi sebagai pasti benar dan tak diragukan lagi; inilah yang disebut dengan keraguan metodis. Keraguan metodis ini berfungsi sebagai alat yang menyingkirkan semua prasangka, tebakan, dan dugaan yang menipu (sesuaitu yang menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan yang benar-benar punya dasar yang kuat).

Ada beberapa hal penting mengenai rasionalisme yang harus dicatat. *Pertama*, kaum rasionalis lebih mengandalkan geometri (ilmu ukur) dan matematika yang memiliki aksioma-aksioma umum lepas dari pengamatan atau pengalaman panca indera. Mereka meyakini bahwa aksioma umum itu ada dalam ide bawaan manusia, yang ada sejak awal dan bukan diperoleh dari pengalaman. Karena merujuk pada ilmu ukur dan matematika maka metode yang digunakan kaum rasionalis adalah metode deduktif. Proses pengetahuan, dengan metode deduktif, didapatkan dengan cara menurunkan pengetahuan-pengetahuan partikular dari prinsip-prinsip umum atau pertama yang bersifat pasti dan universal hasil dari pikiran manusia. Bagi kaum rasionalis, prinsip universal itu merupakan ide bawaan manusia; jauh sebelum manusia menangkap dengan panca indera obyek apapun di dunia ini, ia sudah mempunyai ide tertentu tentang



benda atau obyek tersebut.

*Kedua*, konsekuensinya kaum rasionalis meremehkan peran pengalaman dan pengamatan indera bagi pengetahuan. Pancaindera dianggap seperti kacamata, obyek yang sama bisa ditangkap merah atau putih sesuai dengan sudut pandang (kacamata) yang dipakai. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu, jadi pancaindera tidak memberikan pengetahuan yang benar.

Atas dasar itu bagi kaum rasionalis, semua pengetahuan adalah pengetahuan apriori yang mengandalkan penarikan kesimpulan silogisme. Apriori berarti pengetahuan itu sudah ada sebelum pengalaman atau pengetahuan yang ada tanpa harus melewati pengalaman. Ini berarti data dan fakta tidak begitu penting bagi munculnya pengetahuan. Pengetahuan ditentukan oleh kemampuan akal budi dalam menarik kesimpulan dari prinsip umum tertentu yang sudah ada dalam benak manusia.

### ***b) Empirisisme***

Empirisisme mencoba memberikan jawaban berbeda dari pertanyaan skeptis “bagaimana kita tahu secara pasti tentang sesuatu?” Bagi kaum empiris, sumber satu-satunya pengetahuan adalah pengalaman. Yang paling pokok untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar adalah data dan fakta yang ditangkap oleh pancaindera kita. Dengan kaya lain, satu-satunya pengetahuan yang benar adalah data dan fakta yang ditangkap pancaindera kita. Semua ide dan konsep yang dianggap benar sesungguhnya bersumber dari pengalaman manusia dengan obyek yang ditangkap melalui pancaindera. Akal budi hanya bisa berfungsi kalau punya acuan ke realitas atau pengalaman.

Ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi me-

nyangkut pandangan empirisisme. Pertama, kaum empiris mengakui bahwa persepsi atau proses penginderaan sampai tingkat tertentu tidak bisa diragukan. Yang patut diragukan adalah nalar manusia dalam menangkap dan memutuskan apa yang ditangkap oleh panca indera itu. Kedua, karena lebih menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia, kaum empiris jadinya lebih menekankan metode pengetahuan induktif (yaitu cara kerja ilmu yang mendasarkan diri pada pengamatan, pada eksperimen untuk bisa sampai pada pengetahuan yang umum dan tak terbantahkan). Pengetahuan atas dasar pengalaman disebut juga pengetahuan *a posteriori*. Ketiga, kepastian mengenai pengetahuan empiris harus dicek berdasarkan pengamatan, data, pengalaman, dan bukan berdasarkan akal budi.

### **c) Sintesis Rasionalisme dan Empirisisme**

Sintesis ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, ia mengajukan kritisisme dalam makna “menentukan batas-batas” kemampuan empirisisme dan rasionalisme dalam memproduksi pengetahuan. Di tangan Kant, pengetahuan disistematisasikan bahwa data indera tetap penting, namun tetap membutuhkan konstruksi mental (akal budi). Akal budi juga penting dalam memproduksi kebenaran namun sesekali juga membutuhkan peran indera.

Inti pemikiran Kant adalah pertanyaan: apa syarat-syarat pengetahuan manusia itu? Kant menamai sistem pemikirannya dengan nama kritis dalam makna bahwa akal budi harus menilai kemampuan dan keterbatasannya, dan hanya lewat kemampuan dan keterbatasannya itu akal budi dapat mengetahui sesuatu. Kant tidak lagi memperlakukan obyek (karena obyek pada dirinya bagi Kant adalah *das ding an sich* –sesuatu bagi dirinya saja), Kant membicarakan syarat-syarat subyek dalam mencapai pengetahuan.

“Jadi tak ada sesuatu pada dirinya sendiri, semuanya ditentukan oleh keaktifan pengetahuan subyektif. Dengan demikian manusia tidak perlu lagi memahami alam sebagai semata-mata alamiah, tetapi menggantinya sebagai “kebudayaan”, artinya alam yang telah dirasionalkan (menjadi isi pikiran rasional) manusia. Sejarah pun tak perlu lagi berjalan secara deterministik, sejarah harus dipahami secara kritis sebagai pengungkapan diri manusia secara rasional” (Sindhunata, 1982: 31)

Kemudian pada Imanuel Kant juga dirumuskan tentang tindakan, terutama dalam rumusannya mengenai rasio praktis. “Rasio praktis adalah dasar moralitas dan hukum. Dalam konsep rasio praktis ini Kant mengandaikan subjek tindakan sebagai sesuatu yang menimbang-nimbang secara sendirian apa yang seharusnya dia lakukan. Subyek otonom ini menimbang-nimbang, maksim tindakan manakah yang sekiranya legitim sebagai norma penetapan undang-undang (*Gesetzgebung*) untuk semua orang. Kant lalu merumuskan maksim tindakan itu dalam *imperatif kategorisnya* yang termasyhur itu, “Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga maksim kehendakmu kiranya dapat berlaku setiap saat sekaligus dapat ditetapkan sebagai suatu undang-undang yang bersifat universal”. (Budi Hardiman, 2009: 29).

Masalahnya adalah pemikiran Kant terlalu monologal (tidak melibatkan pihak lain selain dialog dengan dirinya sendiri). Baik pengetahuan atau rumusan tindakan tidak dihasilkan dalam dialog dengan subyek-subyek lain, yang berakibat pada pemusatan undang-undang pada pemegang keputusan saja. Hal ini dapat dituduh menyembunyikan tendensi-tendensi roraliter, karena pendapat seorang pemikir diterapkan begitu saja pada kompleksitas sosial. Efek dari teori Kant ini tampak pada kecenderungan filsafat negara dan teori politik (tentu saja termasuk di dalamnya adalah administrasi) yang tertutup dari dialog atau komunikasi dengan masyarakat.

### 3. Kebenaran Ilmiah

Keseluruhan proses pengetahuan (dengan nalar rasional, empiris, kritisisme, dst) itu pada akhirnya memproduksi kebenaran ilmu. Pembicaraan tentang pengetahuan tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kebenaran. Karena, pengetahuan selalu mengandung kebenaran dari apa yang diketahui.

Lalu apa itu kebenaran? Sejarah filsafat sekurang-kurangnya melahirkan empat teori kebenaran, yaitu kebenaran sebagai persesuaian (korespondensi), keteguhan (koherensi), pragmatis, dan performatif.

***Kebenaran korespondensi.*** Teori ini dapat dikatakan sebagai berasal dari Aristoteles. Filsuf Yunani Kuno ini menyatakan, “adalah salah jika menyatakan hal yang ada sebagai tidak ada, atau yang tidak ada sebagai ada; dan adalah benar jika menyatakan yang ada sebagai ada, dan yang tidak ada sebagai tidak ada”. Teori kebenaran Korespondensi adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Jadi, suatu pernyataan dianggap benar kalau apa yang dinyatakan di dalamnya berhubungan atau punya keterkaitan (*correspondence*) dengan kenyataan yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Sempulnya, teori harus selaras dan terhubung dengan realitas.

Ada beberapa catatan mengenai teori kebenaran ini. *Pertama*, teori ini sangat ditekankan oleh aliran empirisme yang mengutamakan pengalaman dan pengamatan inderawi sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Dengan demikian teori ini mengutamakan cara kerja dan pengetahuan aposteriori, yaitu pengetahuan yang terungkap hanya melalui dan setelah pengalaman dan percobaan empiris. *Kedua*, teori ini cenderung menegaskan perbedaan antara subyek dan obyek, antara si pengenal dan yang dikenal –walaupun kebenaran obyek lebih ditekankan. *Ketiga*, teori ini sangat menekankan bukti (*evidence*) bagi kebenaran suatu pengetahuan.

***Kebenaran Koherensi.*** Menurut teori ini, kebenaran bukanlah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, melainkan ada dalam hubungan antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Dengan kata lain, pernyataan itu benar bila pernyataan itu cocok dengan sistem pemikiran yang ada. Maka, kebenaran sesungguhnya hanyalah berkaitan dengan implikasi logis dari sistem pemikiran yang ada.

Beberapa catatan yang dapat diberikan mengenai kebenaran koherensi. *Pertama*, teori ini digunakan oleh aliran rasionalis-logis dengan mengandalkan cara kerja deduktif. *Kedua*, teori kebenaran ini lebih menekankan kebenaran dan pengetahuan apriori, pencarian validasi yang dipentingkan.

Pertentangan kebenaran korespondensi dan koherensi ini kemudian didamaikan oleh Imanuel Kant. Bagi Kant, baik akal budi maupun pancaindera mempunyai peran penting untuk melahirkan pengetahuan manusia. Karena itu syarat mutlak bagi kebenaran adalah sekaligus logis dan memiliki validasi dalam dunia nyata.

***Kebenaran Pragmatis.*** Teori ini dikembangkan oleh para filsuf Pragmatis dari Amerika, seperti Charles Pierce Sanders dan William James. Bagi kaum pragmatis, kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Jadi, ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar adalah bila ia berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling memungkinkan seseorang (berdasarkan ide itu) melakukan sesuatu yang paling berhasil dan tepat guna. Kebenaran bagi kaum pragmatis menyangkut “pengetahuan bagaimana”, yang mengantarkan pengetahuan untuk memperbaiki atau menciptakan sesuatu.

Peirce mengatakan bahwa ide yang jelas dan benar mau tidak mau mempunyai konsekuensi praktis pada tindakan tertentu. William James menyatakan teori kebenarannya dari teori tentang berpikir. Bagi James, fungsi berpikir bukanlah demi menangkap kenyataan

tertentu saja, melainkan untuk membentuk ide tertentu demi memuaskan kebutuhan atau kepentingan manusia. Karenanya, bagi James, sesuatu ide dianggap benar bila ada perbedaan praktis (kegunaan) dari ide itu dibandingkan dengan ide lain yang dianggap tidak benar.

***Kebenaran Performatif.*** Teori ini terutama dianut oleh filsuf Frank Ramsey, John Austin, dan Peter Strawson. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Kebenaran performatif menuntut pembicaraannya untuk merealisasikan apa yang diucapkannya. Misalnya ada pernyataan, “Dengan ini saya mengangkat Anda menjadi gubernur!”, lalu setelah itu yang bersangkutan menjadi gubernur, tercipta realitas yang dinyatakan. Kebenaran performatif adalah kebenaran yang kebenarannya ditentukan setelah pernyataan itu dikemukakan.

Perencanaan dalam aktivitas administrasi dalam banyak hal dapat dikategorikan sebagai kebenaran performatif. Rencana akan dianggap benar bila dilaksanakan, sudah terbukti. Namun perencanaan bisa juga dianggap sebagai kebenaran pragmatis, karena dalam perencanaan terdapat keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan sesuatu.

**Aspek epistemologi dalam filsafat ilmu** ini akan memengaruhi metodologi pengembangan dan penelitian suatu ilmu. Demikian pun dengan ilmu administrasi. Apa yang menjadi dasar pencarian atau perumusan pengetahuan ilmu administrasi akan menjadi dasar bagi metodologi penelitian dan pengembangan ilmu administrasi.

Sekarang kita kembali pada ilmu administrasi pendidikan: apa atau bagaimana epistemologi ilmu administrasi pendidikan?

Seperti telah dikemukakan pada bagian ontologi bahwa: pertama, ilmu administrasi (pendidikan) merupakan ilmu tentang *tahu-bagaimana* --yang terkait dengan *tahu-mengapa* (filsafat tertentu), *tahu bahwa* (teori umum), dan *tahu-akan* (hasil pengalaman

langsung). Pengalaman yang menjadi basis ilmu administrasi adalah pengalaman pengelolaan organisasi demi mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. *Kedua*, realitas obyek dari ilmu administrasi/pendidikan, sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya, adalah realitas publik (bukan obyek individual) yang memiliki sifat kebenaran intersubyektif dan terus-menerus berubah. Karena itu kebenarannya tergantung pada ketersediaan bukti dan keterkaitannya dengan hukum ilmiah tertentu; namun di samping itu karena terkait dengan tujuan pendidikan yang berfokus pada manusia maka kebenaran ilmu administrasi pendidikan pun berkenaan dengan hal-hal kualitatif (*verstehen*).

Pada tahap awal, ilmu administrasi merupakan bagian dari ilmu sosial positivisme, sehingga berkembanglah metode penelitian yang bersifat pengukuran. Kemudian pengaruh psikologi (yang bersifat pragmatis) membuat administrasi menggunakan metode pengembangan keilmuan dengan eksperimen dan pengukuran sikap atau motivasi. Pada saat ini, terutama ketika ilmu administrasi dikaitkan dengan etika, komunikasi, nilai publik, kecenderungan politis, dan sebagainya akan menghasilkan metode yang lebih kompleks. Tidak hanya kuantitatif yang mengukur, atau kualitatif biasa, melainkan juga melibatkan seluruh metode pengembangan ilmu dari riset partisipasi, *Research and Development*, hermeneutika, etnometodologi, atau bahkan pendekatan filosofis dan agama.

### **Rumusan Aksiologi Filsafat Administrasi Pendidikan**

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunan *axios* (layak, pantas), dan *logos* (ilmu, studi mengenai). Jadi aksiologi merupakan analisis nilai-nilai atau studi filosofis tentang 'hakikat nilai-nilai'. Studi aksiologi pada ilmu biasanya dikaitkan dengan etika (tata aturan nilai baik buruk dari tindakan). Dari sini kita dapat simpulkan bahwa persoalan aksiologi terkait dengan etika

administrasi.

Mari kita rumuskan dengan melakukan rincian terlebih dahulu:

- Etika membicarakan masalah nilai, dan moral, bersifat abstrak dan berkenaan tentang *baik* dan *buruk* ;
- Administrasi mengemukakan masalah keputusan dan tindakan, konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (*get the job done*).
- *Etika Administrasi* berkenaan dengan bagaimana bagaimana gagasan-gagasan administrasi ---seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas--- dapat melibatkan etika dalam prakteknya; dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika -- mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi.

Rumusan langsung mengenai etika administrasi belum berkembang pada tahap awal. Kita tahu itu terjadi karena administrasi pada awalnya justru menolak adanya nilai, ini terlihat dari pemikiran Taylor, Wilson, Weber. Baru pada saat ilmu administrasi mempertimbangkan aspek manusia, pembicaraan mengenai etika jadi diperlukan. Cooper (1990) menyatakan bahwa nilai-nilai adalah jiwanya administrasi Negara, Frederickson (1994) mengatakan nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi, kemudian sebelumnya Waldo (1948) menyatakan “siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai, dan siapa yang mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai” (Ginanjari, 1996:3).

Rumusan konsep etika ini semakin dibutuhkan pada dasawarsa tahun 1970-an, beriringan dengan munculnya neo-liberalisme dan dimulainya New Public Administration (NPA). Paling tidak ada tiga hal yang menjadikan pembicaraan etika jadi penting di era NPA, (1) NPA menghilangkan dikotomi politik-administrasi, (2) NPA telah menja-



dikan aspek kemanusiaan dan hubungan antar manusia yang adil sebagai tema sentral, (3) orientasi NPA yang tidak hanya untuk Negara namun juga untuk pebisnis dan publik. Keterkaitan pebisnis ini dapat saja mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepentingan, sehingga pertimbangan nilai baik dalam kinerjanya menjadi penting menjadi pertimbangan.

Melalui kajian etika administrasi ini, ilmu administrasi tidak diletakkan sebagai ilmu bantu penyelenggaraan negara saja melainkan ilmu kemanusiaan yang dilakukan dan difungsikan untuk manusia. Administrasi, dengan demikian, merupakan masalah manusia dan kemanusiaan, karena itu nilai baik dan buruk harus menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan administrasi. NPA dan NPS telah mengevolusi diri dari anggapan organisasi sebagai mesin menjadi relasi anatr manusia yang terbuka dan harus adaptable. Subyek NPA dan NPS adalah manusia, demikian pula obyeknya. Karena itu, persoalan etika ada di dalam input, proses, output, dan transformasinya.

Untuk dapat merumuskan kajian etika ini ada beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan. Yaitu, pendekatan teleologis dan deontologis.

### 1. Pendekatan *teleologi*

Telos berarti tujuan. Pendekatan *teleologi* berarti kebaikan diukur berdasarkan tujuannya, dari nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, dan dari dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks administrasi negara, Ginanjar (1996) menyatakan bahwa pendekatan teleologis mengenai baik dan buruk diukur dari pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan, pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat atau perwujudan kekuasaan organisasi, atau apapun yang menjadi tujuan dari administrasi.

Ada dua kategori etika administrasi, yakni pribadi dan kefaedahan untuk orang banyak. *Pertama, ethical egoism*, yaitu etika yang mengembangkan kebaikan hanya untuk dirinya saja. Pelaksanaan administrasi sangat mungkin hanya berorientasi pada mempertahankan kekuasaan dan *survival* pribadi administrator pemerintah saja. *Kedua, ethical utilitarianism*, yang meyakini bahwa baik dan benar tak cukup untuk diri sendiri namun juga harus untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini sudah berakar sejak lama, semua agama mendorong munculnya altruism ini, lalu pada abad ke-19 pemikiran ini diusung oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mills.

Mari kita lihat prinsip penerapan etika teleologis ini. Yang baik adalah kemanfaatan dan kefaedahan dari tindakan administrasi. Pada sisi lain, etika ini memberi peluang untuk mementingkan hasil daripada proses dan input, karena itu dalam proses pemerintahan memperhatikan nilai-nilai moral tidak jadi pertimbangan utama. Yang penting, bagi etika ini, adalah konsekuensi dalam keputusan dan memberikan kefaedahan bagi masyarakat. Contoh sederhana, membunuh tidaklah bermoral (tidak baik dan benar), namun membunuh musuh yang mengancam suatu Negara adalah benar dan perlu karena memberikan kemanfaatan dan kefaedahan bagi Negara itu.

Kepentingan umum (*public interest*) merupakan ukuran penting menurut pendekatan ini. Di sini pun ditemui pula berbagai masalah etis yang perlu diperhatikan (Ginanjar, 1996). *Pertama*, siapa yang menentukan bahwa sasaran, ukuran, atau hasil yang dikehendaki itu memberikan kefaedahan kepentingan umum dan bukannya kepentingan si pengambil keputusan sendiri (atau kelompoknya, atau kelompok yang ingin diuntungkan). *Kedua*, di batas antara hak perorangan dengan kepentingan umum, tanpa pembedaan tajam antara keduanya akan timbul masalah pelanggaran hak asasi. *Ketiga*, bagaimana membuat perhitungan yang tepat bahwa langkah-langkah yang dilakukan akan menguntungkan kepentingan umum dan bukannya merugikan kehidupan orang banyak.

Kerumitan ini dapat diatasi bila semua pengambil keputusan sedari menyadari perlunya pertimbangan utilitarianisme ini. Kemudian hal yang paling penting pelibatan kepentingan public menjadi prinsip dari semua praktek administrasi, pada titik ini NPS menjadi model pelaksanaan administrasi yang penting.

## 2. Pendekatan Deontologis

Deontologis menekankan bahwa “kebenaran itu ada dalam dirinya” bukan pada “akibat atau konsekuensi dari tindakan”. Nilai moral itu baik karena baik, bukan karena memiliki efek baik. Karena itu kebaikan ditentukan dari ketaatan melaksanakan nilai-nilai moral yang mengikat di masyarakat. Immanuel Kant (1724-1809) menyebut etika ini sebagai bersifat imperatif dan kategoris, yang tidak membenarkan pelanggaran atasnya untuk tujuan apa pun, meskipun karena itu masyarakat dirugikan atau harus jatuh korban.

Fox (1994) mengemukakan tiga pandangan etika administrasi deontologis. *Pertama*, administrasi negara secara proaktif harus mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial (*social equity*). Etika ini muncul pada NPA (“Administrasi Negara Baru”) seperti dikemukakan Frederickson dan Hart, (1985). Keadilan social sedari awal jadi nilai yang tidak bisa ditawar, keadilan social bukan sebagai efek atau konsekuensi namun sedari awal sudah dijadikan prinsip. Dasar dari etika ini adalah bahwa masalah utama oleh administrasi negara modern adalah ketimpangan antara yang kaya-yang miskin, yang memiliki pengetahuan-yang terbelakang, yang terorganisir-yang mandiri, yang memperoleh posisi-yang oposisi. Menjadikan keadilan social sebagai prinsip nilai akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan ini.

*Kedua, regime values* atau *regime norms*. Nilai mengenai apa yang baik dan penting niscaya ada pada suatu Negara atau masyarakat. Nilai-nilai itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai

benar pada dirinya sehingga menjadi standard moral masyarakat tersebut. Karena itu etika administrasi negara harus mengacu kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara yang bersangkutan dan nilai moral masyarakatnya.

*Ketiga*, tatanan moral universal atau *universal moral order*. Jika regime values mengandaikan baik-tidak baik berdasarkan pada masyarakat dalam lingkup suatu Negara, maka universal moral berdasarkan nilai-nilai moral sebagai yang bersifat universal. Administrator publik harus menjadikan nilai-nilai moral universal ini sebagai dasar kinerjanya. Di sini ada keyakinan bahwa nilai universal ini akan melingkupi *regime norm* dan keadilan social. Walaupun ada juga yang meragukan asumsi ini terutama akrena beragamnya nilai berdasarkan ragam kebudayaan suatu masyarakat.

### **3. Etika Perorangan dan Etika Organisasi**

Teori etika teleologis dan deontologis adalah teori etika umum yang menjadi rujukan perumusan etika organisasi. Etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban-kewajiban organisasi, seperti perlunya mempertimbangkan keadilan social pada NPM. Etika organisasi ini menjadi dasari bagi etika professional dan membentuk etika perorangan.

Seorang administrator adalah juga manusia, sekaligus pelaku profesi tertentu. Etika perorangan menentukan baik atau buruk dalam perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisasi. Sementara etika professional, lebih sempit dibandingkan etika perorangan, berkaitan dengan pekerjaan atau profesi. Etika profesional ini pada profesi tertentu dilembagakan dalam apa yang umum disebut kode etik (seperti kode etik dokter, hakim, pengacara, wartawan, dll).

Etika perorangan dan etika professional ini terkait dengan etika kebajikan (*ethics of virtue*) atau karakter yang dikehendaki dari seorang administrator. Konsep ini berbeda dari etika sebagai aturan (*ethics as rules*). Etika sebagai aturan biasanya dihasilkan dari peraturan dan kultur organisasi. Etika kebaikan ini bertumpu pada karakter individu yang dapat mengendalikan peran seseorang di dalam organisasi. Karakter individu ini dapat menjamin proses pencapaian tujuan organisasi senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Nilai kebajikan individu ini biasanya disusun berdasarkan hierarki antara nilai-nilai pokok (*cardinal values*), dan nilai turunan (*derivative*). Ini berarti ada nilai pokok yang menjadi prinsip dan menurunkan nilai-nilai lainnya. Pembicaraan nilai-nilai pokok ini penting dilakukan agar tidak semua hal dibicarakan dan diamati. Ada beberapa pendapat mengenai nilai pokok dalam kebajikan individu seorang administrator. Frankena (1973) meyakini ada dua kebajikan pokok (*cardinal virtues*) seorang administrator, yaitu *benevolence* (kebajikan) dan *justice* (keadilan). Kebajikan yang dimaksud Frankena adalah meliputi cinta, keberanian, kesederhanaan, kejujuran, rasa terima kasih, dan peduli.

Semenatra Hart mengatakan bahwa yang menjadi nilai pokok adalah *eudaimonia* dan *benevolence*. *Eudaimonia* (*eu* = baik, *daimon* = jiwa, ruh, atau diri) adalah prinsip kebahagiaan sebagai hasil dari perjuangan untuk mencapai aktualisasi diri. Proses aktualisasi diri ini sangat dipengaruhi oleh bakat, nilai dan kebutuhan dari individu dalam menjalani hidup. Bagi Hart adalah semua manusia dilahirkan dengan potensi unik dan memiliki tujuan untuk mengaktualisasikan potensi uniknya itu. Potensi yang dimaksud Hart adalah kebaikan moral dan bakat unik manusia. *Eudaimonia* bagi Hart tercapai ketika individu dapat mengaktualisasikan dirinya etis. Inilah nilai pokok pertama bagi administrator. Sedangkan nilai pokok kedua adalah *benevolence* yang diartikannya sebagai “the love of other”.

Dari dua nilai pokok ini, Hart (1995) menegaskan bahwa administrator yang bajik (*virtuous administrator*) adalah yang mengupayakan kebajikan menjadi sentral dalam karakternya sehingga dapat membimbing perilaku organisasi. Tidak hanya itu saja, seorang administrator yang bajik berkewajiban moral untuk mengupayakan agar kebajikan juga menjadi karakter mereka yang bekerja di bawahnya. Walaupun demikian, suatu kebajikan tidak bisa dipaksakan, eudonomia harus lahir sebagai aktualisasi diri dari diri masing-masing individu (*voluntary observance*). Untuk itu pendidikan diperlukan agar semua orang dapat mengaktualisasikan kebaikan dirinya. Di samping pendidikan, yang paling penting adalah seorang administrator harus memberikan keteladanan.

## Refleksi

Secara umum ilmu administrasi dapat dipahami sebagai kegiatan pengkoordinasian interaksi manusia menuju tujuan tertentu, yang telah disepakati bersama. Secara khusus ilmu administrasi pendidikan memiliki karakteristik (prinsip dan teori) yang sama, perbedaannya pada lokusnya. Namun perbedaan pada lokus akan berkonsekuensi pada perubahan fokusnya juga. Misalnya teori-teori administrasi/manajemen industri tidak serta merta dapat diterapkan pada administrasi sekolah, terutama karena ada perbedaan obyeknya. Untuk dapat menerapkan teori administrasi industri dibutuhkan penyesuaian tertentu.

Atas dasar pertimbangan itu, maka rumusan filsafat Ilmu Administrasi Pendidikan dapat diwujudkan sebagai turunan dari ilmu sosial (karena terkait dengan interaksi sosial), Ilmu humaniora (karena mengelola manusia), dan ilmu pendidikan (karena sifat lokusnya adalah pendidikan). Jadi bila hendak dirumuskan sifat dasar ontologinya, objek materialnya –sama dengan administrasi secara umum, adalah kegiatan pengkoordinasian interaksi manusia menuju tujuan tertentu, yang telah disepakati bersama; sedangkan obyek formalnya

merupakan perspektif pendidikan terhadap obyek material. Ini berarti kekhasan dunia pendidikan yang berurusan dengan manusia (guru dan siswa) serta tujuan-tujuan tertentu menjadi fokus utama dari ilmu administrasi pendidikan.

Secara epistemologis, ilmu administrasi adalah ilmu tentang “bagaimana sesuatu terjadi”, di sini ada unsur rekayasa. Karena ada rekayasa ini maka sejak awal ilmu administrasi bertumpu pada eksperimen dan pengukuran positivistik-pragmatik. Kecenderungan ini mengarahkan riset ilmu administrasi lebih menggunakan pendekatan kuantitatif (*erklaren*) yang akan berhadapan dengan sifat dasar manusia yang tidak semuanya dapat dikuantifikasi, apalagi jika lokus administrasinya adalah pendidikan. Untuk itu, unsur dan substansi manusia mendapatkan titik tekan utama dalam pengembangan keilmuan Ilmu administrasi pendidikan. Ini berarti pendekatan kualitatif harus diutamakan untuk mengimbangi kecenderungan kuantitatif.

## PEMIKIRAN FILSAFAT KLASIK DAN ADMINISTRASI

*“Praktek tanpa teori adalah untuk orang idiot dan gila, sedangkan teori tanpa praktek hanya untuk orang-orang jenius”.*

(Dr. Gunning)

Orin B Graff memfokuskan pembahasan filsafatnya pada beberapa aliran pemikiran klasik, yaitu idealisme, positivisme, empirisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Graff kemudian menguraikan hubungan antara aliran-aliran klasik itu pada praktik administrasi dan administrasi sekolah.,

Ada beberapa prinsip dalam kerangka berpikir Orin B Graff. *Pertama*, Bila filsafat tidak bisa langsung memberi kejelasan pada suatu peristiwa, setidaknya membuat orang mampu memberi penilaian. Dengan demikian, filsafat seharusnya memperteguh keyakinan-keyakinan yang matang, dan membantu mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan terhadap kemanusiaan.”

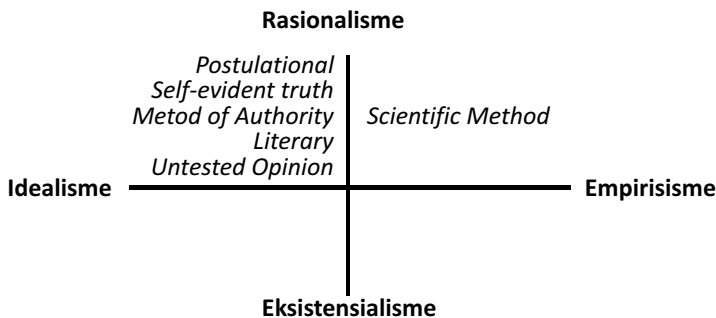
*Kedua*, Prinsip Pengetahuan apapun terhubung dengan cara pandang seseorang akan lingkungannya (pemikiran dan persepsi). Cara pandang, cara berpikir dan persepsi pada dunia akan memandu orang tersebut pada pandangan mengenai *apa itu masalah, bagaimana menghadapi masalah, dan bagaimana mengevaluasinya*. Semuanya berkenaan dengan cara berpikir dan persepsi. Filsafat



banyak mengkaji mengenai cara berpikir ini, karena itu pengenalan (bahkan penguasaan) kajian filsafat sangat dibutuhkan bagi kegiatan keilmuan apapun –dalam hal ini administrasi pendidikan. Salah satu alasan pentingnya adalah praktek administrasi pendidikan merupakan kegiatan memecahkan masalah demi mencapai tujuan tertentu, yang kesemuanya itu membutuhkan pengetahuan (informasi yang relevan) dan kekritisan yang menyelesaikan masalah.

Apalagi saat ini, pengetahuan (atau informasi) menjadi penentu kehidupan, maka kemampuan seseorang --dalam memilih atau memilah informasi dan ilmu pengetahuan mana yang dapat memberikan keuntungan, mendatangkan manfaat, membantu menetapkan keputusan dalam kondisi yang berbeda-beda-- sangatlah dibutuhkan bagi pelaku administrasi. Dalam kasus ini, filsafat ilmu pengetahuan memberikan jalan untuk melakukan kalifikasi gaya pemikiran dan memberikan jawaban tentang jalan mendapatkan pengetahuan yang tepat dan tentang sumber pengetahuan yang dapat digunakan bagi suatu masalah.

D.R Cooper dan P.S. Schindler dalam *Bussiness Research Methods*, (McGraw-Hill, Singapura, 1998) membuat diagram klasifikasi pemikiran yang digunakan dalam praktek administrasi/manajemen dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Klasifikasi itu adalah sebagai berikut:



Pada bagan ini, Cooper memperlihatkan sejumlah metode berpikir yang biasa dilakukan dalam kegiatan manajerial lalu meletakkan metode-metode itu dalam kaitannya dengan gaya pemikiran filosofis. Pada garis vertikal terdapat dua gaya berpikir: rasionalisme (*formal structure proofs*) dan eksistensialisme (*informal process*); kemudian pada garis horizontal terdapat gaya pemikiran idealisme (*highly interpretative ideas*) dan empirisisme (*observable, concrete ideas*). Untuk dapat memperjelas bagan ini, akan dikemukakan beberapa catatan berikut:

*Empirisisme*, aliran ini berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan membuat prediksi melalui observasi terhadap yang nyata ada. Empiris menegaskan bahwa observasi dan penentuan sejumlah proposisi harus didasarkan atas pengalaman inderawi dan didapatkan dari pengalaman tertentu melalui penerapan metode logika induktif (di sini menggunakan alat bantu statistika). Empirisisme tidak hanya menggunakan proses berpikir induktif, proses berpikir deduktif pun biasa digunakan melalui penggunaan sejumlah teori atau konsep yang telah diakui validitasnya.

*Rasionalisme*, aliran ini meyakini bahwa sumber utama ilmu adalah akal, proses berpikir dan proses pemberian makna secara sistematis terhadap sesuatu. Ilmu pengetahuan didapat melalui mekanisme kerja akal dalam merekonstruksi hubungan *causal-effect* antar beragam variabel di alam realitas. Rasionalisme meyakini bahwa alam realitas ini memiliki hukum keteraturan, dengan ditemukannya hukum keteraturan ini kaidah sebab akibat akan dapat diterapkan (digunakan untuk memahami dan mengendalikan) alam realitas.

*Eksistensialisme*, adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya aktualisasi eksistensi manusia. Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang berbeda dari makhluk lain, manusia itu khas dalam cara beradanya di dunia. Bila makhluk lain berada dengan cara menempati ruang waktu begitu saja, manusia

menempati ruang dengan terus memberi makna bahkan sambil memengaruhi ruang itu.

*Idealisme*, adalah aliran filsafat yang meyakini adanya sesuatu yang ideal dalam diri manusia (juga dalam suatu tradisi) yang menjadi dasar kehidupan dan pengetahuan manusia. Kebahagiaan manusia dapat dicapai bila hal-hal ideal itu dirujuk dan diwujudkan dalam realitas.

### **Kuadran: Rasionalisme-Idealisme**

Pada kuadran ini terdapat *Postulation*, *Self Evident Truth*, dan *Method of Authority*.

*Postulation*, adalah cara berpikir yang berdasarkan penetapan sejumlah postulat. Yang dimaksud postulat adalah (1) prinsip atau pernyataan dalam suatu teori ilmiah yang dijadikan sebagai fondasi bagi pernyataan lainnya; 2) asumsi, perkiraan, atau hipotesa yang diakui atau ditetapkan sedemikian rupa sehingga suatu studi bisa dilaksanakan dengan sistematis. Tujuan dari gaya pemikiran ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang sebuah struktur teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena lainnya yang diasumsikan memiliki sifat dan bentuk yang sama. Obyek gaya pemikiran ini biasanya disederhanakan ke dalam bahasa matematika. Penerapan gaya ini dalam kegiatan yang melakukan teknik simulasi dan pemodelan tentang hubungan dua variabel, misalnya pada manajemen operasi, manajemen ilmiah, pembuatan simulasi pada *Monte Carlo Simulations* dan *sensitivity analysis* dalam kajian manajemen keuangan. Proses logikanya logika deduktif

*Self Evident Truth*, adalah sebuah cara untuk mengetahui sesuatu melalui penentuan definisi kebenaran yang subyektif-relatif. Cara berpikir ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri (*improving self confidence*) dan beroperasi dengan menggunakan teori kausalitas yang subyektif. Kausalitas subyektif adalah sebuah

cara berpikir yang menyederhanakan suatu teori dengan ungkapan "jika yang lain bisa atau jika di sana bisa, kita pun atau di sini pun pasti bisa". Cara berpikir ini bertolak dari subyektivitas bahwa diri juga bisa atau diri ini diminati lalu dapat dikembangkan dengan cara membandingkan secara subyektif-relatif.

Gaya berpikir ini sudah dimuali ditinggalkan karena munculnya pemikiran bahwa unsur perubah itu bukan hanya bertumpu pada diri melainkan ditentukan juga oleh lingkungan sosial; kemudian munculnya kesadaran bahwa manusia itu unik dan berbeda karena itu tak bisa digeneralisasi secara sembarang. Perbaikan atas pola berpikir self-evident truth ini melahirkan *metode authority*, kepercayaan pada seseorang yang dianggap memiliki otoritas dalam bidangnya.

*Method of Authority*. Pemilik kebenaran adalah sumber kebenaran, begitulah inti dari metode ini, karena itu bila ada masalah atau hendak melakukan sesuatu yang baru kita perlu merujuk pada pemikiran pemegang autoritas. Misalnya dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku, artikel, saran-saran dari orang yang berhasil dalam bidang tertentu demi menyelesaikan masalah. Hanya saja dapat ditekankan bahwa secara bijaksana seseorang seharusnya menerima pendapat atau pandangan seseorang hanya sebatas masukan yang berharga, baik pandangan tersebut mengandung kebenaran atau tidak.

### **Kuadran: Idealisme-Eksistensialisme**

*The Literary Style of thought* adalah cara berpikir yang bertumpu pada studi kasus. Sebuah kasus adalah peristiwa kemanusiaan (inti eksistensialisme) yang dipandang ideal (ciri khas idealisme) untuk menjadi model bagi penyelesaian suatu masalah. Demi kepentingan penyajian kasus manusiawi, ilmu manajemen modern biasanya mencangkok penemuan ilmu lain (seperti antropologi, sosiologi, dsb). Salah satu contoh pengguna gaya berpikir literer adalah teori motivasi Maslow.

*Untested Opinion*, gaya ini merupakan pengetahuan yang diikuti tanpa melihat kualitas kebenaran dari pernyataan dan data yang ditemukan. Program indoktrinasi biasanya menggunakan gaya berpikir seperti ini yang diterima oleh peserta yang memang menerima begitu saja pemikiran tanpa melakukan pengecekan mendalam terhadap suatu pendapat.

### **Kuadran: Rasionalisme-Empirisisme (scientific method).**

Pemikiran ilmiah menggabungkan logika dengan pengamatan empiris guna menghasilkan sebuah persepsi atas dunia yang lebih sistematis dan mendalam.

Gaya pemikiran ilmiah (*scientific method styles*) dipakai dan menjadi panutan utama dalam kegiatan ilmu. Gaya pemikiran ilmiah memiliki sejumlah ciri, diantaranya: observasi langsung dan terarah atas fenomena dan masalah secara jelas mendefinisikan variable, metode dan prosedur yang dipakai untuk mendapatkan data empiris pengajuan hipotesis yang dapat diukur dan diuji terdapatnya mekanisme untuk pengajuan hipotesis yang lebih baik penggunaan alat ukur dan alat uji hipotesis seperti statistik

Metode saintifik berada pada cuadran rasionalisme-empirisisme, karena itu metode ini menggabungkan pola berpikir induktif (*empirisisme*) dengan deduktif (*rasionalisme*). Penggabungan kedua pola berpikir ini pertama kali digagas John Dewey yang digunakan untuk memecahkan masalah, membantu proses keputusan, menyajikan statu pendekatan untuk menilai validitas kesimpulan akhir tentang peristiwa yang teramati.

Apa yang telah digagas Schindler ini satu sisi menunjukkan betapa pentingnya kajian filsafat dalam administrasi pendidikan, pada sisi yang lain menunjukkan wilayah kajian filsafat administrasi pendidikan yang masih berkisar pada administrator.

Kembali pada buku Orin B Graff. Pola pembahasan Orin B Graff dimulai dengan membicarakan konteks kelahiran pemikiran filosofis, pembahasan gagasan dasar dari suatu aliran pemikiran filosofis, kaitan antara pemikiran filosofis dan pendidikan, terakhir kaitan aliran pemikiran filosofis dengan administrasi pendidikan.

Sebagai gambaran umum dapat dibaca pada bab-bab berikut ini.

## 6

# IDEALISME

Idealisme berarti Ide sebagai realitas dasar. Aliran filsafat ini meyakini bahwa realitas itu adalah ide-ide, pikiran-pikiran, akal (*mind*) atau jiwa. Jadi realitas itu bukan benda-benda material dan kekuatan tertentu. Walaupun kita melihat dengan indra adanya realitas, namun bagi idealisme semua yang terlihat itu bukan realitas yang sebenarnya. Realitas yang sebenarnya adalah yang terpikirkan akal, sementara yang material hanyalah produk sampingan. Dari sini muncul keyakinan bahwa alam ini mempunyai arti dan maksud. Nah, arti dan maksud itulah yang dimaksud sebagai realitas yang riil dan mendasar.

Seorang idealis juga meyakini bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dengan alam. Apa “yang terdalam pada jiwa” juga merupakan “yang tertinggi pada alam”. Keharmonian ini menjadi tujuan, yaitu dengan cara membuat suatu sistem kehidupan yang logis dan spiritual secara ideal.

Idealisme mempostulatkan bahwa: kebenaran yang *berada di “luar dunia riil” bersifat tetap dan mutlak benar serta menentukan kenyataan*. Premis pokok yang diajukan idealisme adalah “jiwa mempunyai kedudukan yang utama di alam semesta”. Dari sini dunia nyata ini dipandang sebagai bagian dari dunia ideal. Dunia riil ini hanyalah bayangan dari dunia ide, dunia di luar dunia inilah yang menjadi dasar serta sumber bagi dunia ini. Dunia ide itu dianggap sebagai dunia nyata, tak berubah, dan mutlak benar. Implikasinya

idealisme percaya bahwa watak sesuatu obyek adalah nonmaterial dan ideal.

Filsafat ini identik dengan Plato, lalu berkembang menjadi pemikiran idealism Jerman dengan tokoh seperti Hegel. Plato memberikan cara pandang baru terhadap realitas. Secara sederhana pemikiran Plato sangat sederhana: jangan terperangkap pada apa yang tampak, carilah maksud yang mendasarinya. Plato yakin, apa “yang tampak” hanya bayangan dari “yang tak tampak”. Jika manusia terperangkap pada “apa yang tampak” saja, maka ia tak dapat menemukan kebenaran sejati.

Aktivitas manajemen atau administrasi tentu berurusan dengan “apa yang tampak”. Dari “yang tampak” itulah para manajer bergerak, menemukan masalah, merumuskan solusi dan menyelesaikannya. Karena sifat aktivitas administrasi yang bergerak dari “yang tampak” ini, idealisme dianggap tidak memberikan kontribusi pada administrasi.

Mari kita lihat pemikiran Plato secara perlahan.

Plato kerap dikesani lari dari kenyataan dunia ini untuk mengejar dunia lain yang dianggap lebih ideal. Bisa jadi benar begitu. Hal ini terlihat dari alegori dunia gua. Konon ada sejumlah orang terperangkap di sebuah gua yang gelap. Orang-orang itu terikat badan dan kepalanya sehingga hanya bisa menghadap dinding dua. Mereka duduk menghadap dinding secara terus-menerus. Entah sejak kapan mereka terikat, yang pasti mereka hanya terpaksa melihat dinding itu. Di belakang mereka ada mulut gua, dan tentu saja dunia luar dengan matahari yang bersinar. Orang-orang ini menganggap apa yang terlihat di dinding gua sebagai kenyataan. Mereka lihat bayangan hitam terbang, mereka menyebutnya burung. Pokoknya semua bayangan yang melintas pada dinding adalah kenyataan, karena itulah yang tampak dan terindrai.



Lalu salah seorang dari mereka berhasil melepaskan belenggu, ia terbebas dan bisa melihat sekeliling gua. Ia juga bisa berjalan keluar dari gua. Ia melihat burung asli yang warna-warni dan tiga dimensi. Ia jadi tahu bahwa burung bukanlah berwarna hitam dan dua dimensi seperti yang terlihat di dinding. Sampai di situ ia menyimpulkan ada dua realitas, yakni bayang-bayang dan benda aslinya. Orang ini bertanya, 'dari mana datangnya bayang-bayang benda itu?' Benda aslinya, tak serta merta menciptakan bayang-bayang. Ia kemudian melihat cahaya matahari dan menyimpulkan cahaya itulah yang menciptakan bayang-bayang, bahkan yang membuat burung serta benda-benda lain terlihat ada. Maka ia menyimpulkan bahwa yang membuat ada bukanlah benda-benda di dunia ini, melainkan matahari yang ada di sana.

Apa makna alegori gua ini?

Sangat sederhana. Semua orang pastilah terperangkap pada apa yang dikerjakannya. Pekerja kantoran terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama, bertemu dengan orang yang sama, dan memikirkan persoalan yang sama. Semua yang dihadapinya itu dapat disebut sebagai "dunia-kehidupannya". Saat kita tenggelam pada "dunia kehidupan" masing-masing, kita menganggap hanya itu yang ada, yang benar, yang baik, dan harus diperjuangkan. Dunia kehidupan selain "dunia-kehidupannya" itu dianggap aneh, keliru, dan tidak menyenangkan. Mungkin ini sama dengan konsepsi organisasi sebagai *system tertutup* pada *Saintific Management*. Administrasi hanya berurusan dengan dunia kerja demi efektivitas dan efisiensi.

Tapi dunia tak selebar daun kelor, begitu pepatah orang Indonesia. Dunia tentulah tak hanya itu-itu saja. Ada dunia lain yang lebih besar, dunia yang mewedahi dunia ini. Masalah di "dunia-kerja" hanya proyeksi dari masalah di dunia yang lebih besar itu. Kenapa seseorang bekerja? Karena hendak mencari makan diri dan keluarganya. Lihatlah, sumber masalah ternyata bukan hanya dirinya di

dunia kerja, tapi juga keluarganya yang ada di luar dunia kerja.

Plato menawarkan perluasan apa yang kita anggap sebagai dunia. Dunia, bukanlah hanya apa yang rutin dihadapi. Sumber kebahagiaan kehidupan juga tidak didapatkan hanya dari dunia-kerja, justru berasal dari dunia yang lebih besar, dunia-kehidupan. Dunia-kerja dan dunia-kehidupan itu terhubung, bahkan dunia-kerja itu bagian dari dunia-kehidupan. Maka untuk memahami dunia-kerja kita harus merelasikannya dengan dunia-kehidupan. Tugas seorang filsuf adalah merelasikan dunia-kerja yang particular (terbatas dan berubah-ubah) dengan dunia-kehidupan yang universal (lebih luas dan bersifat tetap). Makna ditemukan bukan dari yang terbatas, melainkan dari yang lebih luas.

Cara berpikir seperti inilah yang ditawarkan oleh Idealisme. Tentu saja berguna bagi seorang pendidik atau administrator pendidikan. Jangan terperangkap pada apa yang tampak, carilah ide-nya, maksudnya. Saat seseorang tak mau bekerja alias malas, itulah yang dihadapi. Kenapa dia malas? Carilah apa yang menjadi penyebabnya? Penyebab kemalasan itu berada di luar yang bisa diamati. Penyebab dari kemalasan itu harus dipikirkan. Setelah dipikirkan lalu lahirlah kesimpulan bahwa penyebab kemalasan itu adalah ini atau itu. Kesimpulan yang lahir dari pikiran itu disebut sebagai ide. Lalu ide yang tersimpul itu dianggap sebagai sumber dari realitas kemalasan.

Pemikiran seperti ini, tentu sering dilakukan. Bahkan tanpa berpikir seperti ini, kita bisa gila karena terus berputar-putar di tempat yang sama tanpa ditemukan solusi. Ya, solusi hanya bisa ditemukan saat kita tak terjebak pada apa yang ada, namun ditemukan saat kita bersedia menengok ke dunia yang lebih besar.

Proses menemukan ide, gagasan, atau maksud ini disebut sebagai idealisasi (pengidean, proses mengeluarkan ide), atau konseptualisasi (membuat konsep dari apa yang tampak).

## **Idealisasi dan Konseptualisasi**

Kalau Anda membaca buku manajemen dan administrasi, bab pertama yang Anda temukan niscaya tentang konsep. Rupanya ilmu manajemen berdiri di atas konsep, tanpa konsep ilmu manajemen tak mampu melakukan apapun. Konsep adalah dasar bagaimana kita mengetahui dunia, konsep dapat memberikan jembatan realitas dan pemahaman kita atas realitas.

Dalam teori manajemen konsep digunakan olah untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan (kadang-kadang) memperlakukan manajemen dan organisasi. Contoh sederhana pada manajemen strategis digunakan konsep biasa untuk menganalisis strategi, misalnya 'analisis SWOT'. SWOT adalah konsep untuk menjelaskan perilaku strategis organisasi, bahwa organisasi disebut strategis jika bertindak berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Contoh lain, dunia manajemen juga menggunakan konsep yang lebih abstrak dan beragam seperti 'kinerja', 'efisiensi', produktivitas, dan 'efektivitas'. Konsep mendorong dan membentuk apa yang kita anggap sebagai pengetahuan kita.

Para penentang idealism dapat menyatakan bahwa "kita tidak dapat memperoleh akses ke dunia secara independen hanya dari konsep yang kita gunakan" (Fleetwood & Ackroyd, 2005: 3). Tentu saja benar. Namun, kita tak bisa mendapatkan penyelesaian masalah jika tidak bertumpu pada konsep mengenai kenyataan. Untuk itu kita mencoba memahami konsep (apa itu konsep? bagaimana konsep itu muncul?. dan Apa tujuan yang dilayani oleh konsep?)

Konsep adalah fundamental bagi esensi filsafat, namun juga merupakan inti penyelidikan ilmu sosial. Konsep adalah turunan dari pengetahuan masa lalu, tetapi juga bentuk kreatif yang menghasilkan pengetahuan baru. Konsep pada dasarnya bergantung pada abstraksi. Tidak semua konsep diciptakan sama; beberapa lebih konseptual

daripada yang lain. Konsep memberikan hubungan yang tak ternilai antara pertanyaan filosofis dan metode ilmu sosial.

Konsep bukanlah perangkat siap pakai yang tertutup rapat dan tersedia begitu saja untuk digunakan –walaupun para pembelajar awal niscaya hanya mengambil sejumlah konsep dari buku-buku teori. Konsep tidak datang tanpa sejarah, tanpa genre, dan tanpa pengelolaan. Konsep dibuat dan dibuat ulang dalam penggunaannya. Mereka dikonstruksi dan divalidasi dalam konteks siapa yang berbicara, dari situs institusional apa yang memunculkannya, dan dari posisi subjek apa konsep itu diciptakan (Foucault, 1972). Sifat konsep yang paradoks ini, baik lama maupun baru, memiliki asal usul dan perlu diciptakan, dieksplorasi di sini untuk menjelaskan apa yang membuat sebuah konsep menjadi konsep, apa yang dilakukan konsep kerja, dan bagaimana konsep diorganisasikan.

Orientasi pada konsep merupakan jejak dari filsafat idealism.

Saat mendapat pertanyaan “apa itu filsafat?” Deleuze and Guattari (1994) memberikan jawaban “*philosophy is the art of forming, inventing, and fabricating concepts*,”. Inti Filsafat adalah seni dalam membentuk, menemukan, dan mengarang konsep. Jadi filsafat bukanlah apa-apa tanpa konsep dan bahwa konsep bukanlah apa-apa jika tidak filosofis. Deleuze dan Guattari (1994) berbicara tentang filosofi (f kecil), filosofi yang bertentangan dengan Filosofi (dengan F besar) tentang metateori, narasi besar, dan pencarian ultimat, di mana “kepedulian untuk menegakkan aturan membatasi utilitas untuk memecahkan masalah” (Jackson & Carter, 2007: 147).

Sebaliknya, filsafat adalah proses kreatif, satu-satunya tujuan yang berkontribusi pada solusi masalah. Filsafat harus menemukan cara berpikir baru dan, karenanya, peran konsep dibutuhkan untuk “mengintervensi secara ontologis dunia ini, lalu melalui intervensi ini diciptakan sesuatu yang menarik, luar biasa, atau penting” (Kris-  
te-

nsen, Lopdrup-Hjorth, & Srensen, 2014: 499). Inilah prinsip idealism. Dunia yang nyata harus diintervensi oleh konsep atau gagasan, barulah dunia nyata ini mengalami perubahan.

Konsep tidak boleh dianggap "ready-made" atau "siap pakai", melainkan harus dibangun ulang dan dibuat khusus sesuai bidang garapannya(Deleuze & Guattari, 1994). Dalam kata-kata Deleuze dan Guattari (1994: 7), *"every creation is singular, and the concept as a specifically philosophical creation is always a singularity."* Ya, proses penciptaan hanya terjadi di situ, maka konsep yang digunakan niscaya diciptakan untuk kasus itu saja, atau konsep besar pasti akan disesuaikan dan dibuat khusus untuk menangani kasus yang sedang ditangani itu. Karena itu kita harus sangat tidak percaya pada semua konsep yang diambil dari tempat lain secara begitu saja.

Konsep harus diubah-suai agar dapat menjelaskan realitas yang sedang kita hadapii. Posisi ini ditegaskan dari Nietzsche (1968: 220, 409) bahwa para filsuf *"must no longer accept concepts as a gift, nor merely purify and polish them, but first make and create them, present them and make them convincing."* Filsuf tak bisa menerima konsep sebagai hadiah gratisan, atau hanya memurnikan dan memoles konsep lama seraya menggunakannya secara semena-mena. Filsuf pertama-tama harus membuat dan menciptakan konsep, menyajikannya dan membuat konsep itu meyakinkan untuk menyelesaikan masalah.

Jika filsafat adalah praktik penciptaan konsep (Deleuze & Guattari, 1994) dan peran yang tepat untuk penelitian adalah produksi ide (Lyotard, 1984), maka filsafat adalah skema sempurna untuk menginterogasi penggunaan konsep dalam riset manajemen dan administrasi.

Mari kita lihat perbandingan cara pandang terhadap konsep antara ilmu manajemen dan filsafat.

Sementara para filsuf mungkin melihat konsep sebagai “sesu-  
atu yang dihasilkan secara kreatif”, ilmu sosial secara tradisional  
melihat konsep sebagai “turunan dari pengalaman kita tentang  
dunia”. Alfred Schutz (1972/1953) mengartikulasikan pemahaman  
konsep sebagai “konstruks tahap kedua”, sebuah pemahaman yang  
tampaknya telah dilupakan dalam studi manajemen. Sejak tahun  
1953, Schutz (1972/1953: 62–63) mengklaim konsep sebagai abstraksi  
subjektif atau interpretasi dari pemahaman aktor lain:

*The basic insight that the concepts formed by the social  
scientist are constructs of the constructs formed in common-  
sense thinking by the actors on the social scene offers an  
answer [to the vexed question of] How is it possible to form  
objective concepts and an objectively verifiable theory of  
subjective meaning- structures?*

Konsep adalah “konstruks dari konstruks” atau “konstruk pangkat  
dua”. Konstruks pertama dilakukan atas realitas, atau kemengertian  
yang didapatkan saat kita mengamati realitas. Sementara konsep  
adalah proses memikirkan lagi konstruks itu. Prosesnya adalah idealisi-  
sasi, proses mengubah apa yang diamati menjadi gagasan. Gagasan  
yang dihasilkan dari tahap pertama disebut konstruks. Lalu konstruks  
itu diidealisasikan lagi, barulah menghasilkan konsep. Oleh karena itu,  
kita dapat membedakan antara penanda primer (atau literal), makna  
notasi teknis orde pertama, dan makna penanda sekunder, di mana  
simbol berada, makna kiasan yang terikat pada makna literal, dan  
sebaliknya.

Studi manajemen umumnya mengikuti ilmu sosial dalam  
pemahaman konsep. Pada jurnal berpengaruh *Academy of Manage-  
ment Review*, konsep didefinisikan sebagai “*as a broad mental  
configuration of a given phenomenon*” (Bacharach, 1989: 500) dan  
sebagai “*meaning- laden classifications that serve as building blocks  
of science*” (Osigweh, 1989: 591) Konsep hanyalah konfigurasi me-

ntal dari fenomena yang diberikan. Tentu konfigurasi mental lebih luas dari fenomena. Konsep hanya pemilahan sarat makna dari suatu realitas yang menjadi kerangka pengetahuan yang berasal berasal dari pengamatan. Bisa jadi konsep itu hasil pengamatan orang lain yang digunakan untuk mengamati apa yang sedang kita pecahkan masalahnya.

Filsafat tidaklah demikian. Filsafat lebih sedikit ketat. Seperti dikemukakan filsuf social Alfred Schutz, konsep bukanlah konstruk. Konsep lebih ideal lagi ketimbang konstruk. Mari kita amati lagi dengan hati-hati. Jika variabel adalah 'unit yang diamati' dan konstruksi adalah 'unit perkiraan' (Bacharach, 1989: 498) maka, konsep lebih abstrak dari konstruk sehingga dapat disebut sebagai 'unit abstraksi' Dengan kata lain, dan kembali ke Schutz (1953), konsep adalah “konstruk dari konstruk”. Jika konsep adalah kerangka teori (*building blocks of theory*), maka teori harus berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dikaitkan dengan konstruksi (yaitu kategorisasi dunia empiris). Cara ini, memungkinkan studi ilmiah memasuki wilayah abstraksi yang menciptakan ide-ide baru, perhatian yang jauh lebih berharga daripada keasyikan dangkal dengan pengulangan membicarakan konstruk (lihat Banks, Gooty, Ross, Williams, & Harrington, 2018).

Singkatnya, baik filsafat maupun ilmu sosial mungkin memahami konsep sebagai bentuk abstraksi; namun, mereka cenderung tidak setuju tentang dari apa bentuk yang lebih tinggi ini telah diabstraksikan. Pemahaman ini digambarkan dalam Tabel berikut:

Levels of abstraction	Philosophy (creating concepts)	Philosophy (interpreting concepts)	Social science	Management Studies
Lower	1. Imagi, pikiran, misal., yang muncul dalam pikiran”	Noetic intention = literal meaning	Data	Unit pengamatan
	2. kata = similar images for which one word exists	Noematic intention = sacred meaning	First order constructs	Construct = approximated units
Higher	Concepts = kumpulan gambar dengan beberapa kata yang tidak terlihat tapi terdengar	Concepts = meaning of meaning	Concepts = second order constructs	Concepts = abstracted units

Secara etimologis konsep berasal dari dua kata con + capere: *con* berarti mengetahui (know) dan *capere* adalah mengambil (take). Mari kita lihat definisi ini dari *Oxford Dictionary* (1973: 388–389):

**Concept:** An idea of a class of objects, general notion 1663.

**Concepts** are merely the results, rendered permanent by language, or a previous process of comparison

**Conception:** The action or faculty of forming a concept. That which is conceived in the mind; an idea, notion 1526.

Konsep hidup dan mati melalui abstraksi. Apa itu abstraksi? Secara sederhana abstraksi adalah membuat menjadi abstraks. Apa yang semula bersifat khusus, tertentu, lalu dibuat menjadi lebih umum. Itulah abstraksi. Konstruks adalah abstraksi dari pengalaman; konsep adalah abstraksi dari konstruks, dan teori adalah abstraksi dari konsep. Semakin umum berarti semakin bersifat idea. Saat menjadi idea, ia akan mendasari cara kita memahami realitas.



Nietzsche (1954/ 1873), mengemukakan pandangan yang lebih luas mengenai konsep, memberi tahu kita bahwa setiap kata adalah konsep karena merupakan penanda dari kategori yang lebih besar, yang pada gilirannya mengingatkan kita akan pada hal serupa yang jumlahnya yang tak terbatas. Saat Anda menyatakan seseorang sebagai “malas”, kata “malas” ini terkait dengan fenomena yang tak terbatas jumlahnya, entah jenis atau maknanya. Karena itu kata adalah konsep yang mengabstraksikan kenyataan yang sedemikian banyak dalam satu kata. Zygmunt Bauman (1991) menyatakan bahwa tindakan penamaan, yaitu fungsi bahasa, adalah tindakan pengklasifikasian dan pemastian (ordering). Jika saya mengatakan “saya sedang duduk di kursi saya”, Anda langsung dapat memahami, tanpa perlu memastikan kursi apa, warnanya apa, dan sebesar apa. Inilah yang dimaksud Nietzsche (1968/1901: 46), *“every concept originates through our equating what is unequal”*. Konsep memberikan kita penyamaan antara yang satu dengan yang lain walaupun tak setara. Malas yang satu berbeda dengan malas yang lain, namun keduanya disebut sebagai malas. Atas dasar inilah setiap abstraksi, bagi Nietzsche, adalah kebenaran sekaligus juga kebohongan.

Selain abstraksi, pembuatan konsep terkait dengan kerja klasifikasi atau proses memposisikan “sesuatu ada di mana”. Saat kita menilai kinerja seseorang sebagai baik atau tidak baik, itulah proses klasifikasi. Proses klasifikasi adalah fundamental tidak hanya untuk bagaimana kita mengetahui dunia, tetapi juga untuk bagaimana kita mengontrol dan membentuk dunia. Mengklasifikasikan, dengan kata lain, adalah memberi dunia sebuah struktur: untuk memanipulasi probabilitasnya; untuk membuat beberapa peristiwa lebih mungkin dipahami daripada yang lain; untuk berperilaku seolah-olah peristiwa yang tampak itu tidaklah acak, atau untuk membatasi atau menghilangkan keacakan peristiwa. (Bauman, 1991: 1)

Konsep dapat digunakan untuk mengelompokkan dan memberi nama; karakteristik dan perilaku dapat dikaitkan; kriteria

inklusi/eksklusi dikembangkan; konstruksi diekstraksi, diukur, dan dilaporkan. Dengan cara ini kita dapat mengetahui dan mengarahkan dunia yang teratur. Namun, konsep juga dapat mencipta, dapat mengisi kekosongan, dapat membayangkan sesuatu yang baru, dapat menyebutkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau ada tetapi tidak terlihat. Menurut Deleuze dan Guattari (1994), sebuah konsep terdiri dari komponen yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan; itu selalu lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya, dan karena itu konsep dapat menghadirkan sesuatu yang baru.

### **Plato dan Pembagian Kerja**

Inti manajemen pada masa awal adalah 'pembagian kerja'. Inilah yang dilakukan Taylor, Fayol, bahkan Weber. Ada hierarki antara atasan dan bawahan, antara yang lebih umum ke yang lebih khusus. Gagasan pembagian kerja ini sebenarnya dikemukakan lebih dulu oleh Plato dalam konsepnya yang lebih sederhana berdasarkan struktur tubuh manusia

Struktur tubuh Manusia itu, bagi Plato, ada 3 bagian: kepala, dada, dan kaki-tangan. Negara atau organisasi menurut Plato adalah manusia dalam ukuran besar. Sebagaimana diri manusia yang digambarkan terdiri dari perut, dada, dan kepala; organisasi juga pun dibangun dalam tiga bagian: kepala, dada, dan kaki tangan. Atau jika dikonsepsikan menjadi: kepala sebagai pemimpin, dada sebagai pengelola, dan kaki-tangan sebagai pelaksana. Jadi apa yang ada pada diri manusia (mikro), memiliki pola yang sama dengan apa yang terjadi pada organisasi (makro). Sebagaimana manusia akan berperilaku baik jika ketiga unsurnya bekerja dengan baik, maka organisasi akan tertata dengan baik bila ada pembagian pekerjaan dalam tiga bagian tersebut, lalu organisasi akan menjadi sejahtera jika ada produktif jika masing-masing bagiannya bekerja sesuai fungsinya.

Inilah pembagian pekerjaan yang dikemukakan oleh Plato

*Pertama*, Golongan tebawah adalah pekerja (kita ingat dengan perut dan kaki-tangan. Muhammad Hatta menulis karakteristik golongan ini sebagai “dasar ekonomi”, yang “menghasilkan, mereka tidak boleh serta dalam pemerintahan”, dan “budi mereka harus terasuh, yaitu budi yang pandai *menguasai diri*” (ugahari, *sephrosune*) (Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, hal. 111). *Kedua*, Dada. Atau golongan tengah. Ini adalah golongan penjaga atau “pembantu” urusan Negara. Golongan ini bertigas ke dalam (melaksanakan aturan Negara) dan keluar (menjaga Negara dari serangan musuh). Plato menegaskan bahwa golongan ini tidak boleh memiliki kepentingan sendiri, bebas nilai, bahkan tak boleh memiliki harta pribadi dan keluarga. Golongan ini harus memiliki budi *keberanian (andreia)*. *Ketiga*, Kepala atau golongan atas yang pemerintah. Golongan inilah yang tugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Budi yang harus dimiliki oleh mereka adalah budi kebijaksanaan (*sophia*).

Negara yang dibangun oleh tiga jenis masyarakat ini disebut Plato sebagai Negara Ideal. Fungsi ketiga golongan masyarakat pada Negara Ideal Plato ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Golongan pekerja menghasilkan, tetapi tidak memerintah
- Golongan penjaga melindungi , tapi tidak memerintah
- Golongan cerdik pandai diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah

Ketiga golongan ini menjalankan fungsi dari karakter budi yang jika digabungkan akan menghasilkan keadilan. Golongan pekerja harus mampu menguasai diri agar tidak terpengaruh oleh materi, golongan penjaga harus memiliki keberanian dalam melaksanakan undang-undang, dan golongan cerdik pandai harus dikendalikan oleh azas kebijaksanaan. Jika Negara dipenuhi oleh orang yang bijaksana, berani, dan menguasai diri maka Negara itu akan menghasilkan masyarakat berkeadilan.

Jika ketiga tingkatan ini dikemukakan sebagai konsepsi, maka ada 3 konsep pekerjaan yang harus ada di dalam suatu organisasi: perencana (sekaligus pengawas dan pengevaluasi), pengelola, dan pelaksana. Bukankah ketiga fungsi ini adalah fungsi manajemen?

### **Refleksi:**

Pendidikan model idealisme, barangkali bisa dirujuk pada pendidikan agama atau tradisi yang menganggap bahwa nilai yang dimilikinya adiluhung dan karena itu realitas harus menyesuaikan diri dengannya. Karena yang ideal dan yang harus diajarkan adalah sejumlah nilai atau pengetahuan yang dianggap memiliki kebenaran mutlak, maka perubahan masyarakat harus dianalisa dari perspektif kebenaran itu. Begitu terjadi perubahan sosial, guru memberikan tafsir atau gagasan tertentu tentang realitas berdasarkan kebenaran yang diyakininya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah sekolah cenderung menarik diri dari konteks sosialnya. Para administrator sekolah mesti membuat kerangka kebijakan dan melindunginya dari pengaruh dunia keseharian. Dan hal ini selaras pula dengan gagasan kalangan idealis bahwa orang-orang mesti bebas untuk mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri.

Model ini yang dapat kita jumpai pada beberapa pesantren atau pendidikan agama lainnya. Tentu saja ada benarnya, bahwa harus selalu ada nilai yang tetap pada setiap perubahan agar kita tak terba-wa arus. Namun bila semua hal harus tetap, tak bisa diubah, adalah hal yang tak wajar. Salah satu sebabnya adalah karena nilai-nilai ideal itu memiliki fungsi untuk “menemani” manusia menghadapi masalah-masalah kehidupannya. Itu berarti ia harus adaptif pada satu sisi, sambil tetap bertahan pada sisi tertentu.

Praktik administrasi yang merujuk filsafat idealisme pada beberapa hal tetap dapat dijadikan dasar. Contohnya, kemestian merujuk seluruh tindakan pada kebenaran, dan kegiatan tukar

pikiran antar ahli sebagai sumber kebenaran. Kedua contoh ini dapat terus dilakukan hingga saat ini. Namun sumber kebenaran yang hanya merujuk pada “teori” saja tak bisa dijadikan dasar bagi tindakan administratif. Sumber kebenaran praktis juga harus merujuk pada hal-hal yang riil, yang diuji dalam kenyataan, agar dapat menghasilkan tercapainya tujuan.

## REALISME DAN ADMINISTRASI

*Realisme* berasal dari akar kata *res* yang berarti hal, benda, atau barang. Pengertian dari realisme adalah: 1) upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atau idolisasi; 2) menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan fakta itu (Bagus, 2000: 934).

Dalam perkembangan filsafat awal, realisme terkait dengan gagasan universalisme. Prinsipnya menyatakan bahwa hal-hal universal mempunyai realitas sendiri di luar pikiran. Plato menamakan hal-hal realis ini adalah dunia ide, sumber gagasan.

Filsafat realisme pada dasarnya mempunyai implikasi jangka panjang bagi dunia pendidikan. Realisme memandang bahwa dunia dikendalikan oleh hukum-hukum alam. Manusia hanya bisa sekadar menyesuaikan atau memelihara lingkungannya. Dari itu, tujuan utama dalam pendidikan bagi kalangan ini adalah untuk menyiapkan seseorang agar siap dalam menerima hal-hal yang tidak terelakkan olehnya. Pendidikan disiapkan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bukan untuk mengatur atau memberi bentuk atasnya. Agar bisa berhasil dalam hal tersebut, maka orang mesti memahami dunia yang ditinggalinya. Segala bentuk pengeta-

huan yang dibutuhkannya bisa didapat dari realitas di luar dirinya. Pengetahuan ini bisa diolah dan diajarkan dalam bentuknya yang terorganisir bernama sekolah.

Konsepsi kalangan realis tentang peran pendidikan pada titik tertentu sangatlah sederhana. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mengajarkan hukum-hukum alam dan moral, atau tentang keduanya sejauh yang diketahui bersama. Ini sebenarnya adalah hal yang tak terelakkan dari tekanan kalangan idealist terhadap keutamaan individu dan kebebasan intelektualitas pikiran seseorang. Kalangan idealis sebenarnya tidak terlalu fokus pada penanaman pengetahuan sebagaimana yang mereka lakukan dalam menguji pikiran untuk menghasilkan kebenaran.

Realisme sendiri mengenyampingkan orientasi subjektif dalam memperlakukan kenyataan, namun ia juga tidak begitu saja menerima pandangan filosofis yang lain --Pragmatisme misalnya, yang menganggap bahwa pengetahuan mesti digunakan untuk mengontrol lingkungan seseorang dan menentukan takdirnya sendiri. Bagi kalangan realis persoalan utama yang ada adalah bagaimana membantu seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia yang dihuninya. Jadi, fungsi dari sekolah adalah untuk mengajarkan bagaimana melacak persoalan yang niscaya agar hidup bisa berhasil. Ringkasan berikut ini akan menjelaskan point tersebut:

Kehidupan manusia yang beragam pada dasarnya terdiri dari beberapa aktivitas tertentu. Pendidikan yang disiapkan untuk kehidupan berarti pendidikan untuk menghadapi aktivitas-aktivitas hidup secara tepat. Bagaimanapun beragamnya kelas sosial yang ada, mereka akan dapat diselidiki. Pandangan ini hanya membutuhkan seseorang yang terjun ke dalam dunia peristiwa dan menemukan hal-hal yang membangun peristiwa tersebut. Hal ini akan menunjukkan kecakapan, sikap, kebiasaan, apresiasi dan bentuk pengetahuan yang dibutuhkan seseorang. Ia juga akan menjadi tujuan dari kurikulum

pendidikan.

Realisme sendiri yang menemukan kejayaan pengaruhnya atas pendidikan pada tahun 1900-an, hanya memberikan sedikit perhatian terhadap pemilahan subjek persoalan dan metode pengajaran dalam pendidikan. Segala sesuatu adalah baik sejauh ia bisa membuat pikiran menjadi aktif dan berguna.

### **Realisme Aristoteles dan Pengaruhnya**

Sementara Idealisme dikaitkan dengan Plato, Realisme dikaitkan dengan Aristoteles (murid dari Plato). Mari kita lihat pemikirannya.

Aristoteles tidak mengandalkan kebenaran pada idea yang berada di “dunia sana”, kebenaran justru ada di dunia ini. Amatilah, temukan kerangkanya, maka kita akan menemukan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dunia ideanya Plato ditarik sebagai kerangka atau bentuk yang melekat pada benda-benda. Kurang lebih inilah yang menjadi dasar dari proses abstraksi, yakni proses menemukan kerangka dengan menghilangkan hal-hal material.

Prinsip bertumpu pada yang real inilah yang disebut realism, tak mengawang-awang tapi berdasarkan apa yang ada. Tentu saja ini prinsip menarik dan digunakan dalam seluruh kerja administrasi: mulailah dari apa yang ada, bukan yang belum ada.

Dengan terang realism ini Aristoteles membedakan kegiatan perdagangan dalam dua kategori: ekonomi (*oikonomik tekhne*) dan krematistik (*khremetistik techne*). Ekonomi (*oikonomia* berarti pengaturan rumah tangga, dari kata *oikos* = umah, rumah tangga; dan *nomos* = pengaturan, aturan, hokum), yakni kegiatan tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Krematistik (*khremata*= harta benda, kekayaan) adalah menukar barang dengan uang hanya untuk menambah kekayaan. Dalam Krematistik, uang dianggap sebagai



tujuan dari kegiatan pertukaran. Aristoteles menulis, “Kekayaan sering dipandang sebagai terdiri atas setumpuk uang, karena tujuan krematistik adalah membentuk tumpukan kekayaan”. (Aristoteles, *The Politics*, 1974:43) Krematistik dianggap akan membuat orang dikondisikan dalam nafsu tak terbatas, karena selalu terarah kepada uang yang lebih banyak lagi.

Aristoteles menentang *krematistik* dan mendorong aktivitas *oikonomia*. Walaupun demikian Aristoteles tidak menolak prinsip kepemilikan pribadi. Setiap orang memiliki ruang privatnya masing-masing. Pertengkarakan akan berkurang; dan jumlah pemenuhan kebutuhan akan meningkat, ketika setiap orang merasa bahwa ia mengekspresikan dirinya di dalam apa yang ia punya. Hak milik pribadi sebenarnya tidaklah bersifat destruktif. Hak milik menjadi destruktif saat disertai rasa dan tindakan cinta diri yang berlebihan. Solusi atas hal ini bukanlah penghancuran semua bentuk keinginan manusia akan privasi dan hak milik pribadi, namun pengaturan yang dengan memperadabkan keinginan tersebut melalui pendidikan. Tak hanya pendidikan, dibutuhkan juga pengaturan Negara yang membuat keinginan privat dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan bersama (publik).

Pemikiran ini dapat ditemukan dalam buku *Politics*. Di zaman Yunani kuno ruang hidup dibagi dua: privat atau rumah tangga (*oikos*) dan ruang bersama, di tengah masyarakat (*polis*). Politik adalah cara mengatur kehidupan orang per orang di ruang *polis*, ruang public. Aristoteles mengusulkan agar Negara mengatur kehidupan masyarakat antara di *oikos* dan *polis*.

Aristoteles meyakini bahwa hanya di dalam ruang *polis* sajalah manusia dapat mewujudkan potensi-potensi diri seutuhnya. “Manusia”, demikian tulis Aristoteles, “selalu sudah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keseluruhan yang bersifat politis, dan ada semacam dorongan internal di dalam diri setiap manusia yang mendorongnya

untuk bekerja sama dan membentuk tatanan.... Manusia, ketika dalam keadaan sempurna di dalam *polis*, adalah binatang yang paling sempurna. Akan tetapi ketika ia terisolasi dari hukum dan keadilan maka ia adalah makhluk yang paling buruk.” Dari sinilah muncul ungkapan manusia sebagai *zoon politicon*

Cermatilah pemikiran Aristoteles ini. Bukankah ini dasar dari kenapa harus ada organisasi? Juga menjadi landasan kerja manajemen dan administrasi?

Jika Plato membayangkan Negara seperti kerangka manusia dalam bentuk makro, Aristoteles meyakini bahwa Negara atau polis itu dibangun oleh sejumlah aktivitas individu. Negara tetap dianggap sebagai perpanjangan individu namun dengan cara yang berbeda. Sementara Plato menganggap Negara sebagai ideal (lebih luas, lebih kuat) dari kondisi individu (lebih terbatas, lebih lemah), Aristoteles justru menganggap bahwa Negara dan individu adalah pasangan yang saling membutuhkan. Negara adalah perwujudan kebersamaan individu-individu, sehingga tanpa kesertaan individu, Negara tidak ada.

“Bagian-bagian dan keseluruhan”, demikian tulis Aristoteles, “seperti juga tubuh dan jiwa, memiliki kepentingan yang sama; dan budak adalah bagian dari tuannya, dalam arti mereka hidup bersama walaupun memiliki tubuh yang berbeda. Ada kepentingan komunitas, dan ada relasi persahabatan, antara tuan dan budaknya, ketika keduanya secara alamiah menghayati posisi dan perannya masing-masing. Akan tetapi, kebalikannya juga dapat terjadi, dan ada konflik kepentingan serta permusuhan, ketika relasi perbudakan hanya diikat berdasarkan sanksi hukum dan kekuasaan yang memaksa..”

Budak dan tuan, itulah kata yang digunakan Aristoteles. Mari kita konsepsikan menjadi, Manajemen dan pekerja. Keduanya harus bersahabat, saling mengisi, menghayati posisi dan perannya masing-

masing. Jika kebalikannya, saling bersitegang dan tanpa sinergis, suatu organisasi akan berantakan. Manajemen dan pekerja harus berada di dalam jaringan saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Pekerja menutup kelemahan manajemen, sementara tuan menutup kelemahan pekerja. Pekerja memberikan sumbangan terhadap manajemen dalam bentuk kemampuannya untuk melakukan kerja-kerja pencapaian tujuan, manajemen memberikan sumbangan dalam bentuk perencanaan, pertimbangan rasional akan berbagai hal yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja. Maka keduanya akan mendapatkan kemakmuran bersama, begitu kata Aristoteles. Kemakmuran sangatlah tergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mengenali, menerima, dan menjalankan perannya masing-masing.

Relasi tuan-budak ini ada dalam oikonomia, dalam rumah tangga, atau di dunia bisnis. Sementara di ruang public aturannya adalah polis. Cara pengaturannya adalah politik, yakni "*master science of the Good*", yang bertujuan mengurangi dorongan kepentingan dan nafsu-nafsu pribadi, dan menaruh kepentingan pribadi tersebut di dalam kerangka kepentingan bersama. Di sini gagasan Administrasi dapat dirujuk.

Bagi Aristoteles semua bentuk kerja sama diinstitusikan untuk tujuan mencapai kebaikan bersama. Saat semua orang melakukan tugas mereka untuk mencapai sesuatu yang, menurut mereka, sesuai dengan kebaikan bersama. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa semua bentuk kerja sama di dalam masyarakat selalu mengarah pada kebaikan. Kerjasama yang paling agung dan paling inklusif, bagi Aristoteles, adalah polis, atau negara. "Sebuah polis", demikian tulis Aristoteles, "merupakan se bentuk keseluruhan; tetapi keseluruhan yang dibentuk, tidak lain dan tidak bukan, oleh beberapa bagian-bagian yang berbeda.." Polis diciptakan untuk membentuk dan memperluas kebaikan. Untuk itu "Konstitusi", demikian pendapat Aristoteles, "yang memperhatikan kebaikan bersama adalah konstitusi yang be-

nar, yang ditetapkan dengan kriteria untuk mencapai keadilan sepenuh-penuhnya. Konstitusi yang hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi dari para penguasa adalah konstitusi yang salah, atau perversi dari konstitusi yang benar..”

Aristoteles selalu menghadapi kepentingan dan kebaikan pribadi versus kepentingan dan kebaikan bersama. Aristoteles mendorong agar lebih tercipta kepentingan dan kebaikan bersama. Karena itu, baginya, ekonomi merupakan “persemakmuran yang diatur dengan kekuatan politis” (*commonwealth organized by political power*) dan merupakan bagian integral dari kehidupan polis.

Negara atau aturan public selain menyatukan keberbedaan dalam kebaikan bersama, juga mengelola agar semuanya bisa bekerja sama. Untuk itu, Aristoteles membuat kategori jenis warga Negara. Bagi Aristoteles, “Di dalam semua Negara ada tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, atau kelas-kelas social: orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang sangat miskin, dan orang-orang dari kelas menengah.

Orang kaya dan orang miskin didorong oleh kerakusan, ketakutan, serta kecemasan yang ditimbulkan akibat berlebihnya harta, atau kurang sama sekalinya harta. Orang-orang kaya hanya tahu bagaimana caranya memerintah, dan orang-orang miskin hanya tahu bagaimana caranya mematuhi. Dari sini dibuat kesimpulan bahwa yang mengendalikan pemerintah tidak bisa dari orang-orang kaya atau miskin, keduanya didorong karakter negative yang rakus, takut, dan penuh kecemasan.

“Negara” tulis Aristoteles, “sejauh mungkin, terdiri dari masyarakat yang setara.. yang dapat bekerja sama sebagai teman dan rekan kerja.. kelas menengah, lebih dari kelas yang lainnya, memiliki kualitas semacam ini. Maka, negara yang berdiri atas dasar kelas menengah memiliki kemampuan untuk menjadi lebih setara.. ini merupakan

bentuk alamiah dari negara..”

Aristoteles meyakini kelompok menengah adalah jenis warga Negara yang lebih sedikit memiliki musuh dan kerakusan dari kelompok kaya dan miskin. Orang kelas menengah lebih mampu berpikir dengan akal sehat, disiplin, dan memiliki pertimbangan yang adil. Kelas menengah juga dianggap tidak terlalu ambisius, kejam, ataupun bersifat iri hati, jika dibandingkan dengan kelas lainnya. Negara yang baik membutuhkan orang-orang yang tahu bagaimana cara memerintah dan patuh pada saat yang sama. Jika pada Plato, pemimpin haruslah filsuf, Aristoteles mendorong orang dari kelas menengah sebagai pemimpin suatu Negara.

“Yang paling penting di antara semua”, demikian tulis Aristoteles, “di dalam konstitusi, adalah bahwa setiap ketetapan harus dibuat tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan sistem umum ekonomi, terutama untuk mencegah pada penguasa untuk menggunakan otoritas mereka demi kepentingan mereka sendiri.”

### **Refleksi:**

Pada awal perkembangan ilmu Administrasi, realisme adalah sumber rujukan utama. Realisme memberi peluang bagi pelaku administrasi untuk berkesperimen, mengalami dunia pekerjaan. Sejumlah teoritis ilmu administrasi merumuskan hukum pengaturan atau pengontrolan melalui ujicoba. Hasilnya dapat ditemukan pada beberapa teori administrasi awal. Namun, realisme yang terlalu memercayai kenyataan riil sebagai sumber kebenaran akan berhadapan dengan “perubahan” yang terus-menerus.

Administrasi secara umum bisa jadi tak mendapat masalah, namun administrasi pendidikan yang biasanya mengusung nilai tertentu yang dianggap ideal akan berhadapan dengan kemestian perubahan. Karena itu pertimbangan filsafat idealisme (bahwa ada

nilai ideal yang tetap) dapat digunakan untuk mengimbangi realisme ekstrem.

Perkembangan ilmu administrasi lanjutan menunjukkan upaya penggabungan idealisme dan realisme. Suatu upaya untuk menambal kekurangan dari masing-masing teori, sekaligus mengurangi tingkat kelemahan dari keduanya.

## 8

# POSITIVISME

Prinsip-prinsip realisme/ materialisme kemudian dijadikan dasar bagi penyusunan paham positivisme. Auguste Comte adalah tokoh pertama yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang berfokus pada apa yang positif (nyata, dapat diukur, dan tidak tergantung pada subyek pengamat). Gagasan Auguste Comte ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Austin, Ayer, Wittgenstein dalam Lingkaran (studi Filsafat) Wina dengan nama baru positivisme logis.

Kalangan positivisme logis menganggap bahwa sains sudah mempunyai seluruh jawaban untuk segala sesuatu, atau paling tidak ia mempunyai point-point penting yang mewakili keseluruhan. Sebaliknya, agama dan filsafat seringkali mencakup dalam dirinya teori-teori yang salah dan mengada-ada. Dan kenyataannya tidak seorang pun mampu menciptakan atau menemukan sebarang kebenaran baru dengan mendasarkan diri secara filosofis atau religius. Bagi kalangan positivis, segala sesuatu yang prinsip-prinsipnya tidak bisa diverifikasi adalah tak bermakna. Darinya, tidak ada yang bisa disebut benar kecuali ia telah diverifikasi secara empirik.

Pada masa yang penuh dengan mukzizat sains seperti ini,

cukup lumrah kalau banyak orang yang menyimpulkan bahwa sains bisa memecahkan seluruh persoalan kita. Apapun perihal yang telah dibawa oleh sains dalam segala bidang kehidupan benar-benar mengagumkan, tidak terkecuali pendidikan itu sendiri. *Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir* (dari ilmu muncul prediksi, dan dari prediksi muncul aksi)

Positivisme dibidani oleh dua pemikir Prancis, Henry Sain Simon (1760-1825) dan muridnya Auguste Comte (1798-1857). Henry merupakan penggagas utama, sedang Comte adalah penerus dan pengembang gagasan ini. Auguste Comte membangun suatu studi ilmiah terhadap masyarakat atau sosiologi yang berdasarkan prinsip studi ilmu-ilmu alam.

Pemikiran Comte merupakan reaksi terhadap situasi Prancis. Revolusi Perancis dan semangat pencerahan dalam banyak hal menghasilkan perubahan sosial, bersamaan dengan itu menghasilkan sejumlah anarkisme. Positivisme dikembangkan Comte guna melawan filsafat negatif dan destruktif dari para filsuf pencerahan, yaitu para filsuf yang masih bergelut dengan khayalan metafisika. August Comte membuat barisan kontra-revolusioner yang bersikap kritis terhadap proyek pencerahan.

Gagasan dasar Comte dapat dikenali dari pemikirannya mengenai tiga tahap perkembangan sejarah manusia, yaitu teologis, metafisis, dan positivis. *Pertama*, tahap teologis. Manusia memahami gejala-gejala alam sebagai hasil campur tangan langsung kekuatan ilahi. Tahap ini dimulai dari animisme yang menganggap benda-benda sebagai berjiwa dan diperlakukan sebagai suci, kemudian berkembang menjadi politeisme dan monoteisme. Politeisme adalah tahap ketika manusia mempercayai dewa-dewa (banyak dewa) di balik segala kejadian alam dan manusia; sedangkan monoteisme merupakan keyakinan bahwa hanya ada satu kekuatan tunggal absolute yang memengaruhi kehidupan dan semesta. Tahap teologis dianggap



Comte sebagai tahap kanak-kanak

*Kedua*, tanpa metafisik. Pada tahap ini gejala alam diyakini berjalan berdasar prinsip-prinsip metafisika. Prinsip-prinsip ini dihasilkan melalui pemikiran spekulatif. Tahap ini disebut Comte sebagai tahap remaja. Ketiga, tahap positivis ilmiah yaitu cara memahami kehidupan dan semesta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alam dan kehidupan bukan lagi dipahami sebagai hasil campur tangan yang ilahiah atau berdasar prinsip-prinsip spekulasi, melainkan sebagai sesuatu yang pasti, nyata dan berguna. Inilah yang disebut Comte sebagai tahap kedewasaan.

Positivisme yang dikembangkan Auguste Comte disebut juga sebagai positivisme sosial. Paham ini meyakini bahwa kehidupan sosial hanya dapat dicapai melalui penerapan ilmu-ilmu positif. Pemikir-pemikir yang mendukung positivisme sosial diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill di Inggris; Carlo Cattaneo dan Giuseppe Ferrari di Italia, Ernst Laas, Friederich Jodl, dan Eugen Duhring di Jerman.

Selain positivisme sosial muncul juga positivisme evolusioner. Paham ini dipelopori oleh Charles Lyell, Charles Darwin, Herbert Spencer, Ernst Haeckel dan Wilhelm Wundt. Secara umum pemikiran positivisme evolusioner mirip dengan positivisme sosial, yaitu sama-sama percaya akan adanya kemajuan. Perbedaannya hanya pada pendasaran kemajuan itu. Positivisme sosial percaya bahwa kemajuan itu dapat berlangsung dengan berdasar ilmu pengetahuan, sedang positivisme evolusioner meyakini interaksi manusia-semesta sebagai penentu kemajuan.

Pada tahun 1920-an kemudian berkembang satu lagi paham positivisme di Austria, yaitu positivisme Logis atau Lingkaran Wina (*der Wiener Kreis*). Tokoh-tokoh positivisme logis adalah Rudolph Carnap, A. J. Ayer, C. I. Stevenson, Gilbert Ryle, Susan Stebbing, John

Wisdom, Bertrand Russel, dan Wittgenstein. Kelahiran positivisme Logis berawal dari niatan untuk menata kembali situasi masyarakat pasca Perang Dunia I. Sementara sejumlah pemikir hendak memperbaiki situasi masyarakat dengan asas-asas teologi dan filsafat tertentu, pemikir dari Lingkaran Wina mengajukan pemikiran bahwa perbaikan sosial harus menggunakan ilmu-ilmu positif. Positivisme Logis beranggapan bahwa misi administratif (pengaturan) masyarakat secara rasional harus dilandasi kesatuan pengetahuan, dan kesatuan pengetahuan hanya dapat dicapai bila dikembangkan satu bahasa ilmiah yang berlaku pada semua bidang ilmu pengetahuan.

Positivisme logis adalah aliran positivisme yang lebih memfokuskan diri pada logika dan bahasa ilmiah. Salah satu prinsip yang diyakini kaum positivislogis adalah prinsip *isomorfi* yaitu adanya hubungan mutlak antara bahasa dan dunia nyata. Bahasa adalah gambar dari kenyataan, lalu karena bahasa sehari-hari tidak bisa menggambarkan kenyataan secara benar dikembangkanlah bahasa logis dengan keermatan matematis yang akurat.

### **Implikasi Positivisme Logis Pada Pendidikan**

Adanya pengaruh sains dalam pendidikan telah menghasilkan wawasan baru terhadap proses pembelajaran; ia juga menyediakan pemahaman yang lebih baik atas kepribadian manusia dan persoalan-persoalan yang timbul melingkarinya. Sains juga telah mengembangkan teknik-teknik yang begitu mencukupi untuk mengukur proses pembelajaran, kecerdasan, tindakan dan kreativitas. Ia telah membuka pintu pemahaman tentang pikiran manusia itu sendiri. Pada akhirnya bukan hal yang mengejutkan kalau para pendidik banyak yang menggunakannya mengingat sains sendiri telah berhasil menciptakan cara yang mengagumkan dalam pemecahan persoalan manusia. Kutipan berikut menggambarkan bagaimana kepercayaan yang besar para pendidik atas sains dari masa ke masa: “jawaban mutakhir untuk setiap persoalan pendidikan mesti diserahkan pada ukuran pendidi-

kan itu sendiri dan mesti mengikuti perkembangan pendidikan sebagai sebuah study ilmiah.”

Tak perlu diragukan lagi bahwa banyak perihal yang terkandung dalam pendidikan hari ini yang menjadi subjek penelitian ilmiah. Banyak pula praktik pendidikan dan para pelaku di dalamnya yang mengambil keuntungan dengan meningkatnya orientasi mereka pada metode ilmiah. Bagaimanapun, pemujaan atas sains dan menyatakan dengan tegas bahwa manusia mesti bersandar pada logika saintifik sebagai arahan dan petunjuk adalah membimbing manusia pada satu bentuk kuasa kontrol yang baru, dan itulah sains. Beberapa kalangan lainnya memandang bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membebaskan manusia dan membantunya menemukan jalannya sendiri, bukan menjadikannya sebetuk daya kontrol, seperti halnya sains, ataupun otoritas agama dan politik.

Pendidikan, sebagaimana kalangan positivis memandangnya, mesti memiliki tujuan utama berupa pengembangan kompetensi dalam cara-cara yang ilmiah dan mendidik manusia untuk menerima sains sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Feigl dalam hal ini mencatat: “upaya-upaya mempertahankan pendidikan selama beberapa generasi mendatang sangat dibutuhkan untuk membimbing kemanusiaan menuju cara berpikir baru yang telah diniscayakan oleh abad saintifik ini”. Hanya pendidikan seperti itulah yang bisa membuat orang menjadi kompeten dalam proses dan teknik ilmiah dan akan membuatnya menerima produk sains untuk pendidikan. Pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi pada sesuatu selain sains adalah hal yang mubadzir. Sains sudah dapat menunjukkan jalan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui dan memahami dunianya. Darinya, pengembangan nilai bukanlah fokus perhatian utama pendidikan, karena sains sendiri akan membukakan jalan terbaik untuk kehidupan manusia. Lebih jauh, selama persoalan nilai bagi kalangan positivisme logis tidak termasuk dalam proses ilmiah, maka pertanyaan tentangnya adalah

tak bermakna.

Hal itu tentu mempunyai bahayanya sendiri buat pendidikan. Kita mesti mengembangkan ukuran tertentu penggunaan sains dan kepuasan atasnya bagi anak-anak kita. Lewat pendidikan pula kita harus memberikan pada mereka skill dan teknik terbaik yang bisa diperoleh dari sains. Namun, untuk tujuan apa sebenarnya kepuasan, skill, dan teknik ini? Keputusan penting atas hal tersebut mesti diolah yang tentu saja masih berdasarkan arahan dan petunjuk sains itu sendiri. Ada banyak alternatif yang bisa kita pilih. Tentu tidak semua hal bisa kita kejar secara bersamaan. Lantas bagaimana keputusan tentang apa yang mesti diraih terlebih dahulu bisa dibuat? Dalam hal ini tentu tindakan kita tidak bisa menunggu sampai semua hal tersebut divifikasi secara empiris.

Lebih jauhnya, ada banyak persoalan yang timbul terkait peran manusia dalam proses saintifik. Sebuah hipotesa mesti dibangun dan dikondisikan sebelum ia mesti diselidiki. Hipotesis tidak begitu saja muncul dalam pikiran manusia. Namun ia lahir dari akumulasi kepercayaan dan penilaian seseorang selama hidupnya, dari apa yang dia anggap sebagai utama, dan dari apa yang dia ingin ketahui perihalnya. Setelah hipotesis tersebut menjadi subjek penelitian ilmiah, siapa yang akan mengevaluasi data-data tersebut sebagaimana mereka hadir pada kita? Data-data tersebut dianalisa dan dievaluasi dalam term-term konsepsi seseorang tentangnya. Data dan bukti yang dikumpulkan akan bermakna sejauh manusia memberikan kualitas tertentu padanya. Bukankah ada nilai dalam proses ini? Bisakah pengetahuan eksis tanpa nilai? Bukankah hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Einstein?

Kalangan positivisme logis sendiri menyatakan bahwa pengetahuan murni (pengetahuan tentang apa yang terjadi atau apa yang sekiranya terjadi) tidak tepat sebagai arahan bagi manusia. Pengetahuan mesti bisa digunakan untuk melayani baik dan buruknya

akhirannya sesuatu meskipun ia tidak bisa memastikan apa yang mesti dilayani di dalam dan untuk sesuatu tersebut. Darinya, persoalan nilai, tujuan, dan rujukan mesti ditentukan penggunaannya di mana pengetahuan tersebut akan diletakkan. Meskipun dalam skema kalangan positivistik, hal-hal tersebut tidak bermakna. Serangan kalangan positivistik pada persoalan nilai-nilai terlihat mengindikasikan bahwa para pendidik mesti menolak pengembangan nilai sebagai salah satu tujuan dari sekolah. Ini pada akhirnya akan menjadi persoalan yang rumit yang menentang pemikiran kalangan positivistik itu sendiri.

Pendidikan memang dirancang untuk membawa manusia pada altar sains. Pendidikan yang hanya mementingkan perihal sesuatu yang bisa diverifikasi secara empirik ataupun pendidikan yang berorientasi pada ilmu-ilmu eksak hanya akan membuka kemungkinan dehumanisasi dan perbudakan manusia. Sebaliknya pendidikan yang menghargai persoalan nilai dan moral sangatlah tepat untuk kehidupan di dunia yang penuh dengan beragam alternatif seperti ini. Manusia mesti menentukan tujuan penggunaan sains itu sendiri. Sains hanyalah perangkat untuk menyokong kehidupan manusia, bukan untuk mengontrol dan mendikte manusia. Sains adalah untuk manusia bukan sebaliknya.

Pendidikan dengan pelbagai tujuannya mesti mengembangkan orientasi ilmiah sebagai bagian dari pertumbuhan dunianya. Ia mesti menunjukkan kegunaan metode ilmiah sebagai sebetuk pengetahuan dan informasi yang dipercaya untuk pemecahan masalah. Superioritas pemikiran ilmiah atas yang lainnya harus diggunakan untuk mengembangkan pendidikan secara lebih baik. Namun, mesti disadari bahwa sains tidak bisa menentukan tujuan, ia lebih berfungsi sebagai pendorong tercapainya tujuan tersebut. Meskipun di lain hal banyak orang tidak tertarik pada proses ilmiah tersebut. Walhasil, manusia mesti bertanggungjawab penuh atas produk sains itu sendiri. Bila manusia memilihnya untuk mengontrol dan memperbudak, maka tanggungjawabpun mesti dialamatkan pada dirinya.

Kontribusi positivisme logis pada dunia pendidikan mungkin adalah penekanannya pada persoalan kejernihan pikiran, ketelitian bahasa, konsistensi pembuktian, dan rasionalisasi tindakan. Sebab banyak pendidikan hari ini yang bersifat dogmatis, tidak jelas, dan tidak ilmiah, yang di sinilah fokus kalangan positivisme logis mendapatkan tempatnya.

### **Implikasi Positivisme Logis Pada Administrasi Pendidikan**

Kerangka kerja kalangan positivis yang rasional, logis dan ilmiah pada dasarnya mempunyai ketertarikan tersendiri bagi kalangan administrator pendidikan. Ketertarikan tersebut mungkin tidak berada pada administrasinya, namun ia tumbuh dalam minat para pelajar administrasi terhadap gerakan positivisme. Minat itu kemudian disokong juga dengan upaya-upaya untuk mengembangkan sains administrasi. Bila upaya ini berhasil, banyak kalangan percaya bahwa itu sangat penting untuk membuat perbedaan antara persoalan fakta dan persoalan nilai. Mereka mengikuti kalangan positivis yang percaya bahwa persoalan fakta merupakan bidang kajian sains, dan sebaliknya persoalan nilai tidak dapat diketahui melalui metode ilmiah itu sendiri. Darinya, bila administrasi sekolah menjadi sebuah sains (kajian), ia mesti memfokuskan dirinya pada persoalan *apa itu*, bukan pada persoalan *mesti menjadi apa*. Sebab bentuk seperti inilah yang bisa diverifikasi oleh sains.

Dikotomi antara pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang nilai, atau tentang ke-apa-an sesuatu dan kese-mesti-an sesuatu, mempunyai dampak yang penting pada administrasi secara umum dan administrasi pendidikan secara khusus. Perbedaan antara fakta dan nilai adalah titik pijak kelahiran teori sebagaimana yang ditulis oleh Simon dalam bukunya; *Administrative Behaviour* (1950) ataupun dalam karya Coladarci dan Getzels; *The Use of Theory in Educational Administration* (1955).

Sains memang mempunyai daya tarik yang sangat besar pada abad ini. Ia seolah mampu menerangkan dan menyediakan segala solusi yang dibutuhkan untuk semua persoalan administrasi pendidikan. Efeknya, kalangan administrator sekolah dituntut untuk lebih berpikir empiris, dan subjek persoalan praktik-praktik administrasi berikut pelbagai prosedur di dalamnya mesti dikembangkan dan diolah dalam kerangka study dan analisa ilmiah. Dengan itu, tekanan positivisme logis pada pengembangan metode ilmiah untuk menjernihkan konsep-konsep, asumsi, proses, dan prosedur dasar, telah menemukan implikasinya pada pengembangan pengetahuan dalam administrasi pendidikan. Seluruh kecenderungan dan minat pengembangan administrasi pendidikan di masa depan pada akhirnya mesti mengingat kontribusi pemikiran positivistik ini.

Secara historis, sejak eksperimen-eksperimen awal kalangan saintis meniscayakan pandangan yang empiris, maka filsafat atau pemikiran-pemikiran idealistik tidak lagi relevan dalam perhatian mereka. Darinya pula timbul mitos bahwa sains terlepas dari filsafat. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa hal tersebut bermula ketika sains menolak asumsi-asumsi metafisis dan epistemologis dari filsafat idealisme, namun tidak filsafat pada dirinya. Namun ketika penolakan ini membuat sains terlepas dari bentuk filsafat tertentu (idealisme) maka ia sebenarnya telah menjadikan dirinya sebetuk sistem pemikiran baru pula. Sebagai contoh, metafisika dua dunia pada idelaisme kemudian digantikan oleh dunia mekanis Isaac Newton.

Positivisme logis sebenarnya menggambarkan pemikiran empiris yang ekstrim dalam sejarah peradaban barat. Sebab ia berusaha untuk menyingkirkan segala bentuk metafisika spekulatif dan axiologi subjektif. Apa yang tertinggal hanyalah sebetuk epistemologi yang mengandung metode tertentu tentang sains fisik. Akibatnya, kalangan positisme logis kadang disebut juga sebagai kalangan filosof sains.

Kalangan administrator sekolah pada titik ini banyak yang mengalami kerumitan. Sistem filosofis manakah yang mesti dipilih bila ia menginginkan sebetulnya kajian khusus tentang administrasi (sains administrasi)? Jawaban atas hal ini tentu saja pada nantinya bergantung pada kepercayaan dan akumulasi nilai yang dipegang oleh kalangan tersebut. Apa yang akan ia percaya untuk masa depannya adalah jawaban atas pertanyaan ini.

Kalangan positivisme logis pada titik ini tentu menyerukan bahwa hanya merekalah yang bisa dipercaya. Bila administrasi pendidikan ingin menjadi kajian ilmiah, mereka harus mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bisa diverifikasi secara empirik. Persoalan nilai, etika juga moralitas tidak bisa diverifikasi secara empiris dan tidak punya konsekuensi yang penting. Kalangan administrator mesti meletakkan kepercayaannya secara total pada sains dan melupakan yang lain.

Posisi seperti ini pada titik tertentu cukup menarik kalangan administrator. Sebab ia membebaskan mereka dari tanggungjawab atas tindakan mereka. Ia berhasil menyingkirkan persoalan rumit tentang etika. Ia bahkan sangat menunjang untuk pengembangan teori-teori tentang administrasi tanpa harus memperhatikan secara serius persoalan-persoalan normatif yang melingkarinya. Sebab kajian ilmiah dapat dikembangkan tanpa harus khawatir atas persoalan nilai dan implikasi dari keberadaannya.

### **Refleksi:**

Buku B. Graff memfokuskan bahasanya pada relasi antara filsafat dan administrasi pendidikan. Salah satu tujuannya adalah menjadikan pembacanya lebih filosofis. Meskipun dalam hal ini ada dikotomi yang dikenal luas, terutama diakibatkan oleh gerakan positivistik sendiri, bahwa sains terlepas dari filsafat. Bila anda seorang filosof maka anda tidak ilmiah. Ada anggapan bahwa seseorang tidak



bisa menjadi filosofis sekaligus ilmiah. Darinya, wajar bila ada yang menyebutkan bahwa administrasi pendidikan mesti dilepaskan dari filsafat bila kita ingin menjadikannya sebetuk sains tersendiri. Sebab hanya lewat sains kajian-kajian tentang administrasi pendidikan bisa dikembangkan.

Tetapi, dalam perkembangannya, keberpihakan berlebih pada prinsip positivisme yang saintis dan “bebas nilai” akan menghasilkan masalah tersendiri. Suatu masalah, yang kemudian, melahirkan kritik baru dan melahirkan aliran filsafat lain yang mencoba menambal kekurangan positivism

## PRAGMATISME

Satu karakteristik yang muncul dalam pemikiran filsafat sebelumnya (realisme, idealisme, positivisme) adalah keinginan atau dorongan untuk mencari suatu kebenaran tertentu yang murni dan tidak berubah. Gagasan-gagasan filosofis itu berhasil menyediakan suatu sistem pemikiran filosofis dan memberikan beberapa jawaban yang memuaskan, paling tidak pada saat seseorang membangungnya sebagai kebutuhan pada sebetuk kebenaran yang murni. Namun, dari waktu ke waktu kemudian timbul para pemikir yang menolak untuk lari (*escapism*) dari dunia pengalaman keseharian, dan menganggap bahwa mungkin saja pandangan terbaik kita tentang realitas bisa ditemukan dalam dunia keseharian dan bukan dalam semesta ideal yang dikembangkan sebagai mekanisme untuk memperoleh beberapa ketentuan.

Dunia Filsafat pernah dipenuhi oleh pandangan idealistik Plato yang memberikan pemikiran tentang kebenaran yang berada pada “dunia yang lain”, dunia sana yang tak terhubung dengan pengalaman. Ini kemudian menjadi dasar dari pemikiran Idealisme. Namun, aristoteles, muridnya Plato menolak pemikiran semacam itu. Ia meletakkan kepercayaan akan kebenaran pada semesta ini, pada apa yang nyata dan bisa diamati. Aristoteles Banyak yang percaya bahwa

realitas bisa digambarkan sebagai perubahan terus-menerus yang bisa diamati dan realitas tersebut tidak mesti dipostulatkan sebagaimana beberapa gagasan tentang “dunia yang lain”. Pemikiran Aristoteles ini kemudian menjadi dasar dari filsafat empirisisme, realisme, dan positivisme.

Filsuf Yunani Kuno lain yang memengaruhi pemikiran modern adalah Heraklitus (ia hadir sebelum Plato). Heracleitos mengatakan bahwa tidak ada realitas, kebenaran ataupun nilai yang absolut dan sempurna, sebab segala sesuatu selalu berada dalam perubahan terus-menerus. Perubahanlah yang abadi, sahut Heraklitus, maka hanya persepsi inderawilah yang menjadi pengetahuan dan menekankan adanya karakter yang berubah pada jenis pengetahuan ini. Jadi Heracleitos tidak menaruh kepercayaan pada kemampuan manusia untuk membangun sebuah sistem pengetahuan yang murni dan sempurna di luar dan dalam persepsi inderawi. Pengetahuan dibangun dari keseharian dan kegunaan, inilah yang menjadi dasar pemikiran pragmatisme.

## **Pemikiran Filsafat Pragmatisme**

Pragmatisme berasal dari kata *pragma* (fakta, benda, materi, sesuatu yang dibuat, kegiatan, pekerjaan, menyangkut akibat) dan *prassein* (membuat, melakukan). Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Kegunaan praktis yang dimaksud bukan pengakuan kebenaran obyektif (seperti positivisme), tetapi kebenaran ditentukan dari apa yang memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif individu.

## **Perkembangan Pragmatisme**

Filsafat ini berkembang di Amerika, karena itu disebut juga Filsafat Amerika. Dimulai dari pemikiran Charles Sanders Pierce yang

menanggapi teori Imanuel Kant tentang akal praktis. Peirce menyatakan “Simkalah apa akibat-akibat yang mungkin mempunyai sangkut paut praktis yang dapat dibayangkan, maka kita membayangkan obyek yang kita miliki oleh konsepsi kita. Nah, konsepsi kita tentang akibat-akibat ini merupakan keseluruhan konsepsi kita tentang akibat-akibat itu”.

Sebenarnya C. S. Peirce sendiri tidak mempopulerkan teori pragmatismenya tentang makna secara luas, namun diakui bahwa ia-lah yang pertama mengolah konsep ini. Peirce, seperti halnya kaum sophis, tidak mempercayai kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan tanpa sebarang metode atau cara yang bisa menghasilkan validitas pengetahuan itu sendiri. Peirce kemudian memulai penelusuran teori semiotik. Ia percaya bahwa setiap kata adalah simbol yang tidak bisa menggambarkan makna secara jelas dan tunggal, diperlukan metode yang dapat menentukan makna yang sebenarnya dari gagasan dan konsep abstrak daripada sebagai sistem pemikiran. Metodenya, untuk menentukan sebuah makna atau gagasan, maka praktikkanlah ia; apapun konsekwensi yang ditimbulkannya, hal ini akan menentukan makna dari sebuah gagasan. Sebagai contoh, makna “pendidikan X” mesti ditemukan dari bagaimana orang mempraktikkannya serta apa konsekwensi dari pengalaman mereka akan muncul ketika gagasan tentang “pendidikan X” ini dilaksanakan dan diuji cobakan pada kehidupan sehari-hari.

Lalu pemikiran ini diteruskembangkan oleh William James. James-lah yang kemudian mengembangkan konsep pragmatisme Peirce menjadi sebuah sistem pemikiran filosofis. Lewat kuliah dan tulisannya, dia mempopulerkan teori pragmatistis tentang ‘makna’ yang diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Pemikiran James yang bahkan mencakup bidang kebudayaan ini kemudian mendasari Dewey untuk mengembangkan pragmatisme menjadi sebuah filsafat eksperimentalistik yang dikenal secara luas di Amerika sekarang ini. James menyatakan, “Makna proposisi selalu dapat lahir

dari suatu akibat tertentu dalam pengalaman tertentu kita pada masa mendatang, entah pasif atau aktif". Pragmatisme, pada titik ini, lebih mengurusi pada akibat-akibat dari suatu kebenaran. William James menyebut filsafat ini sebagai "sebuah nama baru untuk suatu jalan berpikir klasik". Pragmatisme berbeda dari bentuk-bentuk pemikiran filosofis lainnya karena beberapa hal; salah satunya adalah point khusus pragmatisme yang membicarakan perihal "kebenaran dan makna" (*the truth & meaning*). Pragmatisme menganggap bahwa esensi murni dari gagasan hanya harus ditemukan dari penggunaan mereka sebagai petunjuk bagi tindakan dan pengalaman. Dengan kata lain makna sebuah gagasan hanya akan ditemukan dalam penerapannya pada praktik kehidupan. Sedang kebenaran hanya bisa didapatkan lewat kosekwensi-konsekwensi praktis. Sebentuk ketidakpercayaan asasi terhadap gagasan-gagasan manusiawi ini, kecuali setelah gagasan-gagasan tersebut diuji pada kenyataan, merupakan kunci utama dari pragmatisme.

John Dewey dalam hal ini menganggap bahwa William James mungkin merujuk langsung pada karya-karya Francis Bacon, maksudnya Pragmatisme bisa jadi adalah sejenis Empirisisme bentuk lain dalam versi James. Kata Dewey: "saya tidak tahu apakah James berpikir layaknya Bacon, akan tetapi sejauh perhatiannya tertuju pada spirit dan suasana pencarian pengetahuan, maka Bacon sebenarnya bisa dilihat sebagai Nabi dari konsepsi pragmatis pengetahuan". Bacon memang menginginkan pengetahuan yang bermula dari kenyataan dan menghasilkan efek bagi kenyataan, sesuatu yang kemudian dikuatkan oleh pemikiran Pragmatisme James dan pengikutnya.

Francis Bacon dalam *Novum Organum* adalah orang pertama yang menggagas apa yang dikenal sekarang sebagai penelitian ilmiah. Bacon mengusulkan penggunaan penelitian ilmiah sebagai metode baru untuk menjernihkan pikiran sekaligus sebagai pendekatan untuk memperoleh pengetahuan. Dia berpendapat bahwa pengetahuan manusia bukanlah merupakan pengetahuan namun lebih merupakan

kumpulan pendapat-pendapat yang diketahui tanpa adanya verifikasi empiris.

Bacon melihat bahwa ada kecenderungan orang-orang untuk menentukan dirinya melalui segala sesuatu yang hadir lewat indranya, serta kecenderungan untuk menelisik makna dalam pengamatan tersebut yang sekiranya mendukung gagasannya sendiri. Bacon menilai bahwa orang bertindak seperti ini sebagai anggota dari komunitas masyarakat lalu mencampuradukkan antara distorsi dan subjektivitas dengan melakukannya sekali lagi sebagai seorang individu. Darinya, persepsi inderawi mesti ditafsirkan dalam terang kebudayaan di mana kita hidup dan dalam terang predisposisi individual kita sendiri. Hal inilah yang membuat validitas dan objektivitas sangat sulit. Bacon kemudian meramalkan juga bahwa sains dengan pengembangan metode pengetahuannya, mesti digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan seluruh struktur sosial serta membuatnya jadi lebih tertata, harmonis dan progressif.

Pemikiran Pierce, James, dan Bacon ini kemudian menginspirasi John Dewey untuk mengembangkan lebih lanjut teori pragmatisme. Ada beberapa titik tolak yang sama antara Dewey dan pemikir pragmatisme sebelumnya. *Pertama*, Dewey sangat tertarik dan mengikuti perkembangan sains dan percaya bahwa di dalamnya manusia bisa menemukan sebarang metode yang bisa digunakan pada semua bidang kehidupan manusia. *Kedua*, Dewey juga menganggap bahwa kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas yang absolut adalah mitos. Akan tetapi, ia juga menekankan bahwa hipotesis yang diuji-coba lewat pengalaman bisa menjadi kemungkinan terbaik untuk menjaga validitas pengetahuan (bandingkan dengan pemikiran Bacon). *Ketiga*, Dewey melihat bahwa sains merupakan aktivitas sosial. Karena itu, sains tidak hanya mesti membawa pengetahuan baru namun juga harus menyediakan jalan untuk menyelesaikan persoalan sosial dan kultural.

Saat filsafat yang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan waktu itu, sistem pemikiran baru akan muncul melengkapinya. Hal ini pulalah yang terjadi di Amerika, pada saat filsafat lama yang berlaku tidak bermanfaat dalam pembentukan negara maka muncullah filsafat yang baru. Itulah pragmatisme.

### **Konsep-Konsep Dasar Pragmatisme**

Asumsi dasar filsafat pragmatis adalah sebagai berikut :

- Manusia tidak mungkin memperoleh pengetahuan yang absolut tentang realitas. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kebenaran absolut itu muncul. Sejarah dipenuhi dengan contoh tentang “kebenaran absolut” yang tak bisa dibuktikan atau kalau tidak digururkan.
- Alam semesta selalu berada dalam perubahan dan pergerakan, segala sesuatu terus bergerak, tidak pernah dalam keadaan yang sama. Alam semesta juga terus berkembang dan berada dalam proses penciptaan terus-menerus.
- Dunia pemikiran merupakan sistem simbol, huruf, kata-kata dan formula matematis. Simbol-simbol di atas tidak memiliki realitas pada dirinya tetapi merujuk pada item praktis dan cara melakukan sesuatu. Jadi untuk mengetahui arti sebuah gagasan dan perbedaannya dengan gagasan yang lain, ia mesti diterapkan dalam praktik. Konsekwensi yang ada akan menjejalahi makna dari gagasan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh *Peirce*, “Tidak akan ada perbedaan gagasan kecuali perbedaan hasil ketika gagasan tersebut diterapkan dalam praktik”
- Metode ilmiah merupakan cara paling tepat untuk menguji pemikiran. Ketika gagasan-gagasan yang ada diterjemahkan dalam sebuah hipotesis dan kemudian diuji dengan eksperimen, maka hasilnya merupakan pendekatan yang paling dekat pada pengetahuan yang sebenarnya, yang bisa diraih manusia.

- Aspek sosial kehidupan sangatlah penting bagi setiap individu. Tanpa kontak sosial, perkembangan manusia akan terbatas. Dalam kontak sosial juga, tindakan seseorang bisa terukur dan perkembangan seseorang menjadi salah satu kemungkinan yang tak terbatas.

## **Hakikat Alam Semesta**

Realitas hanyalah apa yang bisa kita alami dalam kehidupan kita, maka sepekulasi tentang hakikatnya adalah hal yang sia-sia (*meaningless*). Dalam pandangan pragmatisme, tidak ada dasar untuk doktrin tentang realitas absolut. Realitas tidak bisa didefinisikan dengan satu ketentuan ataupun yang lain. Untuk mengetahui realitas seseorang mesti membenamkan diri ditengah-tengahnya, lalu mengalaminya sebanyak yang ia bisa. Apa yang dialami oleh manusia dalam kehidupan keseharian adalah satu-satunya realitas untuk diketahui. Karena itu Pragmatisme dalam pandangan tertentu merupakan sebuah filsafat naturalistik.

Pragmatisme memang mendasarkan pengetahuannya pada kesan-kesan inderawi dan penelitian ilmiah seraya menolak gagasan-gagasan supranatural (seperti gagasan Plato atau filsuf idealisme lainnya) Selain itu, dunia alamiah bagi mereka lebih memuaskan daripada dunia yang dipostulatkan oleh filosof-filosof alam pada periode awal. Mereka lebih menyukai penemuan sains, bukan spekulasi, mengenai dunia ini. Dunia alamiah dalam pengertian sains modern, bagi kaum pragmatis, telah dikembangkan menjadi sebuah dunia yang lebih mengagumkan daripada postulat supranatural yang dikemukakan oleh filosof-filosof awal yang seolah lari dari ketidaksempurnaan semesta sebagaimana bisa kita lihat.

Gagasan lain seorang pragmatis adalah bahwa alam semesta merupakan penciptaan terus-menerus. Sains membuktikan ini, misalnya penemuan-penemuan astronomi menunjukkan bahwa alam se-



mesta yang mengembang, juga adanya fakta bahwa spesies baru kehidupan terus muncul terutama pada dunia serangga. Bukti lain ditemykan pada teori relativitas Einstein. Fakta bahwa sebuah materi yang dianggap mati, ternyata dapat menjadi energi yang sangat kuat sebagaimana yang didapat pada energi nuklir, juga merupakan bukti lainnya.

## **Hakikat Kebenaran**

Kebenaran adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Di tengah keberubahan yang terus terjadi pada dunia ini, manusia membutuhkan sejenis tonggak yang membuatnya tak terbawa arus. Semua orang mencoba merumuskan “tonggak kebenaran” itu. Dalam rangka menghadirkan kepastian tersebut, beberapa filosof seperti Plato kemudian mempostulatkan kebenaran sebagai sebetuk ketenangan sebuah dunia yang berada di luar dunia kita yang terus berubah ini. Sementara yang lain, dengan tujuan yang sama, menganggap bahwa kebenaran harus ditemukan dari hukum-hukum abadi yang mengatur jalannya peristiwa di dunia, hukum yang bisa ditemukan melalui penelitian ilmiah yang baik. Filsafat idealisme, manusia seolah dituntun oleh kesempurnaan sebuah dunia di luar dirinya, sedang pada filsafat realisme manusia seolah didorong oleh hukum-hukum abadi realitas semesta ini.

Pragmatisme menolak konsepsi seperti ini dan menyatakan bahwa kebenaran yang sejati (yang sempurna dan tak berubah itu) tidak akan pernah ditemui manusia di dunia ini. Kebenaran, dalam konsepsi kalangan pragmatis, tidaklah abadi namun kebenaran merupakan alat untuk menguji pengetahuan dan sebagai dasar dalam penerapan. Kebenaran ini ditemukan melalui pengalaman sebagai proses interaksi seseorang dan pikirannya dengan lingkungannya lewat berbagai aktivitas. Pengetahuan bisa diperoleh dan diuji dengan berbagai cara, makhluk hidup menggunakan intelegensinya untuk mengatasi permasalahan yang diatasi. Bila permasalahan tersebut

bisa dipecahkan dengan jawaban yang memuaskan maka pemecahan tersebut untuk sementara bisa disebut sebagai kebenaran. Metode utama yang sering digunakan lebih bersifat eksperimental, menggunakan pengalaman akal dalam pemberian alasan sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Mengetahui merupakan aktivitas manusia yang bersifat tutup buka, yang terus berlangsung, dan tidak lepas dari kesalahan, makanya harus terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan merupakan instrument dan bukan merupakan jawaban akhir.

## **Hakikat Manusia**

Apakah manusia menurut Pragmatisme?

Untuk menjawab itu ada pertanyaan lain yang harus dijawab: dapatkah manusia berkembang dalam alam semesta ini? Para pragmatis menjawab biasanya menjawab “ya” sambil menunjuk teori Evolusi Darwin sebagai contohnya.

Kaum pragmatis berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang tidak terpisahkan, ia berkembang bersama alam. Proposisi ini menyatakan bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Ia menolak dualisme tradisonal antara pengalaman sejati dalam diri manusia dan pengalaman alamiah dunia nyata. Kehidupan manusia merupakan hasil alamiah dari kondisi yang berlaku dalam sejarah semesta, dan ia tidak membutuhkan penjelasan supranatural. Pikiran pun merupakan perkembangan alami yang terjadi seiring dengan perkembangan fisik seseorang dan juga merupakan mekanisme kontrol tubuh dalam berhubungan secara efektif dengan lingkungannya. Pikiran dan tubuh tidaklah terpisah namun merupakan bagian organisma yang tak terpisahkan..

Kalangan pragmatis percaya bahwa setiap manusia memiliki cara, kemampuan, dan keunikan tersendiri dengan yang lainnya. Manusia juga merupakan pembuat tujuan dan pencapai tujuan. Kare-

nanya perilaku manusia tidak bisa dilihat hanya sebagai respons terhadap rangsangan, namun kemampuan dalam berinteraksi di tengah perkembangan dunia dan alam semesta.

## **Hakikat Masyarakat**

Prinsip dasar pragmatisme adalah kegunaan akibat-akibat. Karena itu kehidupan sosial pada dasarnya adalah point penting dalam pemikiran kalangan pragmatis. Menurut mereka, semua aksi harus dilihat dalam konteks konsekuensi sosial. Masyarakat merupakan sumber yang menopang khazanah seseorang dan memba-wanya pada keberhasilan. Tanpa pengaruh sosial, seseorang tidak akan bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya secara maksimal. Penggunaan bahasa, perkembangan kesadaran, menurut kalangan pragmatis, timbul dari interaksi seseorang dengan dan dalam masyarakatnya (konteks sosial). Dari interaksi ini pula seseorang bisa menemukan nilai dirinya. Ketidakpercayaan kalangan pragmatis pada sistem dogmatis yang kaku, penekanan pada tatanan sosial selaras pula dengan pandangan mereka bahwa pola sosial dan pemerintahan, struktur dan fungsi organisasi, tidak mesti didasarkan pada gagasan yang kaku, akan tetapi mesti dikembangkan sebagai suatu kebutuhan pengembangan seseorang.

Konsepsi pragmatisme tentang masyarakat ini membawa pekananan pada hakikat moralitas. Dewey dalam hal ini menyatakan bahwa kualitas moral dan sosial merupakan hal yang identik. Konsep moral merupakan produk pengalaman manusia dan bisa berubah dan berkembang. Dalam asumsi pragmatisme tentang perkembangan kreatif semesta, tidak ada hukum-hukum moral yang kaku sebagaimana yang disebut dalam pandangan supranatural kalangan idealis atau hukum-hukum alam yang abadi sebagaimana diasumsikan oleh kalangan realis. Karena ketiadaan hukum-hukum moral yang kaku ini, moralitas dalam pandangan pragmatisme menjadi *moralitas konsekwensi*. Konsep-konsep moral adalah produk pengalaman manusia

yang bisa berubah dan tumbuh sebagai pengalaman yang akan menentukan jalan kehidupan dan tindakan secara bersama. Individu yang bermoral adalah orang yang mempertimbangkan konsekuensi perilaku baik secara individu ataupun umum dan yang selalu mempertanyakan apakah benar konsekuensinya merupakan cermin dari nilai diri yang sebenarnya. Ada dua pertanyaan berkenaan dengan perilaku moral ini yakni; pertama, apa konsekuensi perso-nalnya? Dan kedua, apa konsekuensi umumnya?

Darinya, moralitas dalam teori pragmatisme menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab pada setiap aksi yang dilakukannya ditengan kelompok sosialnya. Pertama, setiap individu perlu menentukan konsekuensi yang diharapkannya, kemudian harus sadar dengan konsekuensi perilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya, lalu individu tersebut perlu memiliki komitmen dan dorongan dari dalam dirinya.

### **Pragmatisme dan Pendidikan**

Kontribusi pragmatisme pada budaya terlihat jelas dalam lembaga-lembaga sosial kita terutama pendidikan. Kalangan pragmatistis menganggap bahwa manusia merupakan keberadaan yang tunggal sekaligus jamak. Manusia adalah produk alam dan kehidupan sosialnya. Yang bisa berkembang menjadi “baik” atau “buruk” tergantung pada masyarakat dan lembaga sosial sekitarnya dalam memperlakukan dia. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa pikiran manusia bukanlah entitas spiritual yang terpisah dari raganya melainkan sebagai cara mengalami kualitas interaksi seseorang dengan lingkungannya. Konsep manusia seperti ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang besar pada sekolah dalam pemberian pelayanan terbaiknya.

Pragmatisme juga menganggap setiap lembaga sosial sebagai pelayan, bukan sebagai tuan. Maka, tidak dibenarkan bila sebuah

lembaga berusaha memaksa seseorang untuk menerima nilai tertentu. Menurut pragmatisme, manusia berperan sebagai tuan dari lembaga tersebut dan pendidikan harus bersifat demokratis serta melibatkan setiap kalangan baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Bentuk kehidupan demokratis ini sangatlah bermanfaat dalam pembentukan insan yang bertanggung jawab, bisa mengarahkan dan mengontrol dirinya sendiri.

Pragmatisme dianggap sangat peduli pada pendidikan karena salah satu pengagasnya, John Dewey kebetulan memiliki ketertarikan pribadi pada perkembangan pendidikan sekaligus mengarahkan pemikiran filosofisnya pada bidang tersebut. Perkembangan seseorang harus terjadi pada konteks sosial dan orang tersebut harus diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan takdirnya sendiri dalam merasakan pendidikan sebagai hal yang sangat penting. John Dewey dalam poin ini mengatakan bahwa pendidikan dalam pemikiran pragmatisme, merupakan proses pengembangan disposisi dasar, intelektual dan emosional, baik terhadap masyarakat, dunia fisik, maupun individu lain.

Siswa	Penghargaan dalam kehidupan personal dan sosial
Sekolah	Sebuah organisme dengan kompleksitas yang luar biasa dan kemampuan untuk tumbuh
Kurikulum	Mengandung pengalaman yang teruji sebagai elemen penting perubahan. Kecenderungan dan kebutuhan siswa dirumuskan dengannya ke dalam bentuk sekolah dan pengadaan kurikulum
Pendidikan liberal	Menghilangkan perbedaan antara pendidikan liberal dan praktis atau vokasional
Metode	Mempertimbangkan metode berbasis aktivitas—pembelajaran dengan praktik ( <i>learning by doing</i> )
Peran guru	Untuk mendampingi dan mengarahkan pengalaman pembelajaran tanpa campur tangan terlalu dalam pada minat dan kebutuhan siswa

## Pendidikan sebagai Pemecahan Masalah

Pragmatisme pada dasarnya meletakkan kepercayaan yang besar pada metode ilmiah sebagai perangkat untuk menyelesaikan persoalan individu maupun persoalan masyarakat. Kalangan pragmatis juga menganggap bahwa sains tidak hanya berurusan dengan problem fisik, akan tetapi ia bisa diterapkan pada seluruh bidang kehidupan. Sains, lanjut mereka, tidak harus dibatasi sebagai bidang perseorangan melainkan ia mesti diperluas pada khalayak dalam bidang sosial. Ada dua nilai yang bisa diturunkan dari penerapan umum sains yakni; *pertama*, penggunaan sains dalam kegiatan yang lebih luas memerlukan pengetahuan praktis dan kecakapan seseorang untuk berurusan dengan keadaan darurat yang mungkin timbul. *Kedua*, dengan menerapkan metode ilmiah pada seluruh bidang kehidupan, maka sikap, prosedur, dan teknik ilmu pengetahuan (sains) bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Kalangan pragmatis menganggap bahwa kontribusi penting sains adalah ia dapat mengajarkan seseorang untuk berpikir jernih dan objektif serta memiliki alasan dan keputusan yang lebih baik. Makanya nilai ilmu pengetahuan tidak terletak pada keberhasilan yang dibuatnya melainkan pada perannya dalam membantu dalam mewujudkan masyarakat rasional.

Karena beberapa point penting yang diberikan oleh sains dalam kebudayaan kita, maka konsep pragmatis mengenai pendidikan lebih berpusat pada penerapan metode ilmiah dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini yang dimaksud pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun lebih merupakan cara hidup kita semua. Dengan demikian, pendidikan formal menurut kalangan pragmatis harus mengajarkan penelitian ilmiah pada penanganan masalah dan isu-isu yang sesuai dengan tingkat usia dan kematangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu mereka berpendapat bahwa pendidikan mesti tumbuh sebagai mode intelektual. Para siswa harus diajarkan metode kecakapan berikut latihan dalam penerannya.

Singkat kata, mereka mesti dibimbing untuk melihat penggunaan metode ini pada seluruh bidang kehidupan secara umum.

## **Keberlangsungan Pengalaman**

Konsep pendidikan di atas bertolak belakang dengan pendapat kalangan tradisional yang berasumsi bahwa seorang anak bersekolah adalah dalam rangka mengumpulkan setumpuk pengetahuan. Mungkin pernyataan terbaik dari konsep pragmatisme tentang pendidikan ini adalah definisi Dewey yang mengatakan pendidikan sebagai “rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang dapat menambah nilai pengalaman dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi rangkaian pengalaman berikutnya”. Tujuan utama pendidikan, seperti yang bisa diturunkan dari definisi ini adalah, transformasi pengalaman untuk mewujudkan perkembangan atau perubahan pada siswa. Mengutip Bod, “sekolah, idealnya, adalah tempat dimana siswa dapat melakukan berbagai aktifitas tertentu yang mengarah pada proses rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman”.

Kalangan pragmatis juga menekankan pentingnya pengembangan seorang anak secara keseluruhan, baik secara biologis, psikologis, dan secara sosial dalam sebenuk pengalaman yang merupakan pendidikan. Point ini membutuhkan penataan lingkungan siswa secara total dalam proses pendidikan. Darinya pengalaman sekolah dalam filsafat pragmatisme merupakan sesuatu yang dapat memberikan makna pada kehidupan yang terus berlanjut baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

## **Pragmatisme dan Administrasi Pendidikan**

Prinsip-prinsip dasar filsafat pragmatisme mempunyai implikasi yang sangat besar bagi administrasi pendidikan. Pragmatisme memberikan tekanan baru pada potensialitas manusia dalam membentuk nasibnya sendiri. Pada saat yang sama dan disebabkan oleh penekanan ini, ia juga meletakkan tanggungjawab pada seseorang

untuk menjadikan dirinya sendiri serta dunia yang ditempatinya. Penekanan pada potensialitas seseorang dan pembebanan tanggungjawab padanya menjadikan administrasi sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang diindikasikan oleh pemikiran filosofis lainnya. Dalam pragmatisme, tidak ada kemutlakan, tidak ada realitas absolut, tidak ada figur ototiter, tidak ada kebenaran abadi di mana manusia mengembalikan persoalan-persoalan padanya. Seseorang mesti mencari jawabannya sendiri.

Pragmatisme memberikan dasar filosofis untuk administrasi demokratis yang sebenarnya. Setiap kalangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan karena semuanya harus menanggung konsekuensi keputusan tersebut. Pembuatan keputusan tidak dipercayakan begitu saja pada kaum elit intelektual, pemilik kekayaan, para manajer, para profesional, atau para administrator namun melibatkan para guru, dan yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan.

Administrasi selalu peduli pada setiap upaya yang mengarah pada evolusi, koordinasi, dan pencapaian tujuan. Dalam kegiatan ini, kaidah, peraturan, batasan, dan hukum akan sangat berperan. Bagaimana seorang administrator menjalankan mekanisme seperti itu akan menjadi point paling penting dalam menentukan langkah-langkah operasional atau bahkan seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut pragmatisme, kasidah dan peraturan bukanlah alat yang dibuat untuk memberikan batasan, namun diolah untuk memberikan kebebasan. Misalnya, adanya peraturan mengendarai mobil di lajur sebelah kanan jalan bukan untuk melarang pengemudi memakai lajur kiri, tapi untuk menghindari kekacauan yang mungkin timbul bila tidak ada kesepakatan di lajur mana mobil kita berada. Pragmatisme menolak gagasan bahwa larangan dan kebebasan adalah dua hal yang bertolak belakang. Pembatasan, baik sebagai aturan administratif maupun undang-undang legislatif, pada dasarnya bertujuan untuk



membebaskan orang agar dapat berkonsentrasi pada hal yang lebih produktif dan kreatif.

Filsafat pragmatisme mengharapkan administrator sekolah untuk menguji dan menilai kepercayaannya seperti halnya sebuah hipotesa diuji. Kebenaran atau kesalahan—moralitas mereka—bisa ditemukan pada konsekuensi yang dihasilkannya. Pengalaman-pengalaman tertentu kemudian diterima dan ditolak berdasarkan evaluasi cerdas konsekuensi tersebut. Filsafat pragmatisme ini juga mendorong administrator untuk meneliti hakikat proses administratif dan berangkat dari tindakan berikut segala aspeknya berdasarkan kecerdasan. Ini selaras dengan gagasan awal Peirce tentang keharusan pengujian gagasan dan pengalaman untuk menentukan makna sebenarnya.

Selain tersebut di atas, pragmatisme juga menjadi dasar filosofis bagi partisipasi dalam peran kepemimpinan administrator sekolah dalam membuat kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan. Masyarakat modern menuntut partisipasi seperti ini bila harus membuat sebuah keputusan yang cerdas. Pragmatisme, lewat peneknannya pada peran konteks sosial bagi individu dan gambarnya tentang realitas sebagai proses di mana individu berpartisipasi, meletakkan administrator dalam, mengutip ungkapan James, “diteengah-tengah sesuatu”.

Selain itu, ada pesan tersirat dari pemikiran pragmatisme terhadap peran para pendidik dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan esensi demokrasi. Diakui atau tidak para pendidik dan publik secara berkesinambungan terlibat dalam proses penentuan arah pendidikan. Para pendidik dalam hal ini dituntut untuk aktif dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman umum yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan, dalam mempertimbangkan alternatif, dan mewujudkan keputusan tersebut. Dalam hal ini pihak publik harus terlibat didalamnya bila demokrasi ingin diterapkan.

Menurut pragmatisme, bila publik diberi kesempatan mengetahui isu-isu dasar maka alternatif terbaik bisa dibuat dan hal ini sangat penting demi terciptanya masyarakat yang demokratis.

Prinsip-prinsip dasar filsafat pragmatisme mempunyai implikasi yang sangat besar bagi administrasi pendidikan. Ada beberapa prinsip dasar pragmatisme yang memengaruhi administrasi pendidikan, yaitu bahwa Pragmatisme meyakini bahwa manusia memiliki *potensi dalam membentuk nasibnya sendiri*.

Manusia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri serta dunia yang ditempatinya. Pragmatisme meyakini bahwa tidak ada kemutlakan, tidak ada realitas absolut, tidak ada figur ototiter, tidak ada kebenaran abadi tempat manusia mengembalikan persoalan-persoalan. Jawaban atas persoalan mesti dicari sendiri melalui pengalaman.

Ketiga prinsip pragmatisme menjadi dasar filosofis badi *administrasi demokratis*. Administrasi demokratis adalah administrasi yang menganggap bahwa setiap pihak harus terlibat dalam pembuatan keputusan karena semuanya harus menanggung konsekuensi suatu keputusan.

Administrasi selalu peduli pada setiap upaya yang mengarah pada evolusi, koordinasi, dan pencapaian tujuan..

*Kaidah dan peraturan bukanlah alat yang dibuat untuk memberikan batasan, namun diolah untuk memberikan kebebasan*. Misalnya, adanya peraturan mengendarai mobil di lajur sebelah kanan jalan bukan untuk melarang pengemudi memakai lajur kiri, tapi untuk menghindari kekacauan yang mungkin timbul bila tidak ada kesepakatan di lajur mana mobil kita berada.

*Pragmatisme menolak gagasan bahwa pembatasan dan kebebasan adalah dua hal yang bertolak belakang. Pembatasan, baik*

*sebagai aturan administratif maupun undang-undang legislatif, pada dasarnya bertujuan untuk membebaskan orang agar dapat berkonsentrasi pada hal yang lebih produktif dan kreatif.*

*Filsafat pragmatisme mengharapkan administrator sekolah untuk menguji dan menilai kepercayaannya seperti halnya sebuah hipotesa diuji. Kebenaran atau kesalahan—moralitas mereka—bisa ditemukan pada konsekuensi yang dihasilkannya. Pengalaman-pengalaman tertentu kemudian diterima dan ditolak berdasarkan evaluasi cerdas konsekuensi tersebut.*

*Filsafat pragmatisme ini juga mendorong administrator untuk meneliti hakikat proses administratif dan berangkat dari tindakan berikut segala aspeknya berdasarkan kecerdasan. Ini selaras dengan gagasan awal Peirce tentang keharusan pengujian gagasan dan pengalaman untuk menentukan makna sebenarnya.*

*Selain tersebut di atas, pragmatisme juga menjadi dasar filosofis bagi partisipasi dalam peran kepemimpinan administrator sekolah dalam membuat kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan. Masyarakat modern menuntut partisipasi seperti ini bila harus membuat sebuah keputusan yang cerdas. Pragmatisme, lewat penekanannya pada peran konteks sosial bagi individu dan gambarnya tentang realitas sebagai proses di mana individu berpartisipasi, meletakkan administrator dalam, mengutip ungkapan James, “ditengah-tengah sesuatu”.*

Selain itu, ada pesan tersirat dari pemikiran pragmatisme terhadap peran para pendidik dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan esensi demokrasi. Diakui atau tidak para pendidik dan publik secara berkesinambungan terlibat dalam proses penentuan arah pendidikan. Para pendidik dalam hal ini dituntut untuk aktif dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman umum yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan, dalam mempertimbangkan

alternatif, dan mewujudkan keputusan tersebut. Dalam hal ini pihak publik harus terlibat didalamnya bila demokrasi ingin diterapkan. Menurut pragmatisme, *bila publik diberi kesempatan mengetahui isu-isu dasar maka alternatif terbaik bisa dibuat dan hal ini sangat penting demi terciptanya masyarakat yang demokratis.*

### **Refleksi:**

Seorang sastrawan Perancis, Charles Baudelaire, pernah menyatakan bahwa bukunya sepantasnya dianggap seperti kacamata yang sebaiknya dilepas saja kalau tidak punya kegunaan lagi untuk sang pembaca. Ia hendak menyatakan bahwa teori adalah kacamata yang dapat memperlihatkan dunia dengan pandangan tertentu. Bila sudah tak bisa menampilkan apa-apa, letakkan saja, ganti dengan kacamata yang lain. Teori sebagai alat atau kacamata yang ada untuk dipakai secara pragmatis (*pragma*, kata Yunani itu, berarti 'aksi' atau 'tindakan') yaitu untuk berbuat sesuatu dengannya. Pragmatis berarti teori yang menekankan pada tindakan, pada aksi, yang kita dapat melakukan sesuatu dengan teori itu.

Ada banyak mahasiswa yang terjebak pada gagasan-gagasan besar teori, namun gagap ketika diminta untuk menerapkan teori termaksud. Gagasan tinggal gagasan, kepehaman tinggal kepehaman, ia hanya berharga ketika bisa diterapkan (inilah prinsip belajar pragmatisme)

Kesulitan yang sering muncul pada mahasiswa biasanya adalah menghubungkan apa yang ditulis oleh orang lain—biasanya si ilmuwan terkenal—dengan tulisan diri sendiri. Untuk dapat menangani kesulitan itu perlu kita periksa bagaimana kita memandang "si teori itu". Maksud saya, apakah kita cenderung melihat teori sebagai "puncak penciptaan" ilmu-ilmu sosial yang harus dihafalkan secara kaku atau sebagai sesuatu yang bisa digunakan, dipakai saja; apakah kita melihat teori sebagai suatu "budaya adiluhung" yang perlu

dipelihara tetapi lebih baik tidak disentuh karena takut melakukan kesalahan, ataukah sebagai alat yang dapat mengembangkan pikiran dan tulisan diri sendiri. Pragmatisme mengajak kita untuk memandang teori sebagai „alat yang dapat mengembangkan pikiran“ kita.

Perbedaan cara memandang teori ini sangatlah penting dan memang membuat perbedaan pada cara belajar. Cara belajar pragmatisme bukan sekadar menghafal, melainkan mempraktikkan atau mencari bukti-bukti secara terus-menerus. Ukurannya adalah kegunaan. Sepertinya, kita harus mulai menseriusi pragmatisme sebagai landasan pendidikan dan administrasi pendidikan. Terutama agar pendidikan tidak menghasilkan penghafal yang fasih, sembari tidak paham karena tak bisa mempraktikannya!

## EKSISTENSIALISME

Eksistensialisme adalah filsafat yang memuliakan dan mendorong manusia untuk mengeluarkan potensi dirinya. Eksistensialisme itu lahir diantaranya untuk menyelamatkan manusia dari saintisme (cara pandang atau cara hidup yang bertumpu pada sains). Saintisme –salah satu eksek dari positivisme-- bagi kalangan eksistensialisme dianggap membawa efek dehumanisasi.

Eksistensialisme bertujuan untuk a) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia seharusnya hidup sesudah ilusi tentang kebebasan hancur berantakan dalam sejarah sains; b) melawan pandangan-pandangan yang menempatkan manusia pada tingkat impersonal atau abstrak.

Menurut Karl Jaspers, eksistensi ialah yang paling berharga dan paling otentik dalam diri manusia. Sebab, eksistensi berarti penghayatan mengenai kebebasan total yang merupakan inti manusia. Eksistensi adalah *aku* yang sebenarnya, unik dan sama sekali subyektif. Bagi Jaspers, dengan eksistensi manusia menjadi dirinya sendiri. Dalam hal ini, eksistensi tidak dipahami secara klasik sebagai keberadaan, tetapi dengan makna yang diambil dari Kierkegaard, yakni cara berada manusia. Dengan demikian, seperti menurut Sartre,

eksistensi bersifat praksis. Disebut demikian, karena pusat perhatian eksistensialisme adalah situasi manusia. Ia merupakan pengalaman langsung (eksistensi), bersifat pribadi dan dalam batin manusia. Jadi, eksistensi bukanlah obyek dari berpikir abstrak atau pengalaman kognitif. Eksistensialisme adalah gerakan filsafat (juga teologi dan seni) yang lebih menekankan eksistensi manusia dan kualitas-kualitas yang menonjol bagi pribadi-pribadi dan bukan kualitas manusia yang abstrak, alam atau dunia secara umum.

## **Mengenal Pemikiran Eksistensialisme**

Eksistensialisme, sebagai sebuah gerakan filsafat, dengan demikian, lebih menekankan pada upaya mempertahankan kedudukan manusia. Pertama, menurut eksistensialisme, pemikiran hendaknya bertitik tolak dan mempertahankan antitesis antara subyek dan obyek. Manusia sebagai subyek tidak menjadi obyek pemikiran. Karena itu, pemikiran ilmiah tentang manusia harus ditolak. Kedua, manusia tidak menjadi obyek yang dibentuk di bawah pengaruh keniscayaan alam dan sosial. Melainkan, manusia membentuk dirinya dengan tindakan dan perbuatannya. Seorang manusia, bebas mengambil tanggung-jawab atas apa yang diperbuatnya, dan tidak membenarkan diri berdasarkan hal-hal sekitarnya. karena itu manusia bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah.

Beberapa ciri pokok eksistensialisme adalah: a) motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada, Heidegger menyebutnya dengan Dasein (berada di sana, memberikan respon terhadap ruang hidupnya) yang bukan seiende (sekadar ada, tergeletak tanpa respons); b) bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari

keadaannya; c) di dalam filsafat eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka, proyek yang belum selesai, yang masih terus menjadi; d) filsafat eksistensialisme memberi tekanan pada pengalaman konkret, pengalaman eksistensial.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pemikiran dasar dari eksistensialisme:

### **Hakikat alam semesta**

*Prinsip fundamental pemikiran eksistensialisme:* individu memiliki kebebasan mutlak untuk memilih. Ketika seseorang bergantung pada faktor-faktor di luar dirinya (seperti; ilmu pengetahuan, Tuhan, pemerintah, atau kesepakatan sosial) sebagai penentu pilihannya, maka ia sebenarnya telah gagal untuk mengetahui hakikat realitas.

Karena itu, alam bukanlah sesuatu yang tetap dan dapat ditemukan kebenarannya melalui pengalaman empiris. Bila alam dianggap tetap, maka manusia hanya menyesuaikan diri atau alamiah yang menentukan kepastian-kepastian. Sedang eksistensialisme meyakini bahwa manusialah yang menjadi penentu;

Manusia adalah penentu, tidak ada sesuatu pun yang bermakna kecuali setelah manusia memberikan makna kepadanya. Realitas adalah apa yang dinyatakan manusia setelah mengalaminya. Tanpa kehadiran manusia realitas bukan apa-apa. Realitas apapun tanpa keberadaan manusia di dalamnya hanyalah dugaan, ia tidak bisa diketahui.

Untuk mengetahui sesuatu itu nyata, seorang eksistensialis mesti “menemukannya, mengalaminya, dan menjadi bagian dari sesuatu itu”. Kesemuanya dilakukan dengan kebebasan memilih.



## **Prinsip-prinsip tentang manusia**

### *a) Fokus Utama Eksistensialisme tentang Manusia*

Perhatian utama eksistensialis adalah perbaikan kualitas individu dan kedirian seseorang. manusia bisa menetapkan siapa dirinya dan apa yang akan dilakukannya. Namun, saat ini, siapa diri dan apa yang akan dilakukan manusia dikekang oleh kehendak di luar diri manusia. Kehendak luar diri itu misalnya, arahan orang lain, kesepakatan sosial, hasrat untuk diterima oleh masyarakat, dan kecenderungan mencari rasa aman atau perlindungan.

Seseorang tak lebih dari 'hewan' tatkala membiarkan dirinya dikontrol oleh kekuatan di luar dirinya. Eksistensialisme mendorong manusia untuk: keluar dari kesepakatan sosial dan nilai-nilai ortodoks yang mengungkungnya, sertamenghadapi realitas yang sebenarnya dengan cara eksis sebagai individu yang hidup bebas dengan segala kecemasan, kesedihan, dan keputusasaannya.

### *b). Hakikat Manusia*

Manusia dianggap dalam kondisi terus-menerus dalam proses menjadi, merumuskan eksistensi dirinya dari titik keberangkatan kondisinya kini menuju titik akhir dari apa yang akan dilaluinya. Hakikat manusia hanya bisa dipahami dalam konteks: terus berproses, mengalami kebebasan mutlaknya untuk menetapkan hakikat dirinya, dan memilih untuk akan menjadi apa.

## **Kebebasan dan Tanggung jawab**

Hakikat manusia adalah keadaannya yang bebas untuk memilih, untuk mencipta, dan untuk membuat dirinya sebagaimana yang ia kehendaki. Manusia adalah miliknya sendiri yang sejati dalam dunia yang penuh dengan segala kemungkinan. Dari kebebasan akan lahir tanggungjawab dan komitmen. Komitmen itu adalah: untuk menjadi

bebas manusia mesti “menghindar dari pencarian perlindungan pada otoritas supernatural”.

Tanggung jawab berarti, apapun hasil pencarian (berhasil atau gagal) manusia harus menanggungnya sendirian. Maka Manusia harus menerima ketakutan, kesedihan, dan keputusan sebagai bagian dari dirinya, suatu pengalaman yang akan diterimanya ketika ia ingin memahami makna sejati kebebasan dalam dunia tanpa makna ini.

### **Kondisi Akhir Manusia**

Tidak ada konsep *apriori* (yang mutlak benar begitu saja) tentang apa itu dan akan menjadi apa manusia. Siapa dan akan menjadi apa manusia ditentukan oleh totalitas pilihan dan tindakan bebasnya dalam menentukan dirinya sebagaimana yang diinginkan. Pada saat yang sama, manusia dituntut oleh tanggungjawab sebagai konsekuensi dari kebebasan itu. Yaitu menerima segala resiko (berhasil atau gagal) dari pilihannya itu.

### **Hakikat Nilai**

Fokus Utama tentang Nilai: Eksistensialisme lahir sebagai pemberontakan atas nilai-nilai manusia modern. Bagi kalangan eksistensial, nilai-nilai tradisional menggambarkan seperangkat peralatan yang memproteksi kebiasaan manusia dari hidup yang sebenarnya, dari bagaimana arti menjadi individu yang hidup. Nilai-nilai tradisional dianggap menghalangi manusia untuk melaksanakan kebebasan memilih. Prinsip dasarnya adalah Manusia mesti bebas secara utuh untuk memilih nilai-nilai yang digunakan untuk menjalani hidup. Maka tak ada nilai yang secara *a priori* baik atau buruk dalam hidup ini, semuanya tergantung pilihan bebas manusia. Bila ada nilai yang digunakan, maka nilai-nilai itu adalah buatan dirinya atas pilihan dirinya sendiri.

## Prinsip Nilai

Prinsip nilai eksistensialisme: tidak ada nilai bagi sesuatu kecuali setelah manusia memberikan nilai padanya. Ada beberapa prinsip nilai dalam eksistensialisme: Nilai haruslah dapat menghubungkan manusia dengan kehidupannya. Nilai tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari eksistensi.

Kebaikan dan kejahatan bukanlah sebetuk sifat atau kualitas, melainkan “cara berada” manusia. Manusia mesti menolak gagasan tentang kebaikan, keburukan, kebenaran atau kesalahan dari luar, namun mesti mengembangkan konsepsinya sendiri tentang benar dan salah, baik dan buruk, dalam kerangka cara beradanya di dunia.

Tidak ada nilai yang secara intrinsik lebih baik dari yang lain. Kebaikan dan keburukannya tergantung pada seseorang yang menginginkannya.

### Prinsip-prinsip umum Eksistensialisme :

Hakikat individu	Dualisme pikiran dan tubuh, dengan penekanan tertentu pada pikiran
Hakikat realitas	Keberadaan semesta fisik yang independen, pembuktian adanya gangguan pada realisasi tujuan personal. Realitas spiritual bisa eksis dan tidak.
Hakikat pengetahuan	Kecenderungan skeptis sekaligus keinginan untuk mengakui kemungkinan memperoleh kebenaran
Hakikat nilai	Keragaman standar moral adalah hal yang pasti. Semua orang bebas untuk memilih standar mereka sendiri, akan tetapi beberapa standar moral sebagai jangkar kehidupan personal bersifat imperatif.

### Implikasi Eksistensialisme Bagi Pendidikan

Eksistensialisme lahir dari kekecewaan komunal pada hal-hal

klasik yang dianggap mengekang kebebasan manusia. Karena itu, eksistensialisme merumuskan gagasan yang mendorong manusia untuk kembali pada diri yang sejati, pada keberadaan individualnya. Cara ini diyakini dapat mengantarkan manusia pada pemenuhan jati dirinya.

Bagi eksistensialisme, pendidikan menghadapi paradoks orientasi, yaitu berkisar pada jawaban atas pertanyaan berikut ini: apakah fokus perhatian utamanya adalah individu ataukah masyarakat?

Di satu sisi, pendidikan formal berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas individu; dan pada sisi yang lain, ia juga berupaya mengembangkan karakteristik-karakteristik yang akan menjadikan seseorang lebih baik dalam kehidupan sosialnya.

Eksistensialisme menolak pendidikan sebagai sosialisasi. Penolakan eksistensialisme pada pendidikan sebagai sosialisasi (proses memasyarakatkan individu). Alasan mendasarnya adalah bahwa keutamaan individu tidak terletak pada kesesuaian seseorang dengan tata aturan sosial, keutamaan individu ditentukan oleh kebebasan individu. Kemudian penekanan pada proses sosialisasi dan kelompok akan mematikan, atau menindas kreativitas, orisinalitas, dan perkembangan bebas personalitas seseorang. Kebersamaan membuat individu menjadi sama dengan individu yang lain.

Eksistensialisme juga menolak pendidikan yang terlalu terarah pada penguasaan sains dan teknologi. Dasar penolakan ini adalah keyakinan eksistensialisme bahwa manusia menentukan tindakan berdasarkan kehendak dirinya, bukan kehendak atau kontrol luar dirinya dan sains/teknologi memiliki peluang besar untuk mengontrol kehidupan manusia. Penemuan ilmiah secara otomatis akan menentukan tindakan manusia, misalnya manusia dinilai sehat atau tidak (lalu disembuhkan) berdasarkan teori-teori ilmiah. Adanya penggunaan percobaan psikologis dan test keperibadian secara luas dalam

pendidikan juga menggambarkan gerakan yang berupaya menjadikan manusia obyek pengetahuan, yang bisa diteliti dan dikontrol. Akhirnya, dalam praktek pendidikan, performa peserta didik *dinilai* sebagai kerangka aturan mutlak. Misalnya seseorang dengan prestasi terbaik adalah ia yang memenangkan hadiah. Ini menjebak pendidikan menjadi seperti perlombaan bukan penemuan jati diri.

### ***Konsep Pendidikan Eksistensialisme***

*Prinsip dasar:* pendidikan adalah proses membuka dari dalam. Maka segala cara pendidikan yang sekiranya mendukung proses ini dan membantu orang untuk mengenal dirinya dianggap penting.

*Kurikulum tidak penting,* yang penting adalah hubungan guru-murid yang intens. Pengajaran yang baik, yang menyentuh hati dan pikiran para siswa, mengolah konflik dalam diri mereka, dan memberikan tantangan serta mendorong siswa untuk menemukan dirinya adalah ideal pendidikan eksistensialisme.

Model guru ideal: Socrates, seseorang yang sanggup meluangkan seluruh kehidupannya untuk sang murid: memancing pikiran-pikiran dan tindakan brilian dari murid, rela menampilkan sikap tidak tahu agar sang murid menjadi percaya diri akan penemuannya, dan sebagainya

Pentingnya perhatian terhadap emosi, perasaan, dan bahan-bahan yang berurusan dengan keberadaan nyata manusia.

Menolak *nilai* kompetensi pendidikan. Pendidikan bukan untuk mencetak siswa memiliki kemampuan tukang atau ahli agar dapat bekerja, atau menjadi warga negara yang baik. Pendidikan adalah roses menjadi yang memberikan perhatian pada aspek-aspek objektif, logis, dan intelektual dari tindakan seseorang.

Siswa	Ada yang rasional yang memiliki kebebasan memilih dan kemampuan bertanggung jawab terhadap pilihannya, berkomitmen terhadap pilihan yang telah ditetapkan.
Tujuan Pendidikan	Menyediakan pengalaman yang luas dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan
Kurikulum	Sebagian besar liberal, karena pembelaran liberal lebih dapat dijadikan dasar bagi kebebasan manusia
Pendidikan Sosial	Kebebasan sebagai aturan, karena tugas pendidikan sosial adalah mendidik siswa untuk respek terhadap kebebasan semua pihak. Respek terhadap kebebasan yang lain merupakan hal esensial, bagi pengatasan konflik
Peran Guru	Untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan akademik
Metode	Tak ada ketentuan khusus. Apapun metodenya yang penting dapat menghasilkan jalan untuk mencapai kebahagiaan dan karakter yang baik

## Implikasi Eksistensialisme Pada Administrasi Pendidikan

Lalu apa implikasinya bagi Administrasi Pendidikan? Pemikiran Eksistensialisme menginginkan kebebasan manusia atau penemuan manusia utuh terkadang memunculkan sikap egois, hanya mau menang sendiri, dan karenanya a-sosial. Karena itulah, pada awal-awal perkembangan ilmu administrasi (yang menekankan pada kekompatan kerja organisasi) eksistensialisme justru dianggap sebagai “bumerang” dan bermasalah. Namun perkembangan ilmu administrasi selanjutnya, justru membutuhkan beberapa prinsip pemikiran ini.

## **Implikasi Positif**

Asumsi dasar eksistensialisme adalah kebutuhan akan komitmen dan tanggungjawab personal. Administrasi Pendidikan sangat membutuhkan dua sifat ini.

Administrasi pendidikan perlu komitmen yang kuat untuk tujuan-tujuan pendidikan, untuk meningkatkan profesionalitas, dan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi tersebut.

Para administrator mesti mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengidentifikasi kepercayaan dan nilai dirinya serta memilih asumsi filosofis yang dia harapkan bisa menuntun hidupnya dan mendasarkan tindakan administratifnya. Singkat kata, ia membutuhkan hal tersebut demi tanggungjawab untuk menjadi seseorang yang dia harapkan dan bertindak selaras dengan hal tersebut.

### **Implikasi Prinsip Eksistensialisme yang menolak sains**

- Kalangan eksistensialis selalu mengingatkan kita bahwa sains hanyalah sebuah perangkat untuk membantu manusia mencapai tujuannya.
- Penyandaran yang berlebih pada sains akan menimbulkan persoalan besar dalam administrasi pendidikan. Sebab ketika seseorang berusaha mencari pengetahuan tentang dirinya lewat sains, maka seringkali kenyataan yang timbul adalah ia justru kehilangan dirinya.

### **Implikasi Negatif:**

Penolakan pada segala hal yang berbau ilmiah tidak bisa dijadikan dasar bagi administrasi pendidikan eksistensial. Bagaimanapun ada banyak temuan sains yang memberikan sumbangan bagi efektivitas kerja administrasi. Maka dunia administrasi pendidikan

mengambil jalan tengah:

- Pada satu sisi sumbangan sains, pada sisi lain mesti mengakui batas-batas sains dan fungsinya yang hanya sebagai perangkat yang membantu manusia
- Penggunaan sains tidak sama sekali kemudian menyebabkan seseroang melepaskan tanggungjawabnya.
- Eksistensialisme yang menolak rasionalisme ekstrim atau positivisme logis kemudian dapat saja menghardirkan hal-hal irasional dalam tindakan etis manusia.

Positivisme logis menetapkan bahwa sains bisa menunjukkan jalan terbaik untuk kehidupan manusia dan memimpin mereka bila saja mereka meletakkan kepercayaan penuh atas sains itu sendiri. Lebih dari itu, sains sebenarnya mempunyai tambahan keuntungan sendiri ketika orang-orang bertindak dalam cara yang ditentukannya.

Sementara di sisi lain, eksistensialisme menyatakan bahwa setiap individu mesti punya kebebasan secara utuh dalam memilih cara dan metode untuk tindakan mereka.

- Tidak ada cara yang pasti (objektif) yang dapat menentukan satu tindakan sebagai lebih baik dari yang lain.
- Setiap orang haruslah bebas untuk memilih tuntunan mereka sendiri.
- Apa yang dipilih seseorang dalam bertindak akan mengurangi konsekuensi yang timbul sejauh ia dihadirkan secara bebas dan arbitrer.
- Bentuk relativisme moral dan irrasionalisme administrasi Pendidikan

Kalangan administrator hanya akan menjadi seperti yang mereka inginkan, bertindak sebagaimana mereka kehendaki, menjadi seorang oportunistik, manipulatif, dan bijaksana selama dia bebas dalam



proses memilih dan menghendaki hal tersebut serta bertanggungjawab secara moral seperti dalam pandangan eksistensialisme.

Pada saat tanggungjawab dan moralitas begitu diperlukan dalam administrasi, orang pada akhirnya akan mulai mempersoalkan prinsip eksistensialisme yang membingungkan: manusia dapat bertindak bebas sesuai pilihannya namun tetap bertanggungjawab atas hal tersebut.

## **Refleksi**

Administrasi sebagai pengaturan berdasar kebijakan publik sebagaimana diterapkan pada awal-awal perkembangannya membuat manusia dan aspek kemanusiaan terabaikan. Manajemen atau administrasi yang terinspirasi positivisme atau mungkin pragmatisme memang dapat menyelesaikan masalah, namun dengan masalah baru yang lebih besar, yaitu masalah hilangnya aspek kemanusiaan.

Kritik atas situasi ini diantaranya dikemukakan oleh Horkheimer, dalam *The End of Reason*, “untuk dapat bertahan hidup, manusia mengubah dirinya menjadi seperangkat alat yang setiap saat bereaksi dengan tepat terhadap situasi-situasi sulit dan membingungkan yang membentuk hidupnya” Pengabaian aspek kemanusiaan menjadikan manusia sekedar alat produksi dari sistem administrasi. Akhirnya masyarakat menjadi alat untuk mencapai efisiensi, produktivitas, planning dan semua kategori administrasi yang menyebabkan manusia menjadi semakin tumpul akal budinya.

Buku Mihaly Csikszentmihalyi, *Good Business*, dapat dijadikan rujukan bagi pemuliaan manusia dalam kerja administrasi. Menurut Mihaly, praktek administrasi tanpa kemanusiaan akan menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjebak pada keharusan menyesuaikan diri. Padahal menurut Mihaly “pekerjaan kita sangat menentukan seperti apa hidup kita... pekerjaan bisa menjadi salah satu aspek kehidupan kita yang paling menyenangkan dan memuaskan”.

Pertimbangan eksistensialisme pada akhirnya mendesak penyertaan pertimbangan aspek kemanusiaan dalam aktivitas administrasi. Mihaly menulis bahwa tujuan pekerjaan tidak melulu kesuksesan perusahaan, melainkan juga harus memastikan tercapainya kebahagiaan personalnya:

Tujuan manajemen adalah menciptakan nilai melalui kerja manusia yang bekerja sama demi satu tujuan. Ada banyak cara untuk melakukannya, termasuk perbudakan dan penyuapan. Namun, di sini kita akan berfokus pada cara terbaik untuk mengelola manusia, yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang membuat para karyawan sungguh-sungguh menikmati kerja mereka dan berkembang [sebagai diri] dalam proses itu. Dari sudut pandang perusahaan, seperti itulah tempat kerja yang ideal, sebab tempat kerja seperti itu akan menarik orang-orang yang paling cakap, membuat mereka bertahan lebih lama, dan akan memperoleh upaya spontan dari mereka. Tempat kerja seperti itu juga ideal dari sudut pandang karyawan, sebab akan membantu mereka menuju hidup yang lebih bahagia, dan hal itu akan mendukung perkembangan kompleksitas personal mereka. (Mihaly, 2003: 137)

Sementara itu Stephen Covey dalam *The 8 Habits* mengemukakan visi baru manajemen abad ini:

Menjadi efektif sebagai individu dan organisasi, bukan lagi merupakan pilihan dalam dunia kita sekarang ini ---sebaliknya, ini adalah harga yang harus dibayar untuk masuk ke medan permainan. Kendati demikian, untuk dapat bertahan hidup, bertumbuh, berinovasi, menjadi unggul, dan terkemuka dalam realitas baru zaman kita ini kita tidak hanya harus membangun efektivitas (*effectiveness*), tetapi juga melampauinya. Panggilan dan kebutuhan era baru ini adalah *greatness* –keagungan, kehebatan. Panggilan kita dan kebutuhan untuk era baru ini adalah untuk mengejar pemenuhan diri (*fulfillment*), pelaksanaan yang penuh semangat (*passionate execu-*

*tion*), dan sumbangan yang bermakna (*Significant contribution*) (2008: 8).

Praktek administrasi harus berubah dari sekadar mengejar efektivitas menjadi mengupayakan kemuliaan kemanusiaan. Efektivitas adalah ciri administrasi di bawah terang realisme, positivisme, dan pragmatisme; sedangkan “kemuliaan” merupakan konsekuensi dari pemikiran eksistensialisme.

## EPILOG

### MEMBACA DRUCKER

*“Manajemen, telah menjelaskan mengapa, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita dapat mempekerjakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang besar dalam jumlah banyak untuk melakukan suatu kerja yang produktif.”*

**(Peter Drucker)**

*“Setiap manajer, mengambil semua pengetahuan dan inspirasi dari ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, filsafat, ekonomi, sejarah, dan etika, dan juga dari ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, para manajer membuat semua pengetahuan ini menjadi fokus dan menghasilkan hasil yang efektif, seperti menyembuhkan orang sakit, mengajar siswa, membangun jembatan...”*

**(Peter Drucker, 2001)**

Di bidang manajemen, Peter Drucker (1909–2005) adalah seorang tokoh fenomenal. Dalam dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua, tulisan Drucker paling banyak dibaca dan terkenal di dunia. Lahir di Wina, ia belajar ekonomi dan hukum di Austria, Jerman dan Inggris sebelum menetap di Amerika Serikat, mengajar filsafat dan politik di Bennington College di Vermont dari 1942 hingga 1949. Dari 1950 hingga 1971, ia adalah profesor manajemen di New York University's Graduate Sekolah Bisnis. Dia kemudian mengajar ilmu sosial dan manajemen di tempat yang sekarang bernama *Claremont*

*Graduate University di California*. Ia konon masih mengajar di usia sembilan puluhan. Selama karirnya yang panjang, ia menerbitkan tiga puluh sembilan (39) buku dan ratusan artikel dan kolom, menyampaikan ribuan kuliah, menulis dan muncul dalam film pendidikan tentang manajemen dan masih menemukan waktu untuk berkonsultasi dengan banyak organisasi di seluruh dunia.

Jadi, Drucker yang pengajar Filsafat dan manajemen adalah model penting bagi buku Filsafat Administrasi ini. Mari kita lihat beberapa pemikirannya.

Buku pertama Drucker adalah *The End of Economic Man: the Origins of Totalitarianism*, (1939), buku ini menjelaskan kebangkitan totalitarisme di Eropa dari perspektif sosial dan mengambil dari rekomendasi analisisnya untuk harmoni sosial. Dia mendiagnosis Marxisme dan fasisme sebagai hasil dari kegagalan industrialisme kapitalis untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam konteks yang ditandai dengan disintegrasi masyarakat dan nilai-nilai tradisional. Kapitalisme menuntut agar kegiatan non-ekonomi disubordinasikan ke kegiatan ekonomi tetapi, dalam pandangan Drucker, hierarki ini memberi makan ular nihilistik di dadanya. Totalitarianisme dari jenis Marxis atau fasis, menurutnya, tumbuh dari keputusan massa yang irasional yang dipimpin oleh para elit yang tidak mampu memberikan jawaban etis atas pertanyaan-pertanyaan nyata dan mendesak dari zaman industri modern. Karena itu, usul Drucker, diperlukan bentuk masyarakat baru yang akan memberikan peran dan kedudukan yang berarti bagi warganya melalui organisasi ekonomi yang dibentuk kembali sebagai komunitas.

Inilah titik berangkat pentingnya organisasi modern yang dikelola secara rasional. Dorongan Drucker ini diperkuat pada buku-buku selanjutnya, seperti *The Future of Industrial Man* (1942), *The Concept of the Corporation* (1946) dan *The New Society* (1949). Pada kedua buku ini, Drucker bersikeras bahwa individu memiliki hak dan

kebutuhan yang tak terhindarkan, seperti otonomi, keamanan, martabat, kepemilikan, dan rasa hormat. Lalu secara filosofis, Drucker menegaskan bahwa pekerjaan bagi individu dapat memberikan status dan fungsi sebanyak pendapatan. Ketika majikan mengambil tenaga kerja sebagai komoditas yang dapat diganti atau ketika pekerja hanya menganggap pekerjaan mereka sebagai sumber pendapatan, dengan kata lain ketika salah satu pihak melihat yang lain hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, frustrasi yang mengarah pada totalitarianisme adalah hasil yang tidak dapat dihindari. Agenda yang saling bertentangan dari individu dan organisasi ekonomi hanya dapat didamaikan melalui tindakan kewarganegaraan yang bertanggung jawab oleh majikan dan karyawan. Drucker percaya bahwa profesi baru dan berkembang menempati peran penting dalam mewujudkan integrasi yang berarti ini: manajemen. Peran manajer adalah untuk membuat sumber daya ekonomi dan pekerja produktif dengan cara yang harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pada buku lain, *The Practice of Management*, Drucker mempromosikan '*Management by Objectives and Self-Control*' (MBO). Akar dari model ini adalah keyakinan bahwa manajer harus fokus pada apa yang dituntut oleh pekerjaan. Komunikasi yang bersahabat dan kepuasan kerja bukanlah pendorong manajemen yang baik. Pendorong yang baik adalah hasil yang dipandu oleh tujuan.

Drucker berpendapat bahwa menangani secara mandiri hal-hal seperti standar pekerjaan, praktik, tugas dan tanggung jawab hanya menyebabkan kebingungan yang melumpuhkan. Untuk menyatakannya semuanya secara bermakna, termasuk pekerja dan manajer, diperlukan bahasa yang sama. Tujuan adalah perekat yang mengintegrasikan organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, tidak hanya perencanaan yang tidak mungkin, tetapi juga tidak bakal ada pengorganisasian, tidak juga ada penetapan harapan, tidak ada pengukuran kinerja, tidak ada pendelegasian, tidak ada pengembangan karyawan, tidak ada pengambilan keputusan yang berarti dan tidak ada kepe-

mimpinan yang dapat terjadi. Mendefinisikan tujuan adalah memutuskan tentang apa organisasi itu, apa yang seharusnya dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi.

Tujuan tidak jelas dengan sendirinya, ia harus dialirkan ke semua tingkat hierarki. Manajer mencapai komitmen terhadap tujuan individu, tim, dan departemen ini melalui penggambaran tanggung jawab yang jelas. Drucker mendorong tanggung jawab besar pada manajer. Drucker bersikukuh bahwa manajer, meskipun mereka adalah administrator sumber daya di bawah pengawasan, bukanlah pengontrol kinerja bawahan mereka. Manajer harus memperjelas tujuan dari masing-masing lini pekerjaan, sehingga semua karyawan mengetahui “apa yang diharapkan manajer dari mereka?”, “mengapa” dan “bagaimana mereka harus memenuhi harapan ini”—serta “apa yang akan terjadi jika ini tidak terpenuhi?”: berprestasi atau dipecat. Pendekatan seperti ini bagi Drucker adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan akuntabilitas di semua tingkatan. Hanya berkat pemahaman menyeluruh tentang tuntutan pekerjaan mereka dan penguasaan standar pengerjaan, pekerja dan manajer dapat mencapai pengendalian diri.

Mungkin karena Drucker adalah seorang taat beragama, sehingga tidak bisa meninggalkan harapannya pada manusia. Atau mungkin karena ia terpengaruh Filsafat Eksistensialisme. Pada tahun 1928, dalam usia sembilan belas tahun dan bekerja sebagai pegawai akuntansi, Peter Drucker secara tidak sengaja menemukan *Fear and Trembling* (1843) karya Kierkegaard. Karya itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada kehidupan dan pekerjaan Drucker. Buku ini menyulut obsesinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan otoritas, tanggung jawab, dan legitimasi para manajer. Dalam salah satu publikasinya yang paling awal, Drucker memuji Kierkegaard sebagai nabi karena bersikeras mengajukan pertanyaan mendasar 'bagaimana kehidupan manusia mungkin?' harus muncul sebelum pertanyaan 'bagaimana masyarakat mungkin?'

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam urutan terbalik (seperti yang dilakukan para ekonom, misalnya) secara implisit menerima determinisme, karena itu berarti meyakini bahwa keberadaan individu bergantung pada keberadaan masyarakat. Sependapat dengan Kierkegaard, Drucker berpendapat bahwa seseorang ada pada dua tingkat: spiritual dan sosial, tetapi tingkat spiritual harus didahulukan karena nilai-nilai sosial korup dan menipu: 'masyarakat saja tidak cukup—bahkan untuk masyarakatnya sendiri'

Tesis Drucker tentang asal-usul totalitarianisme Jerman dan Rusia dalam *The End of Economic Man* (1939) dan tidak pernah diingkari, berasal dari keyakinan eksistensial sentral ini. Tanggung jawab manajemen yang menyeluruh, dia bersikeras, adalah untuk mengintegrasikan secara bermakna individu dengan ekonomi dan akhirnya pribadi dengan sosial dengan mendamaikan kepentingan karyawan dengan kepentingan majikan mereka. Ekonomi tidak bisa menjadi perbatasan terakhir: motif keuntungan organisasi komersial tidak boleh dibiarkan mendominasi jika masyarakat ingin tetap harmonis, stabil dan damai. Dinyatakan secara berbeda: tidak ada, juga tidak mungkin ada, etika bisnis karena yang ada hanya satu etika, yakni etika pribadi.

Berfokus pada manusia, itulah pengaruh Filsafat Eksistensialisme pada Drucker. Mari kita lihat pemikiran lainnya dari Drucker yang fenomenal, misalnya mengenai "Pekerja-Pengetahuan". Pemikiran ini mendahului zaman, sebelum penjaga tol diganti mesin Drucker sudah meramalkan bahwa pekerja yang mendakan tenaga akan tergantikan mesin. Ia menyebutnya, manual-worker. Karena itu sejak tahun 1970-an Drucker mendorong munculnya "knowledge worker" yang bekerja dengan otaknya, dengan skill, attitude yang has manusiawi.

Tentu saja konsep "knowledge worker" ini terasa sekali aliran eksistensialnya. Manajemen bagi Drucker memang *soal manusia*.



Fungsi utama manajemen adalah memungkinkan terjadinya kerja sama antar individu-individu *yang berbeda menjadi saling relevan*, dan *kelemahan individu-individu menjadi tidak relevan*. Manajemen memberi ruang manusia menjadi bermanfaat. Ini juga yang ditegaskan Drucker bahwa “Kemampuan kita untuk berkontribusi di dalam masyarakat juga sangat tergantung dari sejauh mana kemampuan, dedikasi, dan usaha kita dipergunakan oleh organisasi tempat kita bekerja.” (Drucker, 2001, 11).

Lalu pada akhirnya Drucker menulis “Hasil dari praktek bisnis “adalah konsumen yang puas.” (Drucker, 2001, 12).

Mudah-mudahan pembaca buku ini puas dengan buku ini.

